



**PENGARUH RASIO KEMANDIRIAN DAERAH,
RASIO EFEKTIVITAS KEUANGAN DAERAH, DAN RASIO EFISIENSI
KEUANGAN DAERAH TERHADAP BELANJA MODAL UNTUK
PELAYANAN PUBLIK PADA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2013-2017**

SKRIPSI

Oleh :

MURANAH

NPM. 4315500099

Diajukan Kepada

**Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Pancasakti Tegal**

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya Muranah, yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa Skripsi yang saya ajukan ini adalah hasil karya sendiri untuk mendapatkan gelar. Karya ini adalah milik saya, karena itu pertanggungjawabannya sepenuhnya berada pada saya.

Tegal, Juni 2020

Yang Menyatakan



Muranah

Pengesahan Skripsi

Nama : Muranah

NPM : 4315500099

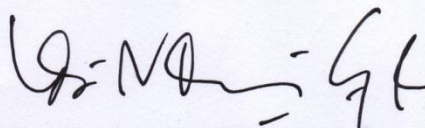
Judul : PENGARUH RASIO KEMANDIRIAN DAERAH, RASIO EFEKTIVITAS KEUANGAN DAERAH, DAN RASIO EFISIENSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP BELANJA MODAL UNTUK PELAYANAN PUBLIK PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2013-2017

Telah diuji dan dinyatakan lulus dalam ujian skripsi, yang dilaksanakan pada:

Hari : Sabtu

Tanggal : 13 Juni 2020

Ketua Penguji



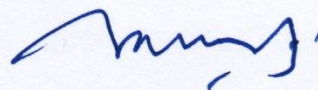
Dr. Dien Noviany R. S.E, M.M, Akt C.A
NIPY. 136628111975

Penguji I,

Penguji II,



Aminul Fajri, S.E, M.Si, Akt
NIPY. 1385231970



Drs. Baihaqi Fanani, M.M, Akt, C.A
NIPY. 1576981964

Mengetahui,
Ketua Program Studi Akuntansi



Aminul Fajri, S.E, M.Si, Akt
NIPY. 1385231970



**PENGARUH RASIO KEMANDIRIAN DAERAH,
RASIO EFEKTIVITAS KEUANGAN DAERAH, DAN RASIO EFISIENSI
KEUANGAN DAERAH TERHADAP BELANJA MODAL UNTUK
PELAYANAN PUBLIK PADA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2013-2017**

SKRIPSI

Oleh :

MURANAH

NPM : 4315500099

Disetujui Untuk Ujian Skripsi

Tanggal : 13 Juni 2020

Dosen Pembimbing I,

Dr. H. Tabrani, M.M
NIDN. 0612126001

Dosen Pembimbing II,

Teguh Budi Raharjo, S.E., M.M
NIDN. 0615057601

Mengetahui,

Ketua Program Studi Akuntansi

Aminul Fajri, S.E., M.Si, Akt
NIDN. 0602037002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat selesai sebagai salah satu bahan penelitian untuk penyusunan skripsi di Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.

Penulis menyadari bahwa dari awal, proses, dan hingga selesainya skripsi ini tidak terlepas dari segala bentuk bantuan, bimbingan, dorongan, dan doa dari berbagai pihak, maka untuk itu dengan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Dr. Dien Noviany R., S.E., M.M., Ak., CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.
2. Bapak Dr. Tabrani, M.M., selaku Dosen Pembimbing I yang selalu memberikan bimbingan, nasehat, dan dukungannya selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Teguh Budi Raharjo, S.E., M.M., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan senantiasa sabar dalam memberikan pengarahan, bimbingan, dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Dosen Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan ilmu dan pembelajaran yang bermanfaat kepada penulis.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan. Hal tersebut semata-mata dikarenakan keterbatasan penulis dalam segala hal. Semoga skripsi ini bermanfaat dan berguna sebagaimana mestinya.

Penulis

Muranah

MOTTO

- Tidak ada keberhasilan tanpa kesungguhan. Dan tidak ada kesungguhan tanpa kesabaran. (Mario Teguh)
- Pendidikan mempunyai akar yang pahit, tapi buahnya manis. (Aristoteles)

PERSEMBAHAN

Sujud syukur kehadiran Allah SWT dengan segala rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sebagai rasa syukur atas segala karunia-Nya ku persembahkan karya ini untuk:

1. Kedua orang tuaku tercintayang telah memberikan kasih sayangnya sepanjang hayat.
2. Suami dan anakku tercinta, yang memberikan semangat dan motivasi.
3. Kakak dan Adikku yang saya sayangi .
4. Sahabat-sahabatkuyang selalu mensupport saya.
5. Almamater UPS yang saya banggakan.

ABSTRAK

Muranah 4315500099. Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah, Rasio Efektivitas Keuangan Daerah, dan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal Untuk Pelayanan Publik Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013-2017. Skripsi. Tegal : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal 2020.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas keuangan daerah, dan rasio efisiensi keuangan daerah secara simultan, untuk mengetahui pengaruh rasio kemandirian daerah secara parsial, untuk mengetahui pengaruh rasio efektivitas keuangan daerah secara parsial, dan untuk mengetahui pengaruh rasio efisiensi keuangan daerah secara parsial terhadap belanja modal untuk pelayanan publik pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2013-2017. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi. Metode analisa data adalah dengan menggunakan uji asumsi klasik, analisis regresi dan pengujian hipotesis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas keuangan daerah, dan rasio efisiensi keuangan daerah berpengaruh secara simultan terhadap belanja modal untuk pelayanan publik, rasio kemandirian daerah tidak berpengaruh secara parsial terhadap belanja modal untuk pelayanan publik, rasio efektivitas keuangan daerah tidak berpengaruh secara parsial terhadap belanja modal untuk pelayanan publik, rasio efisiensi keuangan daerah tidak berpengaruh secara parsial terhadap belanja modal untuk pelayanan publik.

Kata Kunci : Rasio kemandirian daerah, Rasio efektivitas keuangan daerah, Rasio efisiensi keuangan daerah dan Belanja modal

ABSTRACT

Muranah 4315500099. The Influence of the Regional Independence Ratio, the Regional Financial Effectiveness Ratio, and the Regional Financial Efficiency Ratio to Capital Expenditures for Public Services in Pemalang District Government in 2013-2017. Thesis. Tegal: Faculty of Economics and Business, University of Pancasakti Tegal 2020.

This study aims to determine the effect of regional independence ratio, the ratio of regional financial effectiveness, and the ratio of regional financial efficiency simultaneously, to determine the effect of partial regional independence ratio, to determine the effect of the ratio of regional financial effectiveness partially, and to determine the effect of the ratio of regional financial efficiency partially on capital expenditure for public services in Pemalang District Government in 2013-2017. Data collection techniques using documentation techniques. Data analysis method is to use the classic assumption test, regression analysis and hypothesis testing.

The results showed that the ratio of regional independence, the ratio of regional financial effectiveness, and the ratio of regional financial efficiency simultaneously influence capital expenditure for public services, the regional independence ratio does not have a partial effect on capital expenditure for public services, the ratio of regional financial effectiveness has no partial effect on capital expenditure for public services, the ratio of regional financial efficiency does not have a partial effect on capital expenditure for public services.

Keywords : Regional independence ratio, Local financial effectiveness ratio, Local financial efficiency ratio and Capital expenditure

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
 BAB I. PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
 BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	 12
A. Landasan Teori	12
1. Teori Keagenan.....	12
2. Teori Pilihan Rasional.....	19
3. Anggaran Daerah Berbasis Kinerja.....	21
4. Pelayanan Publik.....	24
5. Belanja Modal.....	27
6. Rasio Keuangan Daerah.....	31
B. Studi Penelitian Terdahulu.....	37
C. Kerangka Pemikiran	42
D. Perumusan Hipotesis.....	44
 BAB III. METODE PENELITIAN	 46
A. Pemilihan Metode	44
B. Lokasi Penelitian.....	46

C. Jenis dan Sumber Data	47
D. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel.....	47
1. Definisi Konseptual Variabel.....	47
2. Definisi Operasional Variabel.....	48
E. Teknik Pengumpulan Data.....	49
F. Teknik Pengolahan Data.....	49
G. Analisis Data dan Uji Hipotesis.....	50
1. Statistik Deskriptif.....	50
2. Uji Asumsi Klasik.....	50
3. Analisis Regresi Linier Berganda.....	53
4. Uji Hipotesis.....	54
5. Uji Koefisien Determinasi.....	55
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	56
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	56
1. Gambaran Umum BPKAD Kab. Pemalang.....	56
2. Visi dan Misi Kabupaten Pemalang.....	57
3. Susunan Organisasi BPKAD Kab. Pemalang.....	58
4. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja.....	59
B. Hasil Penelitian	61
C. Pembahasan	83
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN	95

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Persentase Realisasi Belanja dalam APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013-2017	6
2.1 Tingkat Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah	33
2.2 Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan.....	35
2.3 Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan	37
2.4 Studi Penelitian Terdahulu	37
3.1 Definisi Operasional Variabel.....	49
4.1 Realisasi Belanja Modal Kabupaten Pemalang Periode 2013-2017 (dalam jutaan rupiah)	62
4.2 Proporsi Realisasi Belanja Modal terhadap Total Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Periode 2013-2017 (dalam rupiah)	63
4.3 Deskripsi Statistik Variabel Belanja Modal Daerah Kabupaten Pemalang dalam tahun 2013-2017.....	64
4.4 Rasio Kemandirian Daerah Kabupaten Pemalang Periode 2013-2017(dalam rupiah).....	64
4.5 Deskripsi Statistik Variabel Rasio Kemandirian Daerah Kabupaten Pemalang dalam tahun 2013-2017	66
4.6 Rasio Efektifitas Keuangan Daerah Kabupaten Pemalang Periode 2013-2017 (dalam rupiah)	67
4.7 Deskripsi Statistik Variabel Rasio Efektifitas Keuangan Daerah Kabupaten Pemalang dalam tahun 2013-2017	68
4.8 Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Pemalang Periode 2013-2017 (dalam rupiah)	69
4.9 Deskripsi Statistik Variabel Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Pemalang dalam tahun 2013-2017.....	70
4.10 Hasil Uji Normalitas <i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>	71
4.11 Hasil Uji Multikolinieritas	72
4.12 Hasil Uji Autokorelasi.....	73
4.13 Hasil Analisis Uji Regresi Linier Berganda	75

4.14 Hasil Analisis Uji F (Simultan).....	77
4.15 Hasil Analisis Uji t parsial	79
4.16 Hasil Uji Model R Square	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Pemikiran.....	44
4.1 Susunan Organisasi BPKAD Kabupaten Pemalang	59
4.2 HasilUjiHeteroskedastisitasGrafik <i>Scatterplots Regresi</i>	74

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Data Penelitian	96
2. Input Data Analisis	98
3. Hasil Uji Deskripsi Statistik.....	99
4. Hasil Uji Asumsi Klasik	101
5. Hasil Uji Regresi Linier Berganda.....	108
6. Nilai-nilai F tabel	111
7. Nilai-nilai dalam Distribusi t (t tabel).....	113
8. Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2013-2017.....	114
9. APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2013-2017.....	125
10. Surat Ijin Penelitian.....	179

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Daerah merupakan lembaga yang mempunyai tugas untuk mengatur roda pemerintahan di daerah, pembangunan daerah, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat luas. Suatu daerah dapat maju dan berkembang apabila mampu menciptakan roda pemerintahan yang transparan dan mempunyai akuntabilitas yang tinggi. Seiring bergantinya pemerintahan masa Orde Baru ke Reformasi, sistem pemerintahan daerah dan pusat mengalami perubahan. Dimana sebelum reformasi, menggunakan sistem yang bersifat sentralistik, akan tetapi sejak tahun 1999 berubah menjadi sistem desentralisasi atau yang biasa dikenal dengan era otonomi daerah.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi penanda lahirnya otonomi daerah, menjelaskan tentang kekuasaan pemerintah daerah dalam mengelola ke pemerintahannya dan tugas pembantuan secara mandiri agar dapat mensejahterakan masyarakat, termasuk kekuasaan untuk mengelola keuangannya sendiri. Penyelenggaraan segala kegiatan pemerintah daerah dibiayai oleh APBD yang disusun secara tahunan dan disahkan oleh peraturan daerah.

Adanya otonomi, diharapkan pemerintah daerah mampu mengelola keuangannya sendiri dengan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ada dan mengurangi ketergantungan kepada pihak ekstern demi terwujudnya kemandirian daerah. Pemerintah daerah diharapkan dapat mengelola peningkatan pendapatannya sendiri secara optimal dengan mengalokasikan dana tersebut pada jenis belanja yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi agar bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pengoptimalan tersebut harus secara tegas dimuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan wadah untuk merencanakan segala bentuk anggaran baik pemasukan maupun pengeluaran yang terjadi di pemerintah daerah. Hal ini berarti bahwa pengalokasian anggaran publik diutamakan untuk keperluan publik, seperti belanja modal.

Analisis rasio keuangan daerah terhadap anggaran pendapatan belanja daerah penting untuk dilaksanakan. Rasio keuangan dapat digunakan untuk mengukur kemampuan daerah dalam mengelola keuangan daerah, mengukur tingkat keefektifan dan keefisienan dalam membelanjakan anggaran daerah, menilai seberapa besar keaktifan pemerintah daerah dalam menggunakan pendapatannya, mengukur kontribusi tiap-tiap komponen pendapatan asli daerah, dan melihat sejauh mana perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu (Halim, 2008 dalam Novianto dan

Hanafiah,2015). Baik tidaknya kinerja keuangan daerah bisa dilihat dari hasil analisis rasio keuangan.

Rasio Kemandirian Daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam mendanai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang sudah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan oleh daerah. Rasio Kemandirian Daerah menunjukkan keadaan kemandirian suatu daerah yang dihitung dengan besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap jumlah keseluruhan pendapatan daerah, sehingga menimbulkan suatu masalah bahwa suatu daerah yang otonom dapat mempertinggi jumlah belanja modal untuk pelayanan publik. Rasio Kemandirian juga mencerminkan peran serta rakyat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rakyat membayar pajak dan retribusi daerah akan mencerminkan tingkat kesejahteraan rakyat yang semakin tinggi (Halim,2006:233). Semakin tinggi rasio kemandirian berarti semakin rendah daerah itu bergantung kepada bantuan pihak ekstern (Mahmudi,2010).

Rasio Efektivitas Keuangan Daerah diukur menggunakan cara yaitu realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihitung berdasarkan alokasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun bersangkutan, sehingga suatu daerah dapat dikatakan efektif apabila jumlah realisasi pendapatan lebih tinggi dari pada target yang ditetapkan berdasarkan kemampuan sesungguhnya suatu daerah (Halim,2006:234). Sehingga kemampuan dan

efektivitas keuangan daerah dalam membelanjakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan memperlihatkan tingkat kemandirian daerah dalam mengelola potensi dan manajemen keuangan daerah. Kemampuan daerah dalam melaksanakan tugas dikatakan efektif jika rasio yang diperoleh minimal 100%. Akan tetapi, semakin tinggi rasio efektivitas ini maka semakin tinggi pula peran serta rakyat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan sumber dari pendapatan asli daerah (Nisa,2014).

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah merupakan rasio yang mencerminkan perbandingan antara realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah. Semakin kecil rasio ini, semakin efisien, begitu pula sebaliknya. Dalam hal ini dengan memperhitungkan bahwa pengeluaran yang direalisasikan tepat dengan kegunaannya dan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Pada sektor pelayanan publik merupakan suatu pekerjaan yang dilaksanakan dengan tepat dan pengorbanan sekecil mungkin. Pekerjaan dianggap efisien jika dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut diperoleh hasil yang maksimal dengan biaya yang minimal.

Belanja Modal diartikan sebagai bentuk belanja pemerintah daerah yang kegunaannya lebih dari satu periode dan akan menambah aset daerah yang kemudian akan memberi nilai tambah pada belanja rutin misalnya biaya pemeliharaan yang termasuk dalam belanja administrasi umum. Suatu belanja diklasifikasikan sebagai belanja modal jika : 1) Pengeluaran tersebut menyebabkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang

menambah masa umur, manfaat, dan kapasitas; 2) Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset atau lainnya yang telah ditetapkan pemerintah; dan 3) Perolehan aset tetap tersebut dimaksudkan tidak untuk dijual. Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), definisi belanja modal yaitu pengeluaran yang dilaksanakan dalam rangka pembentukan modal yang dapat menjadikan aset tetap bertambah dan memberikan kegunaan lebih dari satu tahun anggaran, termasuk pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta mempertinggi kapasitas dan kualitas aset. Belanja modal dapat meningkatkan taraf sejahtera bagi masyarakat dan menambah pelayanan masyarakat dalam membentuk kepribadian daerah yang otonom (Dikutip dalam Mardiasmo, 2009).

Dikutip dari Laporan Tahunan Pemerintah Kabupaten Pemalang untuk Tahun yang Berakhir dengan 31 Desember 2017 dijelaskan bahwa fenomena yang terjadi dalam Pemerintah Kabupaten Pemalang sampai dengan saat ini yaitu masih terbatasnya ruang fiskal untuk belanja modal. Dimana postur anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang masih didominasi oleh belanja yang bersifat wajib dan mengikat, seperti belanja pegawai, belanja operasional kantor, dan belanja wajib lainnya seperti biaya bantuan finansial untuk pemerintah desa, pendampingan program-program nasional dan lain-lain. Kondisi ini menyebabkan alokasi anggaran belanja yang tersedia untuk membiayai program dan kegiatan yang

dimaksudkan untuk memperluas pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan untuk publik semakin terbatas.

Hal ini terlihat dalam laporan realisasi anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang dari tahun 2013-2017 seperti yang ditunjukkan dalam tabel berikut :

Tabel 1.1
Persentase Realisasi Belanja
dalam APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang
Tahun 2013-2017

No.	Pos	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Belanja Pegawai	92,11%	92,19%	90,37%	88,01%	93,80%
2	Belanja Barang dan Jasa	94,69%	88,94%	89,22%	87,98%	90,04%
3	Belanja Modal	76,86%	66,91%	77,52%	71,29%	74,48%
4	Belanja Lainnya	94,52%	91,62%	93,26%	91,32%	94,79%

Sumber : Data diolah (2019)

Tabel 1.1 menunjukkan proporsi macam-macam jenis belanja daerah tiap tahun di Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang. Belanja pegawai (langsung dan tidak langsung) masih mendominasi belanja daerah di Kabupaten Pemalang, walaupun pada rentang waktu 2015-2016 belanja pegawai terus mengalami penurunan. Belanja pegawai pada rentang waktu 2013-2015 berada diatas 90 persen, akan tetapi di tahun 2016 berada dibawah 90 persen. Berbeda dengan belanja pegawai, belanja barang dan jasa di Kabupaten Pemalang pada rentang waktu 2013-2017 mengalami peningkatan setiap tahunnya, meskipun sempat turun di tahun 2014 dan 2016. Belanja daerah yang ditunjukkan untuk belanja modal juga menunjukkan kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2015 belanja modal

mengalami kenaikan sebesar 10,61 persen namun sebaliknya pada tahun 2016 belanja modal mengalami penurunan sebesar 6,23 persen sedangkan pada tahun 2017 belanja modal kembali mengalami kenaikan menjadi 74,48 persen. Belanja lainnya juga mengalami kenaikan dan penurunan dalam rentang waktu 2013-2017. Pada tahun 2015 belanja lainnya naik dibanding sebelumnya, tetapi turun lagi di 2016 dan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2017. Rendahnya alokasi terhadap belanja modal, menunjukkan kurangnya perhatian pemerintah pada belanja yang bersifat produktif dan dapat digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Boediarso Teguh Widodo pada event Budget Day yang diadakan Kementerian Keuangan, Rabu (22/11/2017) menyampaikan bahwasanya terdapat 4 indikator yang menunjukkan pengelolaan anggaran daerah belum efektif dan efisien, diantaranya : 1). Pada pemerintah daerah alokasi belanja modal porsi nya lebih kecil dari pada belanja pegawai; 2). Penyerapan anggaran belum optimal; 3). Adanya ketimpangan dalam layanan publik antar daerah; dan 4). Adanya kepala daerah yang terlibat dalam kasus korupsi pengadaan konstruksi bangunan (TEMPO.CO, Jakarta:2017).

Penelitian ini merujuk pada penelitian Fitri (2013), dengan judul penelitian Pengaruh Rasio Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Alokasi Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2009-2012 menunjukkan

hasil bahwa hanya variabel pendapatan asli daerah saja yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal, tetapi variabel rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas keuangan daerah, rasio efisiensi keuangan daerah, dan dana alokasi umum tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal. Akan tetapi, hasil penelitian ini berbeda dengan Ardhini dan Handayani (2011) yang membuktikan bahwa rasio kemandirian daerah memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap alokasi belanja modal untuk pelayanan publik, rasio efektivitas keuangan daerah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal untuk pelayanan publik, rasio efisiensi keuangan daerah memiliki pengaruh negatif namun signifikan terhadap alokasi belanja modal untuk pelayanan publik, dan Sisa Lebih Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap realisasi belanja modal untuk pelayanan publik.

Perbedaan hasil penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya tentang pengaruh rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas keuangan daerah, dan rasio efisiensi keuangan daerah terhadap belanja modal untuk pelayanan publik membuat peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang variabel-variabel yang memiliki pengaruh terhadap belanja modal untuk pelayanan publik. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis merasa perlu mengadakan penelitian dalam skripsi yang berjudul **“Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah, Rasio Efektivitas Keuangan Daerah, dan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Terhadap**

Belanja Modal untuk Pelayanan Publik Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013-2017”.

B. Perumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah diungkapkan diatas, maka yang menjadi masalah utama dalam penulisan ini adalah :

1. Apakah rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas keuangan daerah, dan rasio efisiensi keuangan daerah berpengaruh secara simultan terhadap belanja modal untuk pelayanan publik pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2013-2017 ?
2. Apakah rasio kemandirian daerah berpengaruh secara parsial terhadap belanja modal untuk pelayanan publik pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2013-2017 ?
3. Apakah rasio efektivitas keuangan daerah berpengaruh secara parsial terhadap belanja modal untuk pelayanan publik pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2013-2017 ?
4. Apakah rasio efisiensi keuangan daerah berpengaruh secara parsial terhadap belanja modal untuk pelayanan publik pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2013-2017 ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaruh rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas keuangan daerah, dan rasio efisiensi keuangan

daerah secara simultan terhadap belanja modal untuk pelayanan publik pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2013-2017.

2. Untuk mengetahui pengaruh rasio kemandirian daerah secara parsial terhadap belanja modal untuk pelayanan publik pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2013-2017.
3. Untuk mengetahui pengaruh rasio efektivitas keuangan daerah secara parsial terhadap belanja modal untuk pelayanan publik pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2013-2017.
4. Untuk mengetahui pengaruh rasio efisiensi keuangan daerah secara parsial terhadap belanja modal untuk pelayanan publik pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2013-2017.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna untuk semua pihak yang terkait dengan penelitian ini, diantaranya adalah :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan mampu memberikan informasi sekaligus umpan balik bagi Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang tentang Rasio Kemandirian Daerah, Rasio Efektivitas Keuangan Daerah, dan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah terhadap Belanja Modal untuk Pelayanan Publik. Dengan adanya umpan balik maka dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan kebijakan maupun dalam

mengalokasikan belanja modal untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan peneliti yang berhubungan dengan alokasi belanja modal pemerintah daerah serta memahami lebih dalam mengenai penerapan ilmu pengetahuan pada tataran teori dan aplikasinya.

b. Bagi Universitas Pancasakti Tegal

Diharapkan dapat berguna bagi Universitas Pancasakti Tegal sebagai bahan informasi, referensi, dan kerangka acuan dalam memahami permasalahan yang sama khususnya bagi mahasiswa yang akan menyusun skripsi.

c. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang

Diharapkan dapat memberikan masukan dan gambaran bagi instansi pemerintahan daerah dalam mengurus dan mengatur keuangan daerah terutama alokasi belanja modal agar lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Keagenan

Teori keagenan adalah suatu hubungan yang terbentuk sesuai dengan kontrak perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih, yaitu prinsipal dan agen. Teori keagenan mengatur tentang hubungan keagenan dimana pihak prinsipal menginstruksikan pekerjaan kepada pihak agen yang melaksanakan pekerjaan. Teori keagenan memandang bahwa agen tidak bisa melaksanakan pekerjaan sesuai perintah dari prinsipal. Teori keagenan memberi jawaban dari masalah yang terjadi antara pihak yang saling bekerja sama yang mempunyai tujuan dan pembagian kerja berbeda. Prinsipal adalah pihak yang bertugas memberikan instruksi, mengontrol, menilai, dan memberikan saran atas pekerjaan yang dilakukan pihak agen. Sedangkan agen yaitu pihak yang menerima dan melaksanakan pekerjaan berdasarkan instruksi prinsipal.

Menurut Lane (2003a) dikutip dari Halim dan Abdullah (2006) mengemukakan bahwa teori keagenan dapat dilakukan dalam organisasi masyarakat. Dia mengatakan bahwasanya didalam negara demokrasi modern didasarkan pada serangkaian hubungan prinsipal-agen (Lane, 2000:12-13). Hal yang sama juga disampaikan oleh Moe

(1984) dikutip dari Halim dan Abdullah (2006) yang mengemukakan konsep ekonomika organisasi sektor publik dengan menggunakan teori keagenan. Sedangkan menurut Carr & Brower (2000) dikutip dari Halim dan Abdullah (2006) menyebutkan bahwasanya ada dua pilihan kontrak dalam bentuk keagenan sederhana yaitu : (1) *Behavior-based*, yaitu prinsipal harus mengawasi tingkah laku agen; dan (2) *Outcome-based*, yaitu adanya imbalan untuk memberikan semangat agen dalam meraih kepentingan prinsipal.

Dalam teori keagenan terdapat tujuan yang berbeda antara pihak prinsipal dan pihak agen yang dapat menyebabkan masalah. Masalah agensi dikendalikan oleh sistem pengambilan keputusan yang memisahkan fungsi manajemen dan fungsi pengawasan. Fungsi manajemen bertugas membuat rencana dan eksekusi terhadap kebijakan perusahaan sedangkan fungsi pengawasan bertugas melakukan persetujuan dan memeriksa setiap keputusan penting dalam organisasi yang dapat menyebabkan masalah kepentingan diantara pihak-pihak tersebut. Hubungan keagenan dalam pemerintahan dilaksanakan sesuai dengan peraturan daerah dan bukan hanya sebatas untuk melengkapi kepentingan prinsipal saja. Hal ini disebabkan karena banyak hal yang harus diperhitungkan dalam membangun suatu daerah. Jadi tujuan prinsipal harus diiringi dengan niatan untuk membuat daerahnya berkembang dan mensejahterakan rakyatnya.

Dalam sektor publik teori keagenan adalah sistem keagenan yang bertingkat, dimana dalam pemerintahan hubungan keagenan terjadi dalam tiga bentuk, yaitu:

a. Hubungan Keagenan Pihak Legislatif dan Eksekutif

Dalam perspektif keagenan sektor publik, legislatif (DPRD) merupakan pihak *principal* sedangkan eksekutif (pemerintah daerah) bertindak sebagai *agen*. Anggaran daerah disusun oleh pemerintah daerah sesuai dengan program yang akan dijalankan. Setelah anggaran disusun dalam bentuk RAPBD, kemudian RAPBD tersebut diberikan kepada DPRD untuk kemudian diperiksa. Jika RAPBD yang diajukan sudah sama dengan RKPD, maka akan disahkan menjadi APBD oleh DPRD. APBD itu lah yang berfungsi sebagai pengendali DPRD dalam mengawasi kinerja Pemerintah Daerah.

Lupia & Mc. Cubbins dalam Halim dan Abdullah, 2009 mengemukakan bahwasanya masalah yang terjadi di pihak legislatur dapat dimaknai sebagai fenomena yang disebut dengan *agency problems*. Masalah keagenan setidaknya melibatkan dua pihak, yaitu 1). Pihak *principal*, mempunyai kewenangan untuk melaksanakan tindakan-tindakan, 2). Pihak *agen*, menerima instruksi dari pihak *principal*. Dalam konteks pembuatan

kebijakan oleh legislatif, legislatur merupakan pihak prinsipal yang memberikan instruksi kepada agen misalnya pemerintah atau panitia di legislatif untuk membuat kebijakan baru. Hubungan keagenan terjadi setelah agen membuat usulan kebijakan dan selesai sesudah usulan tersebut diterima atau ditolak.

Johnson dalam oleh Halim dan Abdullah, 2009 mengemukakan bahwa hubungan birokrasi dengan legislatif atau kongres dikenal dengan nama *self-interest model*. Dalam hal ini, legislator ingin dipilih kembali, birokrat ingin memaksimalkan anggarannya, dan konstituen ingin memaksimalkan utilitasnya. Supaya terpilih lagi, legislators mencari program dan projects yang membuatnya terkenal di mata konstituen. Birokrat mengusulkan program-program baru karena ingin agency-nya berkembang dan konstituen percaya bahwa mereka menerima benefits dari pemerintah tanpa harus membayar biayanya secara penuh.

b. Hubungan Keagenan Pihak Legislatif dan Publik

Berkaitan dengan hal memberikan pelayanan kepada publik, legislative (DPRD) bertindak sebagai agens sedangkan publik (rakyat) sebagai prinsipal. Legislatif adalah perwakilan rakyat yang mengemban amanah dari rakyat dalam melaksanakan pekerjaan agar dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan membuat daerahnya semakin berkembang. Legislatif bekerja sesuai dengan kehendak rakyat dan rakyat memonitor kinerja dari

legislatif. Jadi walaupun disatusi legislative sebagai prinsipal, tapi dalam kaitannya dengan publik, legislatif bertugas sebagai agen.

Sehingga dalam melaksanakan tugasnya, legislatif menempatkan dirinya sebagai pihak yang menerima tugas dari publik, kemudian menginstruksikan tugas kepada eksekutif untuk melaksanakan penganggaran.

Eksekutif mempunyai keutamaan dalam hal menguasai informasi dibandingkan dengan legislatif (asimetri informasi). Keunggulan ini berakar dari kondisi faktual bahwa eksekutif merupakan pihak yang melaksanakan segala fungsi pemerintah daerah dan kontak langsung dengan masyarakat dalam waktu sangat lama. Eksekutif mempunyai pengetahuan luas tentang birokrasi dan administrasi serta peraturan perundang-undangan sebagai dasar dari keseluruhan aspek pemerintahan. Oleh sebab itu, anggaran yang digunakan untuk pelayanan publik diusulkan agar dialokasikan dengan didasarkan pada asumsi-asumsi sehingga memudahkan eksekutif memberikan pelayanan dengan baik. Eksekutif akan mempunyai kecondongan mengusulkan anggaran belanja yang lebih besar dari yang aktual terjadi saat ini (asas maksimal). Sebaliknya untuk anggaran pendapatan, eksekutif condong mengusulkan target yang lebih rendah (asas minimal) supaya ketika direalisasikan, target bisa lebih mudah dicapai. Usulan anggaran yang mengandung slack seperti ini merupakan gambaran adanya asimetri informasi antara

eksekutif dan legislatif. Slack tersebut terjadi karena pihak eksekutif berkeinginan memperoleh posisi yang relatif aman dan nyaman dalam melaksanakan tugas dan fungsinya (Halim, 2009).

c. Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah

Dikutip dari Halim dan Abdullah (2002), Paul Hersey dan Kenneth Blanchard menyatakan bahwa hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan kemandirian daerah, terutama pelaksanaan undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yaitu sebagai berikut :

1. Pola hubungan instruktif, yaitu pemerintah pusat berperan lebih mendominasi daripada pemerintah daerah (daerah tidak dapat melakukan kemandirian daerah dalam hal keuangan).
2. Pola hubungan konsultatif, adalah pemerintah pusat telah mulai mengurangi dalam hal mencampuri urusan pemerintahan daerah dan lebih banyak memberikan masukan karena daerah dianggap sedikit lebih mampu menjalankan otonomi daerah.
3. Pola hubungan partisipatif, adalah pemerintah pusat semakin mengurangi peranannya karena tingkat kemandirian daerah otonom bersangkutan mendekati mampu dalam menjalankan urusan otonomi. Peran pemberian masukan berganti kepada keikutsertaan pemerintah pusat.
4. Pola hubungan delegatif, adalah pemerintah pusat sudah tidak lagi mencampuri urusan pemerintahan karena daerah sudah

benar-benar mampu dan mandiri dalam menjalankan urusan otonomi daerah. Pemerintah pusat siap dan dengan keyakinan penuh menginstruksikan kemandirian keuangan kepada pemerintah daerah.

Perubahan dalam bentuk hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan implikasinya terhadap pengelolaan keuangan daerah telah melahirkan berbagai persepsi. Separuh pihak sangsi akan kemampuan daerah, baik dari persiapan sumberdaya manusia maupun alat perlengkapan yang mendukungnya, sedangkan lainnya menganggap bahwasanya saat pemerintah daerah dapat memperlihatkan keahliannya dalam melayani publik dengan lebih prima dibandingkan sebelumnya. Hal lainnya yaitu adanya transparansi informasi yang makin luas sehingga kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah bisa diperhatikan oleh masyarakat, terutama melalui peran media masa dan LSM (Halim, 2009).

Pemerintah pusat pada dasarnya mengemban 3 (tiga) fungsi utama yaitu fungsi distribusi, fungsi stabilisasi, dan fungsi alokasi. Fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi pada umumnya lebih efektif dan tepat dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, sedangkan fungsi alokasi oleh Pemerintah Daerah yang lebih memahami keperluan, kondisi, dan keadaan masyarakat setempat. Pembagian ketiga fungsi tersebut sangat penting sebagai pondasi dalam menentukan dasar-dasar

perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Warsito, 2008).

Dalam kaitannya dengan pemerintah daerah, Undang–Undang No. 17 tahun 2003 memperjelas adanya kewajiban pemerintah pusat dalam menentukan dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Selain itu, undang-undang ini mengatur jugamengenai penerimaan pinjaman luar negeri pemerintah. Pelaksanaan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah bertujuan untuk mengatasi masalah kesenjangan Pemerintah Pusat dan Daerah (*vertical imbalances*) serta kesenjangan antar daerah (*horisontal imbalances*).

2. Teori Pilihan Rasional

Teori Pilihan Rasional dalam sosiologi dipopulerkan oleh Coleman. Teori tersebut terkenal pada waktu Coleman membuat jurnal *Rationality and Society* pada tahun 1989 yang bertujuan untuk menyebarkan pemikiran yang berasal dari perspektif pilihan rasional. Coleman menganggap bahwa sosiologi harus mengarahkan perhatian pada sistem sosial, namun fenomena makro itu harus diterangkan oleh faktor-faktor internal kepada mereka secara prototipikal individual. Dia menyukai bekerja ditingkat ini sebab beberapa alasan, termasuk fakta bahwa data biasanya dikumpulkan pada tingkat individu dan kemudian dikelompokkan untuk menghasilkan tingkat sistem itu. Diantara alasan-alasan lain untuk menunjang fokus pada tingkat individu adalah bahwa ini adalah tempat dimana “intervensi” biasa

dilaksanakan guna mewujudkan perubahan sosial. Sebagaimana hendak kita saksikan, pusat dari perspektif Coleman adalah gagasan bahwa teori sosial tidak hanya merupakan latihan akademis tetapi harus mempengaruhi dunia sosial melalui “intervensi” semacam itu.(Trius, 2017)

Sebagai pakar teori pilihan rasional, Coleman mengawali dengan individu dan gagasan bahwa semua hak dan sumber daya ada pada tingkat ini. Kepentingan individu menentukan jalannya peristiwa. Akan tetapi hal ini tidak benar, terutama dalam masyarakat modern, dimana “sebagian besar hak-hak dan sumber daya, dan oleh karena itu kedaulatan, mungkin berada di aktor korporasi.” (Coleman, 1990:531 dalam Trius, 2017)

Teori Pilihan Rasional merupakan teori ekonomi neo klasik yang diterapkan pada sektor publik yang berusaha menjembatani antara ekonomi makro dan politik dengan melihat pada perbuatan warga, politisi, dan pelayan publik sebagai analogi terhadap kepentingan pribadi dan konsumen (Buchanan, 1962 dalam Kurniawan 2017). Menurut Buchanan dan Tullock dalam Kurniawan (2017) disebutkan bahwasanya ada 2 anggapan kunci teori pilihan rasional, yaitu : Pertama, Individu yang rata-rata lebih tertarik untuk memaksimalkan kegunaan. Hal ini mengandung maksud bahwa individu lebih cenderung memilih pada pilihan yang bisa memaksimumkan keuntungan dan meminimumkankan biaya. Kedua,

Hanya individu yang membuat keputusan, bukan gabungan. Hal ini dikenal sebagai metodologis individualisme dan beranggapan bahwa keputusan gabungan merupakan gregasi dari pilihan individu.

Dikutip dari Verawaty, Citra Indah Merina, dan Mela Sari (2013) dijelaskan bahwasanya teori pilihan rasional yaitu sebuah konsep yang menjelaskan bagaimana menentukan tindakan yang bisa memaksimalkan kegunaan atau memuaskan kemauan dan kepentingan mereka. Teori pilihan rasional dapat didefinisikan pula sebagai suatu tindakan bagaimana mendapatkan keuntungan yang maksimal dengan biaya yang minimal. Walaupun teori ini bersumber dari ilmu ekonomi, akan tetapi dalam perkembangannya teori ini berguna dalam menjelaskan masalah yang terjadi dalam beragam disiplin ilmu termasuk didalamnya bagaimana mengungkapkan sebuah pilihan tindakan yang dilaksanakan pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan publik.

Apabila dikaitkan dengan pengalokasian belanja modal maka pemerintah daerah mempunyai 2 (dua) pilihan tindakan yang harus dilakukan dalam mengalokasikan belanja modal. Yang pertama (1) : Pemerintah daerah mempunyai pilihan untuk memperbesar alokasi belanja modal demi memberikan pelayanan publik yang baik, atau pilihan kedua (2) : Pemerintah daerah lebih mengutamakan pembelanjaan anggaran untuk sektor lainnnya.

3. Anggaran Daerah Berbasis Kinerja

Anggaran adalah pernyataan mengenai perkiraan kinerja yang ingin diraih selama kurun waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran moneter, sedangkan penganggaran merupakan proses atau cara untuk menyiapkan suatu anggaran (Dikutip dari Mardiasmo, 2002). Penganggaran berbasis kinerja adalah metode penganggaran bagi manajemen untuk menghubungkan setiap pendanaan yang diterapkan dalam kegiatan-kegiatan dengan *output* dan *outcome* yang diinginkan termasuk efisiensi dalam pencapaian *outcome* dari *output* tersebut. Penyusunan anggaran berbasis kinerja sangat dibutuhkan dalam menyusun APBD karena dapat digunakan sebagai tolak ukur atau penentu keberhasilan dalam mencapai sasaran dan tujuan dari suatu organisasi pemerintahan daerah sebagaimana yang tertera dalam visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan yaitu untuk memberikan pelayanan dan kesejahteraan bagi rakyat.

Anggaran daerah adalah alat yang dapat menjamin terwujudnya kedisiplinan dalam mengambil keputusan berkaitan dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah (Nisa, 2014). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, penyusunan anggaran daerah atau yang dikenal dengan nama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) digunakan pendekatan anggaran berbasis kinerja. Pengertian Anggaran Daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menurut Mardiasmo (2002:9) dalam bukunya

Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah yaitu rancangan kerja pemerintah daerah yang dituangkan dalam bentuk moneter dalam satu tahun anggaran. Sedangkan menurut Mamesah (1995:20) APBD adalah rencana operasional keuangan pemerintah daerah, dimana di satu sisi melukiskan perkiraan setinggi-tingginya untuk mendanai kegiatan-kegiatan proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran tertentu, dan di sisi lain melukiskan perkiran penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran dimaksud.

Mekanisme penganggaran yang baik diawali dari merencanakan anggaran dan penyesuaiannya terhadap struktur APBD adalah proses yang wajib diperhatikan dalam menyusun anggaran serta dibutuhkan kerja sama yang baik antara pihak legislatif dan birokrasi. Anggaran yang dibuat dengan pendekatan kinerja lebih mengutamakan pada perolehan hasil dengan tidak mengesampingkan prinsip-prinsip anggaran yaitu transparansi dan akuntabilitas anggaran, disiplin anggaran, keadilan anggaran, efisiensi dan efektivitas anggaran.

Anggaran adalah alat kebijakan yang pokok bagi pemerintah daerah dan mempunyai kedudukan sentral dalam usaha mengembangkan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. Anggaran mempunyai fungsi sebagai penentu besarnya pendapatan dan pengeluaran, membantu dalam mengambil keputusan dan merencanakan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa depan,

sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk penilaian kinerja, alat untuk memberikan dorongan kepada para pegawai, dan juga sebagai alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja (Mardiasmo, 2002:9)

Menurut Mardiasmo (2002: 65), anggaran sektor publik dibagi menjadi 2 yaitu:

a. Anggaran Operasional

Anggaran Operasional berguna dalam perencanaan kebutuhan sehari-hari dalam melaksanakan pemerintahan. Pengeluaran yang termasuk dalam kriteria ini yaitu belanja administrasi umum, belanja operasi, dan pemeliharaan.

b. Anggaran Modal

Anggaran Modal menggambarkan rancangan jangka panjang dan pembelian aset tetap misalnya gedung, peralatan kendaraan, perabot, dan sebagainya. Belanja modal merupakan pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu periode akuntansi dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah, dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaan.

4. Pelayanan Publik

Pelayanan merupakan suatu bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah baik di Pusat, Daerah, BUMN, dan

BUMD dalam bentuk barang maupun jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (KEPMENPAN No. 81 Tahun 1993). Sedangkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003, dasar pelayanan publik yaitu memberikan layanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Pelayanan publik bisa juga didefinisikan sebagai bentuk melayani keperluan masyarakat yang memiliki kepentingan terhadap organisasi tersebut berdasarkan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

Menurut Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2003, mengenai pelayanan yaitu :

- a) Pelayanan Publik merupakan semua kegiatan melayani yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai usaha untuk memenuhi keperluan penerima pelayanan ataupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Penyelenggara Pelayanan Publik yaitu Instansi Pemerintah.
- c) Instansi Pemerintah merupakan sebutan gabungan untuk satuan kerja/ satuan organisasi Kementerian, Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara, dan Instansi Pemerintah lainnya, baik Pusat maupun Daerah termasuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah.

- d) Unit Penyelenggara pelayanan publik merupakan unit kerja pada Instansi Pemerintah yang secara langsung melayani para penerima pelayanan publik.
- e) Pemberi pelayanan publik yaitu pejabat/pegawai instansi pemerintah yang menjalankan tugas dan fungsi pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- f) Penerima pelayanan publik yaitu orang, masyarakat, instansi pemerintah, dan badan hukum.
- g) Biaya pelayanan publik yaitu semua biaya (dengan nama atau sebutan apapun) sebagai imbal jasa atas pemberian pelayanan publik yang besaran dan tata cara pembayaran ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h) Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan tingkat kepuasan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan yang diperoleh dari penyelenggara atau pemberi pelayanan sesuai keinginan dan kebutuhan masyarakat.

Tujuan layanan publik menurut L.P. Sinambela dalam bukunya yang berjudul “Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi” (2006) diungkapkan bahwa secara teoritis tujuan dasar dari pelayanan adalah untuk memuaskan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan tersebut dituntut adanya kualitas pelayanan prima yang terlihat dari :

- 1) Transparansi, yaitu keterbukaan dalam melayani, mudah dan dapat diperoleh bagi semua pihak yang memerlukan, tersedia lengkap dan mudah dimengerti;
- 2) Akuntabilitas, adalah memberikan layanan yang bisa dimintai pertanggung jawaban berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Kondisional, adalah memberikan layanan berdasarkan keadaan dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap memegang prinsip efektivitas dan efisiensi;
- 4) Partisipatif, adalah memberikan layanan yang bisa memotivasi keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan keinginan masyarakat, kebutuhan, serta harapan masyarakat;
- 5) Kesamaan hak, adalah memberikan layanan dengan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, status sosial, dan sebagainya;
- 6) Keseimbangan hak dan kewajiban, adalah memberikan layanan dengan menerapkan aspek keadilan bagi pemberi maupun penerima layanan publik.

5. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran dalam memperoleh aktiva tetap dan aktiva lainnya yang memberi manfaat melebihi satu tahun anggaran. Menurut Mardiasmo, 2009 pengertian

belanja modal adalah belanja pemerintah daerah yang manfaatnya lebih dari satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Kelompok belanja ini mencakup jenis belanja baik untuk bagian belanja aparatur daerah maupun pelayanan publik. Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 53 ayat (1) disebutkan bahwa : “Belanja Modal sebagaimana tertera dalam pasal 50 huruf c difungsikan guna membiayai pengeluaran untuk pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang memiliki nilai manfaat lebih dari satu tahun untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, misalnya dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, serta aset tetap lainnya.”

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), definisi belanja modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu tahun anggaran, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Dalam SAP, belanja modal dibagi menjadi 5 (lima) kriteria, yaitu :

a) Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah yaitu biaya yang diperlukandalam

pengadaan/pembelian/pembebasan, penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya yang masih terkait dengan perolehan hak atas tanah dan sampai barang tersebut siap untuk dipakai.

b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin yaitu biaya yang diperlukan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin, serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari satu tahun, dan sampai barang tersebut siap untuk dipakai.

c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan adalah biaya yang diperlukan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai barang tersebut siap untuk dipakai.

d) Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan yaitu biaya yang diperlukan untuk pengadaan/penambahan/ penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan jalan, irigasi, dan jaringan yang menambah kapasitas sampai barang tersebut siap untuk

dipakai.

e) Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja modal fisik lainnya yaitu biaya yang diperlukan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan, pembangunan/pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dimasukkan dalam kategori belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan, irigasi, dan jaringan. Termasuk dalam kategori ini yaitu belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

Adapun kriteria belanja modal yaitu :

- a. Pengeluaran dimaksud berakibat adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang pada akhirnya menyebabkan aset pemerintah bertambah;
- b. Perolehan aset tetap tersebut dimaksudkan tidak untuk dijual.

Batasan minimal kapitalisasi aset tetap (*capitalization thresholds*) ditetapkan sebagai berikut :

No.	ASET TETAP	NILAI KAPITALISASI
1	Tanah	Tidak dibatasi
2	Peralatan dan Mesin	Rp 400.000,00
3	Gedung dan Bangunan	Rp 5.000.000,00
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
	-Jalan	Rp 10.000.000,00
	-Irigasi	Rp 5.000.000,00
	-Jaringan	Rp 400.000,00
5	Aset Tetap Lainnya	Tidak dibatasi
6	Konstruksi dalam pengerjaan	Tidak dibatasi

6. Rasio Keuangan Daerah

Pemerintah daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan, dan memberikan layanan kepada publik harus membuat laporan pertanggungjawaban keuangan daerah sebagai acuan untuk menilai kinerja keuangannya. Salah satu alat untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya yaitu dengan melaksanakan analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Halim,2007:231) dengan harapandapat terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang terbuka, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel. Analisis rasio keuangan pada APBD dilaksanakan dengan membuat perbandingan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya supaya dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu, juga bisa dilaksanakan dengan cara membuat perbandingan rasio

keuangan yang dimiliki pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun potensi daerahnya relatif sama untuk melihat bagaimana posisi rasio keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya.

Beberapa rasio yang dapat digunakan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD diantaranya rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas keuangan daerah dan rasio efisiensi keuangan daerah, serta *debt service coverage ratio*. (Halim, 2006: 231 dalam Nisa, 2014).

a. Rasio Kemandirian Daerah

Kemandirian keuangan daerah digambarkan dengan membandingkan besaran antara pendapatan asli daerah dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lainnya seperti bantuan pemerintah pusat maupun dari pinjaman. Rasio Kemandirian Daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam mendanai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan memberikan layanan kepada rakyat yang sudah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatannya yang diperlukan daerah, yang dapat diformulasikan sebagai berikut : (Halim, 2006:128 dalam Nisa, 2014)

$$\text{Kemandirian daerah} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

Rasio Kemandirian Daerah menunjukkan tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana luar. Semakin tinggi rasio ini berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak luar semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Rasio Kemandirian Daerah juga menunjukkan tingkat peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi (Halim, 2006 : 233 dalam Nisa, 2014). Berikut ini adalah kriteria kemandirian dan kemampuan keuangan daerah.

Tabel 2.1
Tingkat Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian (%)	Kemampuan Keuangan	Pola Hubungan
0 % - 25 %	Rendah sekali	Instruktif
25 % - 50 %	Rendah	Konsultatif
50 % - 75 %	Sedang	Partisipatif
75 % - 100 %	Tinggi	Delegatif

Sumber : Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996

1. Pola Hubungan Instruktif, adalah pemerintah pusat dalam berperan lebih mendominasi dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak dapat menjalankan otonomi daerah).
2. Pola Hubungan Konsultatif, adalah pemerintah pusat telah mulai mengurangi mencampuri urusan pemerintahan karena daerah dipandang sedikit lebih mampu menjalankan kemandirian daerah.

3. Pola Hubungan Partisipatif, adalah pemerintah pusat sudah mulai berkurang dalam mencampuri urusan pemerintahan, mengingat daerah tersebut tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan kemandirian daerah.
4. Pola Hubungan Delegatif, adalah pemerintah pusat sudah tidak mencampuri lagi urusan pemerintahan disebabkan daerah tersebut sudah benar-benar mampu dan mandiri dalam menjalankan kemandirian daerah.

Semakin tinggi rasio ini menunjukkan bahwa semakin rendah daerah tersebut bergantung kepada bantuan pihak luar dan demikian pula sebaliknya. Semakin tinggi rasio ini juga berarti menggambarkan semakin tingginya peran serta masyarakat dalam membayar pajak, dan retribusi daerah yang merupakan sumber utama pendapatan asli daerah.

b. Rasio Efektivitas

Efektivitas pada hakikatnya berkaitan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas adalah hubungan antara keluaran dengan tujuan yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Rasio Efektivitas menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Halim, 2006 : 234

dalam Nisa, 2014). Rumus yang dipakai dalam mengukur rasio efektivitas adalah:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}}$$

Kemampuan daerah dalam melaksanakan tugas dikatakan efektif jika rasio ini mencapai paling sedikitnya 100%. Akan tetapi, semakin tinggi rasio ini, maka kemampuan daerah itu makin tinggi pula (Indratno, 2016). Untuk menghasilkan ukuran yang lebih baik, rasio ini perlu dipersandingkan dengan rasio efisiensi yang diraih oleh pemerintah.

Tabel 2.2
Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan

Persentase Kinerja Keuangan (%)	Kriteria
> 100	Sangat efektif
> 90 - 100	Efektif
> 80 - 90	Cukup efektif
> 60 - 80	Kurang efektif
≤ 60	Tidak efektif

Sumber : Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996

c. Rasio Efisiensi

Efisiensi adalah perolehan pengeluaran yang maksimal dengan penggunaan penerimaan yang minimal guna memperoleh pengeluaran tertentu yang dihubungkan dengan target yang telah ditetapkan. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan

antara pengeluaran yang diperoleh terhadap penerimaan yang digunakan. Proses kegiatan operasional bisa dikategorikan efisien jika menghasilkan pekerjaan dengan pemakaian sumber daya dan biaya yang serendah-rendahnya. Rasio efisiensi merupakan rasio yang membandingkan antara realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah. Semakin rendah rasio ini, maka semakin efisien, dan sebaliknya. Dalam hal

ini dengan anggapan bahwa

pengeluaran yang direalisasikan sama dengan rencana dan kegunaannya. Suatu kegiatan dikategorikan efisien apabila hasil kerja itu diperoleh dengan biaya yang sekecil mungkin. Untuk itu, pemerintah daerah harus memperkirakan secara tepat besaran pengeluaran guna membelanjakan seluruh penerimaan yang diperolehnya agar bisa diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak. Hal ini harus dilaksanakan sebab meskipun pemerintah daerah berhasil merealisasikan penerimaan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan itu kurang berarti jika ternyata dana yang digunakan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatannya itu lebih besar dari pada realisasi pendapatan yang diterima.

Rumus yang dipakai dalam mengukur rasio ini adalah (Nisa, 2014):

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Realisasi Penerimaan}}$$

Realisasi Penerimaan

Tabel 2.3
Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
100 % keatas	Tidak efisien
90 % - 100 %	Kurang efisien
80 % - 90 %	Cukup efisien
60 % - 80 %	Efisien
Kurang dari 60 %	Sangat efisien

Sumber : Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996

B. Studi Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini adalah :

Tabel 2.4
Studi Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian
----------------------	-------------------------	----------------------------	----------------------	-------------------------

Ardhini dan Hj. Rr. Sri Handayani (2011)	Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal untuk Pelayanan Publik dalam Perspektif Teori Keagenan (Studi pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah)	X_1 : Rasio kemandirian daerah X_2 : Rasio efektivitas keuangan daerah X_3 : Rasio efisiensi keuangan daerah X_4 : Sisa Lebih Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) Y : Belanja Modal	Analisis regresi linier berganda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rasio kemandirian daerah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap alokasi belanja modal untuk pelayanan publik. 2. Rasio efektivitas keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal untuk pelayanan publik. Lanjutan.... 3. Ra: Dilanjutkan.... ket - berpengaruh negatif namun signifikan terhadap alokasi belanja modal untuk pelayanan publik. 4. Sisa Lebih Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap realisasi belanja modal untuk pelayanan publik.
--	---	---	----------------------------------	---

Vella Kurniasih Fitri (2013)	Pengaruh Rasio Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Alokasi Belanja Modal pada Kabupaten / Kota di Provinsi Riau Tahun 2009-2012	<p>X_1: Rasio kemandirian keuangan daerah</p> <p>X_2: Rasio efektivitas keuangan daerah</p> <p>X_3: Rasio efisiensi keuangan daerah</p> <p>X_4: Pendapatan Asli Daerah (PAD)</p> <p>X_5: Dana Alokasi Umum (DAU)</p> <p>Y: Belanja Modal</p>	Analisis regresi linier berganda	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal, sedangkan 4 variabel lainnya yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas keuangan daerah, rasio efisiensi keuangan daerah, dan dana alokasi umum memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap alokasi belanja modal.</p> <p>Lanjutan....</p>
Verawaty, Citra Indah Merina, dan Mela Sari (2013)	Determinan Pengalokasian Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating pada Pemerintah Provinsi di Indonesia	<p>X_1: Rasio kemandirian keuangan daerah</p> <p>X_2: Rasio efektivitas keuangan daerah</p> <p>X_3: Rasio efisiensi keuangan daerah</p> <p>X_4: Pendapatan Asli Daerah (PAD)</p>	<i>Moderated Regression Analysis</i> (MRA)	<p>Dilanjutkan....</p> <p>1. Rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh signifikan negatif terhadap pengalokasian belanja modal.</p> <p>2. Rasio efektivitas keuangan daerah, rasio efisiensi keuangan daerah, DAU, DAK, dan pertumbuhan ekonomi tidak</p>

		<p>X₅: Dana Bagi Hasil (DBH)</p> <p>X₆: Dana Alokasi Umum (DAU)</p> <p>X₇: Dana Alokasi Khusus (DAK)</p> <p>Y: Belanja Modal Variabel</p> <p>Moderating : Pertumbuhan ekonomi</p>		<p>berpengaruh signifikan positif terhadap pengalokasian belanja modal,</p> <p>3. PAD dan DBH memiliki hubungan signifikan positif terhadap pengalokasian belanja modal, akan tetapi hasil uji hipotesis dengan variabel moderating pertumbuhan ekonomi menyatakan bahwa PAD dan DAU tidak memiliki pengaruh signifikan positif terhadap pengalokasian belanja modal.</p> <p>Lanjutan....</p>
Riko Novianto dan Rafiudin Hanafiah (2015)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/ Kota Di Provinsi Kalimantan Barat	<p>X₁: Pendapatan Asli Daerah (PAD)</p> <p>X₂: Dana Alokasi Umum (DAU)</p> <p>X₃: Dana Alokasi Khusus (DAK)</p> <p>X₄: Dana Bagi Hasil (DBH)</p> <p>X₅: Tingkat</p>	Regresi linier berganda	<p>Dilanjutkan... u</p> <p>1. Li PAD, DAU, DAK, DBH, dan Tingkat Efektivitas Keuangan Daerah tahun sebelumnya secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal;</p> <p>2. Sedangkan variabel Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah tahun sebelumnya secara parsial tidak berpengaruh terhadap</p>

		kemandirian keuangan daerah X ₆ : Tingkat efektivitas keuangan daerah Y: Belanja Modal		belanja modal.
Julius Tamawiy, Jullie J Sondakh, dan Jessy D.L Warongan (2016)	Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Belanja Modal untuk Pelayanan Publik (Studi pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Utara)	X ₁ : Pertumbuhan PAD X ₂ : Desentralisasi Fiskal X ₃ : Efektivitas keuangan daerah X ₄ : Efisiensi keuangan daerah Y: Belanja Modal untuk Pelayanan Publik	Analisis regresi linier berganda	1. Pertumbuhan PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal untuk pelayanan publik. 2. Desentralisasi fiskal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap belanja modal untuk pelayanan publik. 3. Efektivitas keuangan daerah dan efisiensi keuangan daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap belanja modal untuk pelayanan publik. Lanjutan....
Novianto Indratno (2016)	Pengaruh Rasio Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah	X ₁ : Rasio kemandirian daerah X ₂ : Rasio efektivitas keuangan daerah X ₃ : Rasio efisiensi keuangan daerah X ₄ : Rasio ketergantungan daerah Y: Belanja Modal	Analisis regresi linier berganda	1. Rasio kemandirian daerah dan rasio efisiensi berpengaruh terhadap alokasi belanja modal 2. Rasio efektivitas dan rasio ketergantungan daerah tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Dilanjutkan....

--	--	--	--	--

Sumber : Penelitian terdahulu

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas, dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Secara umum perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu pada lokasi penelitian dan tahun penelitian. Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang dan tahun yang akan diambil untuk penelitian adalah tahun 2013-2017. Pada penelitian ini hanya menggunakan variabel rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas keuangan daerah, dan rasio efisiensi keuangan daerah. Sedangkan persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada variabel dependen (Y) sama yaitu belanja modal. Pada jenis data penelitian ini dengan penelitian terdahulu sama yaitu menggunakan jenis data kuantitatif, sumber data yang dipakai juga sama yaitu memakai data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

C. Kerangka Pemikiran

1. Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah Terhadap Belanja Modal untuk Pelayanan Publik pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang.

Semakin tinggi rasio kemandirian daerah berarti makin kecil daerah itu bergantung kepada bantuan pihak luar, begitu juga sebaliknya. Rasio

ini juga menunjukkan peran serta masyarakat dalam membangun daerahnya. Semakin tinggi rasio kemandirian daerah maka semakin tinggi pula peran serta masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan sumber dari pendapatan asli daerah (Ardhini dan Handayani,2011).

Hasil penelitian oleh (Verawaty,Merina,dkk,2013) membuktikan bahwa rasio kemandirian mempunyai pengaruh signifikan negatif terhadap alokasi belanja modal. Hal tersebut bertentangan dengan penelitian (Fitri,2013) yang membuktikan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap belanja modal.

2. Pengaruh Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal untuk Pelayanan Publik pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang

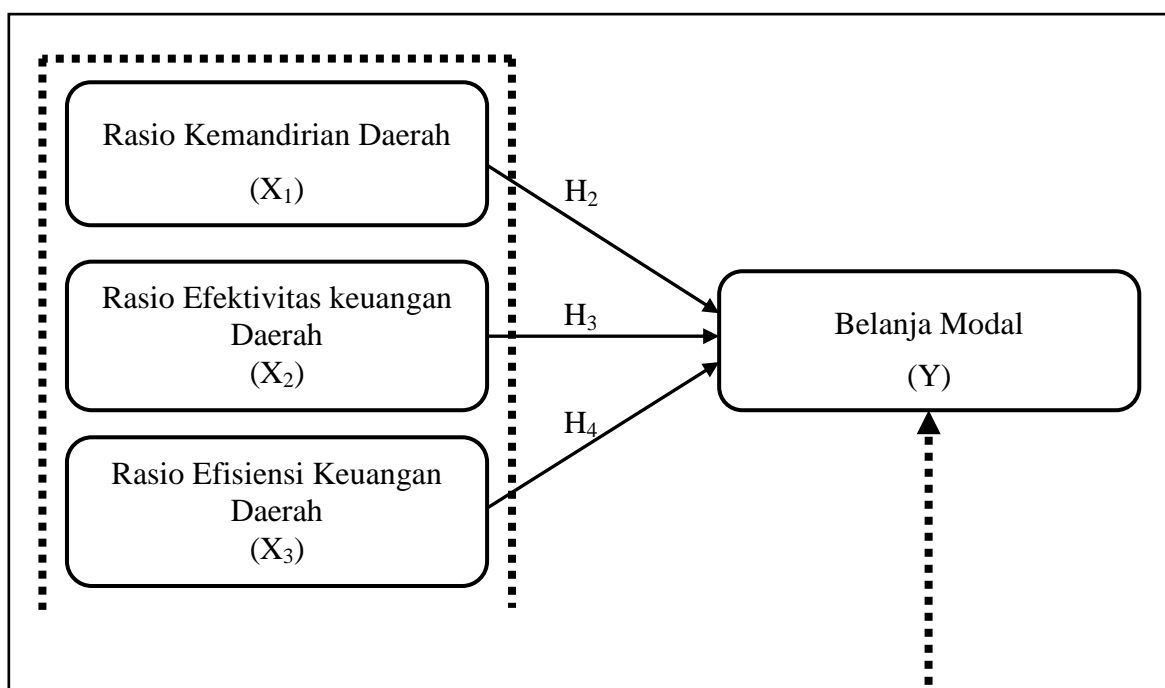
Semakin tinggi rasio efektivitas maka semakin tinggi peran serta masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan sumber dari pendapatan asli daerah (Ardhini dan Handayani,2011). Hasil penelitian oleh (Indratno,2016) menunjukkan bahwa rasio efektivitas tidak memiliki pengaruh terhadap alokasi belanja modal. Hal tersebut bertentangan dengan penelitian (Novianto dan Hanafiah,2015) yang membuktikan bahwa rasio efektivitas mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.

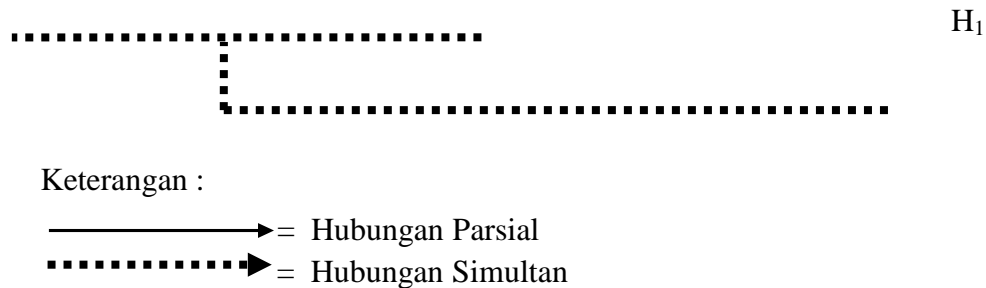
3. Pengaruh Rasio Efisiensi Keuangan Daerah terhadap Belanja Modal untuk Pelayanan Publik pada Pemerintah Daerah

Kabupaten Pemalang.

Rasio efisiensi merupakan rasio yang menunjukkan perbandingan antara realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah. Semakin kecil rasio efisiensi, maka semakin efisien dan juga sebaliknya. Dalam hal ini dengan beranggapan bahwa pengeluaran yang direalisasikan sama dengan kegunaannya dan sesuai rencana yang ditetapkan. Mengacu pada sektor pelayanan publik merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan dengan baik dari pengorbanan serendah-rendahnya guna mencapai hasil yang setinggi-tingginya. Hasil penelitian oleh (Fitri,2013) menunjukkan bahwa rasio efisiensi keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal. Hal tersebut konsisten dengan hasil penelitian oleh (Verawaty,Merina,dkk,2013) yang membuktikan juga bahwa rasio efisiensi keuangan daerah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Berdasarkan tinjauan penelitian terdahulu dan kajian teoritis serta rumusan masalah yang telah diuraikan maka secara sistematis kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut:





Gambar2.1
Kerangka Pemikiran

D. Perumusan Hipotesis

Hipotesis yaitu dugaan sementara terhadap masalah didalam penelitian, hingga adanya bukti data-data yang terkumpul. Hipotesis dinyatakan dengan kalimat pernyataan dan bukan kalimat pertanyaan (Arikunto, 2006 : 64). Berdasarkan teoristik yang telah diuraikan diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁: Rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas keuangan daerah, dan rasio efisiensi keuangan daerah berpengaruh secara simultan terhadap belanja modal untuk pelayanan publik pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2013-2017.

H₂: Rasio kemandirian daerah berpengaruh secara parsial terhadap belanja modal untuk pelayanan publik pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2013-2017.

H₃: Rasio efektivitas keuangan daerah berpengaruh secara parsial terhadap belanja modal untuk pelayanan publik pada Pemerintah Daerah

Kabupaten Pemalang tahun 2013-2017.

H₄: Rasio efisiensi keuangan daerah berpengaruh secara parsial terhadap belanja modal untuk pelayanan publik pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2013-2017.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pemilihan Metode

Suatu penelitian perlu dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah keilmiah agar dapat dipertanggungjawabkan oleh peneliti. Hal ini akan terwujud apabila didukung dengan ketepatan alat untuk meneliti sebuah masalah. Alat tersebut adalah metode penelitian. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kuantitatif, adalah hasil penelitian yang pada akhirnya diolah dan dianalisa kemudian menyimpulkannya, yang berarti bahwa penelitian yang dilaksanakan merupakan penelitian yang mengutamakan analisisnya pada data-data *numeric* (angka). Dengan memakai metode tersebut akan diketahui hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti, sehingga memperoleh kesimpulan yang akan mempertegas gambaran mengenai objek yang diteliti.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang, Jalan Surohadikusumo No.1 Kelurahan Kebondalem, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah 52312.

C. Jenis dan Sumber Data

Data yang dipakai pada penelitian ini berupadata sekunder. Data sekunder yaitu data penelitian yang didapat secara tidak langsung melalui media perantara (dihasilkan satu pihak) atau dipakai oleh lembaga lainnya yang bukan merupakan pengolahnya, tetapi dapat dimanfaatkan dalam suatu penelitian tertentu (Ruslan, 2003:138 dalam Nisa:2014).Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang selama 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2013-2017 yang telah dipublikasikan melalui website <https://www.pemalangkab.go.id>.

D. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel

1. Definisi Konseptual

a. Belanja Modal.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), definisi belanja modal yaitu pengeluaran yang dilaksanakan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu tahun anggaran, termasuk didalamnya yaitu pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

b. Kemandirian Daerah

Kemandirian daerah merupakan kemampuan pendapatan daerah dalam membiayai pengeluaran pemerintah daerah. Sehingga ketergantungan kepada pemerintah pusat memiliki proporsi yang lebih kecil, dan pendapatan asli daerah harus menjadi bagian yang terbesar dalam memobilisasi penyelenggaraan pemerintahan (Nisa, 2014).

c. Efektivitas Keuangan Daerah

Efektivitas keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditetapkan (Nisa, 2014).

d. Efisiensi Keuangan Daerah

Efisiensi keuangan daerah menggambarkan perbandingan antara realisasi output dan input. Semakin kecil rasio ini, semakin efisien, dan sebaliknya (Nisa, 2014).

2. Definisi Operasional

Operasional variabel merupakan operasionalisasi konsep supaya dapat diamati atau diukur melalui gejala-gejala yang ada. Definisi operasional variabel dalam penelitian ini dijelaskan dengan tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Definisi Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Skala
Belanja Modal (Y)	Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin + Belanja Gedung dan Bangunan + Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan + Belanja Aset Tetap Lainnya	Nominal
Rasio Kemandirian Daerah (X_1)	$\frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$	Rasio
Rasio Efektivitas Keuangan Daerah (X_2)	$\frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}}$	Rasio
Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (X_3)	$\frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Realisasi Penerimaan}}$	Rasio

Sumber : Data Olahan (2019)

E. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini berupa data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang bersumber pada benda-benda tertulis seperti dokumen (Arikunto, 2006 : 149). Metode dokumentasi ini dipakaiguna mendapatkan data berupa laporan keuangan, struktur organisasi, dan catatan-catatan lainnya di Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang.

F. Teknik Pengolahan Data

Teknik mengolah data pada penelitian ini menggunakan perhitungan komputerisasi dengan bantuan program SPSS versi 22, karena program ini mempunyai kemampuan analisis statistik yang cukup tinggi sehingga dalam pengoperasiannya lebih mudah untuk dipahami.

G. Analisis Data dan Uji Hipotesis

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Secara garis besar, pendekatan kuantitatif lebih mengutamakan pada tujuan untuk generalisasi, dengan

melaksanakan pengujian statistik dan steril dari pengaruh subjektif peneliti.

Alat analisis yang dipakai dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linier berganda (*multiple regression*). Setelah semua data terkumpul, maka selanjutnya dilakukan analisis data yang terdiri dari :

1. Uji Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif adalah metode statistik yang dipakai untuk memberikan gambaran data yang terkumpul menjadi sebuah informasi. Statistik deskriptif dalam penelitian ini dipakai untuk memberikan gambaran umum belanja modal untuk pelayanan publik pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang Jaya periode tahun 2013-2017.

2. Uji Asumsi Klasik

Suatu model regresi yang baik yaitu model regresi yang memenuhi asumsi klasik yaitu asumsi normalitas, multikolinieritas, autokorelasi dan heteroskedastisitas. Oleh sebab itu, perlu diadakan pengujian normalitas, multikolinieritas, autokorelasi dan heteroskedastisitas sebelum dilakukan pengujian hipotesis. Berikut penjelasan uji asumsi klasik yang akan dilakukan penelitian ini (Ghozali, 2005: 96).

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan guna mengetahui distribusi data dalam variabel yang dipakai dalam penelitian. Model regresi yang baik yaitu yang mempunyai distribusi normal atau mendekati normal (Ghozali, 2005). Analisis normalitas dengan menggunakan uji *Kolmogrov-Smirnov* (K-S) dilakukan dengan melihat hasil dari *asympt.Sig (2-tailed)*. Jika nilai *asympt.Sig (2-tailed)* < 0,05 berarti data tidak terdistribusi secara normal, akan tetapi jika *asympt.Sig (2-tailed)* > 0,05 berarti data terdistribusi secara normal.

b. Uji Multikolinieritas

Pengujian ini bertujuan guna menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Apabila variabel independen saling berkorelasi, artinya variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal merupakan variabel bebas dimana nilai korelasi antar variabel bebas yang sejenis nilainya = 0 (Ghozali, 2005: 105). Variabel yang menimbulkan multikolinieritas bisa dilihat dari nilai *tolerance* maupun *VIF* (*Variance Inflation Factor*). Model regresi yang bebas multikolinieritas mempunyai nilai $VIF \leq 10$ dan memiliki *angkatolerance* $\geq 0,1$ atau mendekati 1 (Ghozali, 2005: 114).

c. Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah korelasi antar anggota sampel yang diurutkan berdasarkan waktu. Autokorelasi disebabkan oleh observasi yang berurutan sepanjang waktu terkait dengan yang lain. Masalah tersebut disebabkan oleh residual tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Dengan kata lain masalah ini seringkali ditemukan apabila kita menggunakan data runtut waktu. Untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi digunakan uji *Durbin Watson (DW Test)*. Untuk mendeteksi terjadinya autokorelasi dalam penelitian ini digunakan uji *Durbin Watson (DW)* dengan ketentuan sebagai berikut :

- $0 < d < dL$ = Ho ditolak
- $dL \leq d \leq du$ = Daerah keraguan/tanpa keputusan
- $du \leq d \leq (4-du)$ = Ho diterima
- $(4-du) \leq d \leq (4-dL)$ = Daerah keraguan/tanpa keputusan
- $(4-dL) \leq d \leq 4$ = Ho ditolak

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dan *residual* satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik yaitu tidak terjadi heteroskedastisitas. Ada atau tidaknya problem heteroskedastisitas pada model regresi dapat diketahui dengan melihat ada atau tidaknya pola tertentu yang teratur pada grafik *Scatterplot* serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y.

3. Analisis Regresi Linier Berganda

Metode yang dipakai dalam penelitian ini yaitu metode analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linier berganda merupakan pengembangan dari regresi linier sederhana, yaitu sama-sama alat yang dapat dipakai untuk melakukan prediksi permintaan dimasa depan sesuai dengan data masa lalu atau guna memperoleh pengaruh satu atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. Analisis ini dipakai guna memperkirakan bagaimana keadaan naik turunnya variabel dependen jika dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dinaik turunkan nilainya. Pada penelitian ini dipakai guna memperoleh hubungan fungsi antara variabel dependen yaitu belanja modal terhadap variabel independen yaitu rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas keuangan daerah, dan rasio efisiensi keuangan daerah. Adapun rumus yang digunakan adalah :

$$\hat{Y} = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan :

\hat{Y} = Belanja Modal

a = Konstanta

b = Koefisien regresi linier

X_1 = Kemandirian daerah

X_2 = Efektivitas keuangan daerah

X_3 = Efisiensi keuangan daerah

e = Standar error

4. Pengujian Hipotesis

a. Pengujian Simultan (Uji F)

Uji simultan atau uji F merupakan alat uji hipotesis yang dipakai guna menguji variabel-variabel independen yang dipakai dalam penelitian secara keseluruhan. Apabila nilai signifikan kurang dari 0,05 maka berarti memiliki pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2005).

b. Pengujian Parsial (Uji t)

Pengujian ini dilaksanakan guna menentukan signifikan atau tidak signifikan masing-masing nilai koefisien regresi (b_1 , b_2 dan b_3) secara individual terhadap variabel terikat (Y).

Langkah pengujiannya :

1) Menentukan H_0 dan H_a :

$H_0 : b_1 = b_2 = \dots = b_k = 0$, artinya tidak memiliki pengaruh yang signifikan variabel bebas terhadap variabel terikat.

$H_a : b_1 \neq b_2 \neq \dots \neq b_k \neq 0$, artinya memiliki pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

2) Menentukan *Level of Significance* (α)

Menentukan level signifikansi yaitu sebesar 5 %

3) Kriteria pengujian

- Bila nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya variabel bebas secara pribadi tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

- Bila nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_a diterima dan H_o ditolak, artinya variabel bebas secara individual berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

c. Uji Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi dipakai guna menguji seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Koefisien Determinasi menggambarkan berapa besar persentase total variasi variabel bebas yang digambarkan oleh model, semakin besar Koefisien Determinasi semakin besar pengaruh model dalam menggambarkan variabel terikat. Nilai Koefisien Determinasi beradadiantara 0 sampai 1, jika Koefisien Determinasi bernilai 1 artinyaterdapat kecocokan sempurna, akan tetapi jika nilainya 0 artinya tidak ada hubungan diantara variabel dependendengan variabel independen.

$$KD = r^2 \times 100\%$$

Dimana :

KD : Besarnya Koefisien Determinasi

r : Koefisien Korelasi

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pemalang bertempat di Jl. Surohadikusumo No.1 Pemalang, merupakan unsur pelaksana penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan kegiatannya, BPKAD Kabupaten Pemalang berorientasi pada peningkatan pendapatan daerah, pengelolaan keuangan dan penataan administrasi aset daerah yang diharapkan dapat menggali seoptimal mungkin potensi-potensi sumber daya yang dimiliki daerah, supaya bisa mendanai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah, pelayanan prima, tepat, dan dapat dipertanggung jawabkan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan sehingga menunjang terwujudnya *good goverment* dan membantu memberikan layanan administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah kepada perangkat daerah di lingkungan Pemerintahan Daerah secara berdaya guna juga melaksanakan penataan inventarisasi aset daerah sebagai bentuk kekayaan daerah.

1. Visi dan Misi Kabupaten Pemalang

a. Visi :

”Terwujudnya masyarakat Pemalang yang berakhlak mulia, sehat sejahtera, berkesadaran hukum dan demokratis dalam kesatuan wilayah Kabupaten Pemalang yang **IKHLAS (Indah, Komunikatif, Hijau, Lancar, Aman dan Sehat)**”.

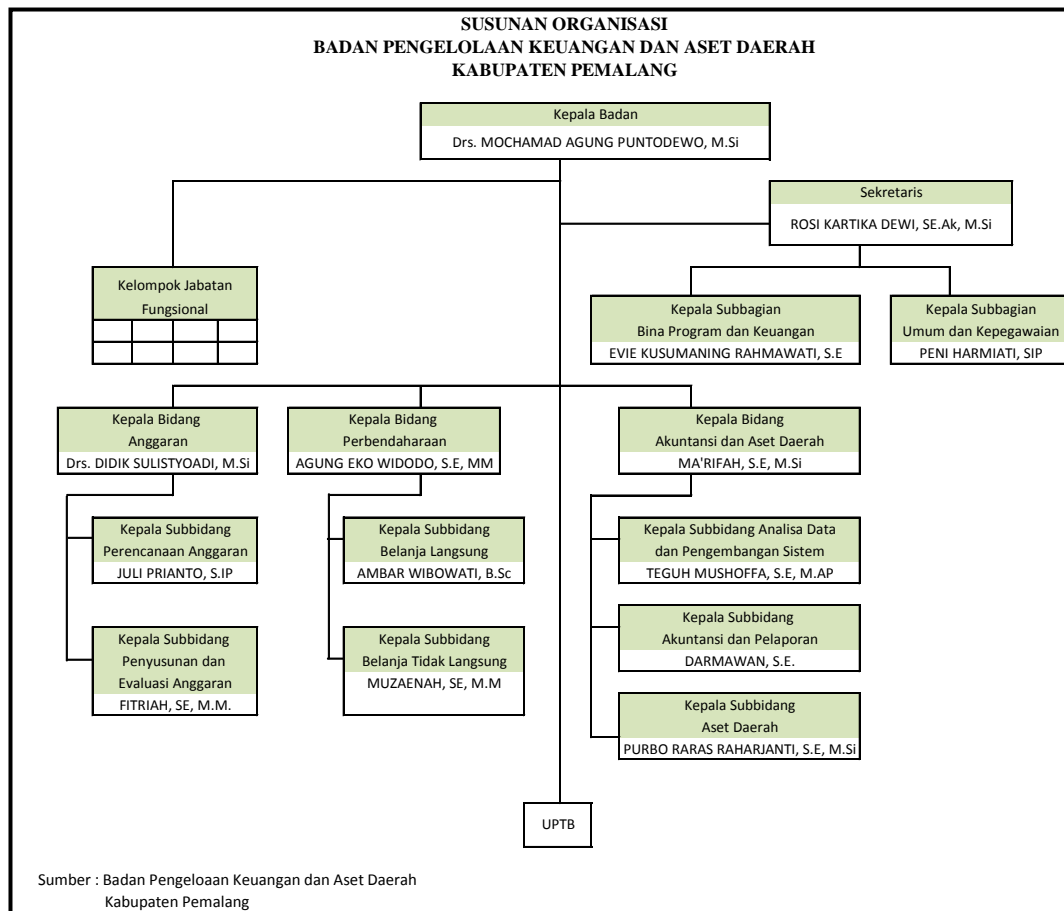
b. Misi :

- 1) Meningkatkan pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin;
- 2) Meningkatkan kualitas pendidikan dasar secara murah dan merata;
- 3) Meningkatkan sarana dan prasarana kebutuhan pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi;
- 4) Meningkatkan taraf hidup penduduk miskin;
- 5) Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam secara berkesinambungan;
- 6) Meningkatkan kinerja dan pelayanan aparat yang berkualitas, profesional dan berjiwa pelayanan prima;
- 7) Mengupayakan perwujudan kemandirian daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka pembangunan daerah yang bertumpu pada kemampuan dan potensi lokal;
- 8) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi daerah, terutama pengusaha kecil, menengah, dan koperasi;
- 9) Meningkatkan ketertiban dan keamanan serta pelaksanaan sistem hukum yang menjamin tegaknya pelaksanaan supremasi hukum;

- 10) Meningkatkan kualitas kehidupan beragama secara harmonis dalam kerangka saling menghormati dan semangat kekeluargaan.

2. Susunan Organisasi BPKAD Kabupaten Pemalang

- a. Kepala Badan ;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1. Subbagian Bina Program dan Keuangan;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Anggaran, terdiri dari :
 - 1. Subbidang Perencanaan Anggaran;
 - 2. Subbidang Penyusunan dan Evaluasi Anggaran.
- d. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari:
 - 1. Subbidang Belanja Langsung
 - 2. Subbidang Belanja Tidak Langsung.
- e. Bidang Akuntansi dan Aset Daerah, terdiri dari:
 - 1. Subbidang Analisa Data dan Pengembangan Sistem;
 - 2. Subbidang Akuntansi dan Pelaporan;
 - 3. Subbidang Aset Daerah.
- f. UPTB
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 4.1
Susunan Organisasi BPKAD Kabupaten Pemalang

3. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja

a. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 69 Tahun 2016, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pemalang mempunyai kedudukan sebagai berikut :

- 1) BPKAD merupakan unsur pelaksana yang menunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang

berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

- 2) BPKAD dipimpin oleh Kepala Badan.

b. Tugas

- 1) BPKAD memilikifungsi membantu Bupati dalam melaksanakan penunjang Urusan Pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- 2) Selain mempunyai tugas sebagaimana tersebut diatas, BPKAD juga membantu Bupati melaksanakan Tugas Pembantuan.

c. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, BPKAD menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 2) Melaksanakan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 3) Pemantauan, evaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 4) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

d. Tata Kerja

Dalam melaksanakan Penunjang Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan, hubungan Perangkat Daerah bersifat koordinatif dan fungsional untuk mensinkronkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

B. Hasil Penelitian

Data penelitian ini diambil dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Pemalang tahun 2013-2017 yang diperoleh dari Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pemalang yang telah dipublikasikan melalui website <https://www.pemalangkab.go.id>.

1. Analisis Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif digunakan untuk menganalisa data melalui teknik menggambarkan atau mendeskripsikan yang dilihat dari nilai *minimum*, *maksimum*, rata-rata (*mean*), dan *standar deviasi* dari data yang telah terkumpul seperti adanya tanpa bertujuan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Adapun deskripsi untuk masing-masing variabel yaitu :

a. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran yang dilaksanakan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu tahun anggaran, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang

sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Belanja modal untuk pelayanan publik yaitu pengeluaran langsung yang digunakan untuk mensejahterakan masyarakat. Belanja Modal termasuk jenis Belanja Langsung dan dipakai dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang memiliki nilai manfaat lebih dari satu tahun untuk dipakai dalam kegiatan pemerintahan, misalnya dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Adapun realisasi per-jenis belanja modal Kabupaten Pemalang periode 2013-2017 yaitu :

Tabel 4.1
Realisasi Belanja Modal Kabupaten Pemalang
Periode 2013-2017 (dalam jutaan rupiah)

Jenis Belanja Modal	2013	2014	2015	2016	2017
Belanja Tanah	480	618	714	1.392	11.885
Belanja Peralatan dan Mesin	23.069	34.473	47.083	61.827	57.680
Belanja Bangunan dan Gedung	111.639	53.471	54.633	88.998	144.210
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	114.366	72.596	162.917	85.302	94.178
Belanja Aset Tetap Lainnya	421	3.231	2.421	8.562	28.135
Jumlah	249.976	164.388	267.767	246.080	336.088

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa proporsi total belanja modal setiap tahunnya fluktuatif, naik dan turun. Belanja modal 2013 senilai Rp. 249, 98 milyar, kemudian di tahun 2014 turun sebesar Rp. 164, 39 milyar, tahun 2015 naik menjadi Rp. 267, 77 milyar, tahun

2016 turun lagi menjadi sebesar Rp. 246, 08 milyar, dan tahun 2017 naik drastis menjadi sebesar Rp. 336, 09 milyar.

Sedangkan proporsi realisasi belanja modal terhadap total belanja Kabupaten Pemalang periode 2013-2017 yaitu :

Tabel 4.2
Proporsi Realisasi Belanja Modal terhadap Total Belanja Daerah
Kabupaten Pemalang
Periode 2013-2017 (dalam rupiah)

Tahun	Realisasi Total Belanja	Realisasi Belanja Modal	Persentase
2013	1.477.106.031.341	249.976.019.799	16,92 %
2014	1.615.850.550.570	164.388.705.445	10,17 %
2015	1.777.978.292.423	267.766.979.163	15,06 %
2016	1.843.048.079.592	246.080.497.261	13,35 %
2017	1.896.830.515.438	336.088.968.940	17,72 %

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa proporsi belanja modal tiap tahun meningkat. Tetapi proporsinya sangat kecil yaitu antara 10,17 sampai dengan 17,72, jika dibandingkan dengan belanja tidak langsung nilainya lebih besar daripada belanja langsung contohnya belanja modal untuk pelayanan publik. Adapun analisa statistik belanja modal Kabupaten Pemalang dalam tahun 2013-2017 yaitu :

Tabel 4.3
Deskripsi Statistik Variabel Belanja Modal
Kabupaten Pemalang dalam tahun 2013-2017

Descriptive Statistics						
	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation
Belanja Modal (Y)	5	164,39	336,09	1264,31	252,8620	61,29997
Valid N (listwise)	5					

Tabel diatas menjelaskan deskripsi statistik singkat variabel belanja modal dengan jumlah 5 data antara tahun 2013-2017, jumlah minimal sebesar 164,39 milyar, jumlah maksimal sebesar 336,09 milyar dan rata-rata sebesar 252,86 milyar, dan *std.deviation* senilai 61,29997.

b. Rasio Kemandirian Daerah (X_1)

Kemandirian daerah merupakan kemampuan pendapatan daerah dalam mendanaipengeluaran pemerintah daerah sehingga tingkat bergantungnya daerah terhadappemerintahpusatsemakin kecil,dan pendapatan aslidaerahharusdominan dalam melaksanakan pemerintahan.Hasil dari rasio kemandirian daerah Kabupaten Pemalang tahun anggaran 2013-2017 yaitu :

Tabel 4.4
Rasio Kemandirian Daerah Kabupaten Pemalang
Periode 2013-2017 (dalam rupiah)

Tahun	PAD	Total Pendapatan Daerah	Rasio (%)	Kriteria
2013	136.362.281.618	1.486.773.783.371	9,17 %	Rendah Sekali
2014	217.345.439.974	1.687.338.257.907	12,88 %	Rendah Sekali
2015	230.435.212.865	1.966.423.490.803	11,72 %	Rendah Sekali
2016	275.458.054.016	2.112.514.280.374	13,04 %	Rendah Sekali
2017	425.893.266.850	2.353.030.274.957	18,10 %	Rendah Sekali

Tabel diatas menjelaskan tentang rasio kemandirian daerah Kabupaten Pemalang tiap tahunnya. 2013 sebesar 9,17% dengan kriteria rendah sekali, 2014 sebesar 12,88% dengan kriteria rendah sekali, 2015 sebesar 11,72% dengan kriteria rendah sekali, 2016 sebesar 13,04% dengan kriteria rendah sekali, dan 2017 sebesar 18,10% dengan kriteria rendah sekali.

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa rasio kemandirian Kabupaten Pemalang meningkat tiap tahunnya, walaupun ada penurunan pada tahun anggaran 2015. Sedangkan rata-rata rasio kemandirian daerah Kabupaten Pemalang dari tahun 2013-2017 adalah sekitar 12,98% dengan kriteria sangat rendah, hal tersebut menggambarkan bahwa besaran bergantungnya daerah kepada bantuan dari pihak ekstern masih sangat tinggi. Kemampuan keuangan Kabupaten Pemalang masih sangat rendah dan pola hubungannya instruktif dimana peranan pemerintah pusat mendominasi pada kemandirian pemerintah daerah. Adapun analisa statistik rasio kemandirian Kabupaten Pemalang dalam tahun 2013-2017 yaitu :

Tabel 4.5
Deskripsi Statistik Variabel Rasio Kemandirian Daerah
Kabupaten Pemalang tahun 2013-2017

Descriptive Statistics						
	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation
Kemandirian Daerah (X1)	5	9,17	18,10	65,06	13,0120	3,20960
Valid N (listwise)	5					

Data Sekunder : diolah dengan SPSS 22

Tabel diatas menjelaskan deskripsi statistik singkat variabel kemandirian daerah dengan jumlah 5 data antara tahun 2013-2017, jumlah minimal sebesar 9,17 %, jumlah maksimal sebesar 18,10 % dan rata-rata sebesar 13,01 % dan *std.deviation* senilai 3,20960.

c. Rasio Efektivitas Keuangan Daerah (X₂)

Rasio efektivitas keuangan daerah diukur untuk melihat seberapa efektif pendapatan asli daerah. Dihitung dengan melihat perbandingan antara anggaran PAD dengan realisasi PAD. Semakin besar realisasi PAD dari anggarannya, maka dinyatakan semakin efektif. Hasil dari rasio efektivitas keuangan daerah Kabupaten Pemalang tahun anggaran 2013-2017 yaitu :

Tabel 4.6
Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Kabupaten Pemalang
Periode 2013-2017 (dalam rupiah)

Tahun	Realisasi Penerimaan PAD	Target Penerimaan PAD	Rasio (%)	Kriteria
2013	136.362.281.618	117.177.974.000	116,37	Sangat Efektif
2014	217.345.439.974	178.122.889.000	122,02	Sangat Efektif
2015	230.435.212.865	209.093.274.000	110,21	Sangat Efektif
2016	275.458.054.016	246.679.817.000	111,67	Sangat Efektif
2017	425.893.266.850	405.333.931.000	105,07	Sangat Efektif

Tabel diatas menjelaskan bahwa rasio efektivitas keuangan daerah Kabupaten Pemalang tahun 2013 sebesar 116,37% dengan kriteria sangat efektif, 2014 sebesar 122,02% dengan kriteria sangat efektif, 2015 sebesar 110,21% dengan kriteria sangat efektif, 2016 sebesar 111,67% dengan kriteria sangat efektif, dan 2017 sebesar 105,07% dengan kriteria sangat efektif.

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa rasio efektivitas Kabupaten Pemalang pada tahun 2014 meningkat dibandingkan sebelumnya sebesar 5,65%, pada tahun 2015 menurun sebesar 11,81%, pada tahun 2016 meningkat sebesar 1,46%, dan pada tahun 2017 menurun sebesar 6,6%. Namun demikian, dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Pemalang sudah efektif dalam mengelola pendapatan asli daerahnya karena nilai rasio efektivitas menunjukkan angka lebih dari 100%. Adapun analisa statistik rasio efektivitas keuangan daerah Kabupaten Pemalang pada tahun 2013-2017 yaitu :

Tabel 4.7
Deskripsi Statistik Variabel Rasio Efektivitas Keuangan Daerah
Kabupaten Pemalang tahun 2013-2017

Descriptive Statistics						
	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation
Efektivitas Keuangan Daerah (X2)	5	105,07	122,02	565,34	113,0680	6,42519
Valid N (listwise)	5					

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan deskripsi statistik singkat variabel rasio efektivitas keuangan daerah dengan jumlah 5 data antara tahun 2013-2017, jumlah minimal sebesar 105,07 %, jumlah maksimal sebesar 122,02 % dan rata-rata sebesar 113,07 %, dan *std.deviation* senilai 6,42519.

d. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (X₃)

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah menggambarkan perbandingan antara besar anggaran yang digunakan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan pemungutan pendapatan dikatakan efisien jika rasio yang diperoleh dibawah 100%. Semakin kecil rasio ini artinya kinerja pemerintahan semakin baik. Hasil dari rasio efisiensi keuangan daerah Kabupaten Pemalang tahun anggaran 2013-2017 yaitu :

Tabel 4.8
Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Pemalang
Periode 2013-2017 (dalam rupiah)

Tahun	Realisasi Pengeluaran	Realisasi Penerimaan	Rasio (%)	Kriteria
2013	1.477.106.031.341	1.486.773.783.371	99,35	Kurang Efisien
2014	1.615.850.550.570	1.687.338.257.907	95,76	Kurang Efisien
2015	1.777.978.292.423	1.966.423.490.803	90,42	Kurang Efisien
2016	1.843.048.079.592	2.112.514.280.374	87,24	Cukup Efisien
2017	1.896.830.515.438	2.353.030.274.957	80,61	Cukup Efisien

Tabel diatas menjelaskan tentang rasio efisiensi keuangan daerah Kabupaten Pemalang tiap tahunnya. Tahun 2013 sebesar 99,35% dengan kriteria kurang efisien, 2014 senilai 95,76% dengan kriteria kurang efisien, tahun anggaran 2015 sebesar 90,42% dengan kriteria kurang efisien, tahun anggaran 2016 sebesar 87,24% dengan kriteria cukup efisien, dan 2017 sebesar 80,61% dengan kriteria cukup efisien.

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa rasio efisiensi Kabupaten Pemalang mengalami penurunan sebesar 3,59% di tahun 2014, sebesar 5,34% di tahun 2015, sebesar 3,18% di tahun 2016, dan sebesar 6,63% di tahun 2017. Secara global rasio ini beradapada nilai kurang dari seratus persen artinya dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam mengelola Pendapatan Asli Daerahnya sudah efisien. Adapun analisa statistik rasio efisiensi keuangan daerah Kabupaten Pemalang pada 2013-2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.9
Deskripsi Statistik Variabel Rasio Efisiensi Keuangan Daerah
Kabupaten Pemalang tahun 2013-2017

Descriptive Statistics						
	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation
Efisiensi Keuangan Daerah (X3)	5	80,61	99,35	453,38	90,6760	7,31918
Valid N (listwise)	5					

Tabel diatas menjelaskan deskripsi statistik singkat variabel efisiensi keuangan daerah dengan jumlah 5 data antara tahun 2013-2017, jumlah minimal sebesar 80,61 %, jumlah maksimal sebesar 99,35 % dan rata-rata sebesar 90,68 %, dan *std.deviation* senilai 7,31918.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel terikat dan ketiga variabel bebasnya berdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang mempunyai nilai residual yang terdistribusi secara normal atau mendekati normal. Uji normalitas yang digunakan adalah Uji *One Sample Kolmogorov Smirnov (K-S)*, uji ini dipakaiguna mengetahui apakah distribusi residual berdistribusi secara normal atau tidak. Adapun dasar pengambilan keputusan atau kriteria pengujiannya adalah jika nilai *Asymp Sig. (2-tailed)* > nilai signifikansisebesar 0,05, maka nilai residual berdistribusisecara normal, sebaliknya jika nilai *AsympSig.(2-*

tailed) < nilai signifikansi sebesar 0,05, maka nilai residual tidak berdistribusi secara normal. Adapun hasil analisis pengujian normalitas *One Sample Kolmogorov Smirnov (K-S)* dengan menggunakan SPSS IBM. 22 yaitu :

Tabel 4.10
Hasil Uji Normalitas *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		5
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std.	6,53994134
	Deviation	
Most Extreme Differences	Absolute	,194
	Positive	,178
	Negative	-,194
Kolmogorov-Smirnov Z		,435
Asymp. Sig. (2-tailed)		,992

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Data Sekunder : diolah dengan SPSS 22

Berdasarkan output *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test*, diperoleh nilai signifikansi (*Asymp. Sig. 2-tailed*). 0,992 atau 99,2%. Karena nilai signifikan > dari 0,05 atau (0,992 > 0,05) maka dengan demikian variabel dependen berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dipakaiguna menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas dalam model regresi dapat dilihat

dengan melihat nilai *tolerance value* dan nilai *Variance Inflation Factor (VIF)*. Jika nilai *tolerance value* $\geq 0,1$, dan nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* ≤ 10 , maka tidak terjadi multikolinieritas dan jika nilai *tolerance value* $\leq 0,1$, dan nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* ≥ 10 , maka terjadi multikolinieritas (Ghozali, 2005).

Hasil ujimultikolinieritastertera dibawah ini :

Tabel 4.11
Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model	Sig.	Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1 (Constant)	,167		
Kemandirian Daerah (X1)	,279	,128	7,804
Efektivitas Keuangan Daerah (X2)	,104	,170	5,880
Efisiensi Keuangan Daerah (X3)	,231	,156	7,796

a. Dependent Variable: Belanja Modal (Y)

Data Sekunder : diolah dengan SPSS 22

Berdasarkan tabel di atas tampak bahwa ketiga variabel bebas mempunyai nilai *tolerance* lebih besar dari 10% (0,10) yaitu variabel Kemandirian Daerah (X₁) sebesar 0,128 (0,128 > 0,10), variabel Efektivitas Keuangan Daerah (X₂) sebesar 0,170 (0,170 > 0,10), dan variabel Efisiensi Keuangan Daerah (X₃) sebesar 0,156 (0,156 > 0,10), dan nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* kurang dari 10 yaitu variabel Kemandirian Daerah (X₁) = 7,804 (7,804 < 10), variabel Efektivitas Keuangan Daerah (X₂) = 5,880 (5,880 < 10), dan variabel Efisiensi Keuangan Daerah (X₃) = 7,796 (7,796 < 10), maka bisa diambil

kesimpulan bahwa dalam model regresi tidak terjadi multikolinieritas antar variabel bebasnya.

c. Uji Autokorelasi

Untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t sebelumnya. Model regresi yang baik yaitu regresi yang bebas autokorelasi. Untuk mendeteksi autokorelasi bias diamati pada tabel *Durbin-Watson* ($D-W$). Jika $D-W$ dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif, jika $D-W$ diantara -2 sampai $+2$, berarti tidak ada autokorelasi, dan jika $D-W$ diatas $+2$ berarti ada autokorelasi negatif.

Tabel 4.12
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,994 ^a	,989	,954	13,07988	2,264

a. Predictors: (Constant), Efisiensi Keuangan Daerah (X3), Efektivitas Keuangan Daerah (X2), Kemandirian Daerah (X1)

b. Dependent Variable: Belanja Modal (Y)

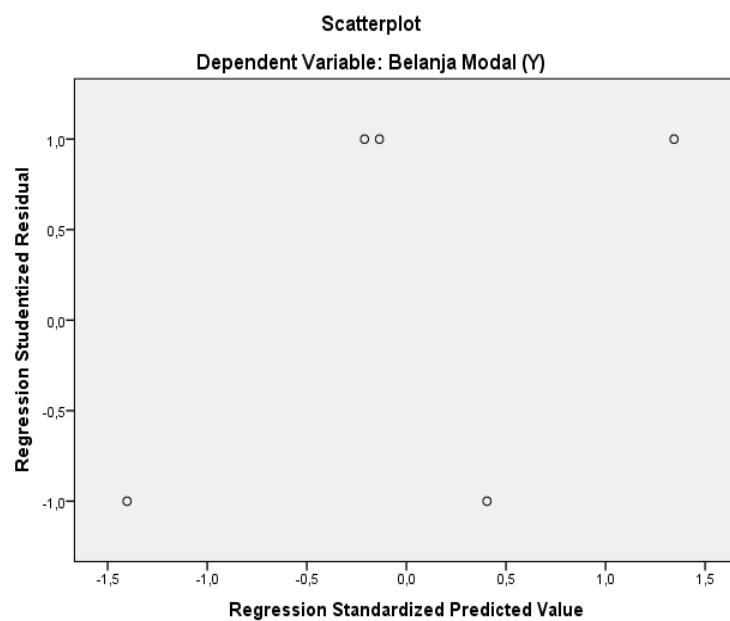
Data Sekunder : diolah dengan SPSS 22

Dari tabel diatas diperoleh nilai hitung *Durbin-Waston* sebesar 2,264, nilai ini akan dibandingkan dengan tabel DW dengan jumlah sampel $(n) = 5$, jumlah variabel independen $(k) = 3$ dan tingkat signifikansi 0,05 didapat nilai $dl = 0,000$ dan $du = 0,000$. Dengan

demikian bias diambil kesimpulan bahwa $du < dw < (4-du)$ ($4-0,000 = 4,000$) $0,000 < 2,264 < 4,000$, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima atau H_a ditolak, ini berarti dalam model linier tidak terjadi autokorelasi.

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dipakai untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk mengetahui gejala heteroskedastisitas dilakukan dengan mengamati grafik *scatterplot* melalui SPSS 22, model yang bebas dari heteroskedastisitas mempunyai grafik *scatterplot* dengan model titik-titik menyebar. Lebih jelasnya model *scatterplot* dari hasil perhitungan ditunjukkan dibawah ini.



Gambar 4.2
Hasil Uji Heteroskedastisitas Grafik *Scatterplots Regresi*

Berdasarkan *grafik scatterplot* diatas terlihat jelas sebaran data tidak membentuk model yang jelas, titik-titik data menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Maka bisa diambil kesimpulan bahwa pada model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas, atau dengan kata lain pada model regresi terjadi kesamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.

3. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linear digunakan untuk menyatakan hubungan variabel bebas (X) secara bersama-sama variabel terikat (Y). Analisis ini untuk mengetahui pengaruh antara Kemandirian Daerah (X_1), Efektivitas Keuangan Daerah (X_2), dan Efisiensi Keuangan Daerah (X_3) terhadap Belanja Modal (Y) di Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013- 2017. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.13
Hasil Analisis Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	891,115	238,809		3,731	,167
Kemandirian Daerah (X_1)	12,161	5,692	,637	2,136	,279
Efektivitas Keuangan Daerah (X_2)	-15,016	2,468	-1,574	-6,084	,104

Efisiensi Keuangan Daerah (X3)	9,941	3,769	1,187	2,637	,231
--------------------------------------	-------	-------	-------	-------	------

a. Dependent Variable: Belanja Modal (Y)

Data Sekunder : diolah dengan SPSS 22

Berdasarkan tabel diatas diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$\hat{Y} = 891,115 + 12,161X_1 + -15,016X_2 + 9,941X_3 + e$$

Persamaan regresi diatas memiliki arti sebagai berikut:

- Nilai konstanta (a) adalah sebesar 891,115.
- Nilai koefesien regresi variabel Kemandirian Daerah(b_1) bernilai positif, yaitu 12,161. Artinya Kemandirian Daerah (X_1)memiliki pengaruh positif terhadap Belanja Modal, sehingga jika Kemandirian Daerah (X_1) meningkat sebesar 1 %, maka Belanja Modal naik senilai 12,161%.
- Nilai koefesien regresi variabel Efektivitas Keuangan Daerah(b_2) bernilai negatif, yaitu -15,016. Artinya Efektivitas Keuangan Daerah (X_2) berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal, sehingga jika Efektivitas Keuangan Daerah (X_2) meningkat sebesar 1 %, maka Belanja Modal akan turun sebesar -15,016%.
- Nilai koefesien regresi variabel Efisiensi Keuangan Daerah(b_3) bernilai positif, yaitu 9,941. Artinya Efisiensi Keuangan Daerah (X_3)memiliki pengaruh positif terhadap Belanja Modal, sehingga jika Efisiensi Keuangan Daerah (X_3) meningkat sebesar 1 %, maka Belanja Modalnaik senilai 9,941%.

4. Pengujian Hipotesis

a) Uji Simultan (Uji F)

Uji simultan menggunakan uji F dipakaiguna mengetahui apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model berpengaruh secara bersamaan terhadap variabel dependen. Pengujian dibuktikan dengan membuatperbandingan antara nilai kritis F (table) dengan nilai F (hitung) yang terdapat pada tabel analisis varian. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka keputusan menolak hipotesis nol (H_0) dan menerima hipotesis alternatif (H_a), artinya secara statistik data yang digunakan untuk membuktikan bahwa semua variabel independen berpengaruh terhadap variabel terikat.

Uji F digunakan untuk menguji hipotesis 1 yang menyatakan bahwa : Rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas keuangan daerah, dan rasio efisiensi keuangan daerah berpengaruh secara simultan terhadap belanja modal untuk pelayanan publik pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang tahun 2013 - 2017.

Hasil uji F dengan IBM SPSS 22 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.14
Hasil Analisis Uji F (Simultan)

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
-------	----------------	----	-------------	---	------

1	Regression	14859,661	3	4953,220	28,952	,136 ^b
	Residual	171,083	1	171,083		
	Total	15030,745	4			

a. Dependent Variable: Belanja Modal (Y)

b. Predictors: (Constant), Efisiensi Keuangan Daerah (X3), Efektivitas Keuangan Daerah (X2), Kemandirian Daerah (X1)

Data Sekunder : diolah dengan SPSS 22

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh besaran F_{hitung} senilai 28,952 dan nilai sig. sebesar 0,136. Nilai F_{tabel} dicari pada sig. 0,05 dengan derajat kebebasan $df = n-k$ atau $5-3=2$, diperoleh F_{tabel} sebesar 19,164 (lihat lampiran F tabel).

Berdasarkan kriteria pengujian apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 diterima, artinya H_a ditolak dan jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak, artinya H_a diterima, Karena F_{hitung} sebesar 28,952 dan nilai F_{tabel} sebesar 19,164, ($28,952 > 19,164$), maka H_0 ditolak, artinya H_a diterima. Dan nilai signifikansi sebesar $0,136 > 0,05$ yang berarti tidak signifikan, maka bisa diambil kesimpulanyaitu Kemandirian Daerah (X_1), Efektivitas Keuangan Daerah (X_2) dan Efisiensi Keuangan Daerah (X_3) memiliki pengaruh tidak signifikan secara bersama-sama terhadap Belanja Modal (Y) untuk pelayanan publik pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang tahun 2013-2017, dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa “Rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas keuangan daerah, dan rasio efisiensi keuangan daerah berpengaruh secara simultan terhadap belanja modal untuk pelayanan publik pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang tahun 2013-2017” dapat diterima.

b) Uji Parsial (Uji t)

Uji hipotesis menggunakan uji parsial t, yaitu untuk menguji seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individu dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Keputusan diambil dengan membandingkan nilai t hitung dan nilai kritis sesuai dengan tingkat signifikan yang digunakan yaitu 0,05 (5%).

Uji t digunakan untuk menguji hipotesis ke 2, hipotesis ke 3 dan hipotesis ke 4. Hasil uji t dengan menggunakan IBM SPSS 22 bisa dilihat dibawah ini :

Tabel 4.15
Hasil Analisis Uji t parsial

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	891,115	238,809		3,731	,167
Kemandirian Daerah (X1)	12,161	5,692	,637	2,136	,279
Efektivitas Keuangan Daerah (X2)	-15,016	2,468	-1,574	-6,084	,104
Efisiensi Keuangan Daerah (X3)	9,941	3,769	1,187	2,637	,231

a. Dependent Variable: Belanja Modal (Y)

Data Sekunder : diolah dengan SPSS 22

Berdasarkan tabel diatas diperoleh hasil sebagai berikut :

- Nilai t hitung variabel Kemandirian Daerah (X_1) sebesar 2,136 dengan nilai signifikansi sebesar 0,279.
- Nilai t hitung variabel Efektivitas Keuangan Daerah (X_2) sebesar - 6,084 dengan sig. senilai 0,104.

- c) Nilai t hitung variabel Efisiensi Keuangan Daerah (X_3) sebesar 2,637 dan sig. senilai 0,231.
- d) Nilai t tabel dilihat pada sig. $0,05/2 = 0,025$ (uji 2 sisi) dengan derajat kebebasan $df = n-k$ atau $5-3=2$, diperoleh t tabel sebesar 4,303 (lihat lampiran t tabel).

Berdasarkan kriteria pengujian apabila nilai t hitung $< t$ tabel maka H_0 diterima, artinya variabel bebas secara individual tidak berpengaruh terhadap variabel terikat dan apabila nilai t hitung $> t$ tabel maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya variabel bebas secara individual berpengaruh signifikan pada variabel dependen, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a) Karena t_{hitung} variabel Kemandirian Daerah (X_1) $< t_{tabel}$ ($2,136 < 4,303$), maka H_0 diterima, artinya H_a ditolak, jadi variabel Kemandirian Daerah (X_1) tidak memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal (Y), dan karena nilai signifikansinya adalah $0,279 > \alpha$ ($0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa Kemandirian Daerah (X_1) secara parsial tidak berpengaruh tidak signifikan terhadap Belanja Modal untuk pelayanan publik pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang tahun 2013-2017, dengan demikian hipotesis kedua yang menyatakan bahwa “Rasio kemandirian daerah berpengaruh secara parsial terhadap belanja modal untuk pelayanan publik pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang tahun 2013-2017” ditolak.

- b) Karena t_{hitung} variabel Efektivitas Keuangan Daerah (X_2) $< t_{tabel}$ ($-6,084 < 4,303$), maka H_0 diterima, artinya H_a ditolak, jadi variabel Efektivitas Keuangan Daerah (X_2) tidak memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal (Y), dan karena nilai signifikansinya adalah 0,104 lebih besar dari nilai α (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa Efektivitas Keuangan Daerah (X_2) secara parsial tidak berpengaruh tidak signifikan terhadap Belanja Modal untuk pelayanan publik pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2013-2017, dengan demikian hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa “Rasio efektivitas keuangan daerah berpengaruh secara parsial terhadap belanja modal untuk pelayanan publik pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2013-2017” ditolak.
- c) Karena t_{hitung} variabel Efisiensi Keuangan Daerah (X_3) $< t_{tabel}$ ($2,637 < 4,303$), maka H_0 diterima, artinya H_a ditolak, jadi variabel Efisiensi Keuangan Daerah (X_3) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal (Y), dan karena nilai signifikansinya adalah 0,231 lebih besar dari nilai α (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa Efisiensi Keuangan Daerah (X_3) secara parsial tidak berpengaruh tidak signifikan terhadap Belanja Modal untuk pelayanan publik pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2013-2017, dengan demikian hipotesis keempat yang menyatakan bahwa “Rasio efisiensi keuangan daerah berpengaruh secara parsial terhadap belanja modal untuk pelayanan publik pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2013-2017” ditolak.

5. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi pada dasarnya dipakai untuk menghitung seberapa besar pengaruh variabel Kemandirian Daerah (X_1), Efektivitas Keuangan Daerah (X_2) dan Efisiensi Keuangan Daerah (X_3) terhadap Belanja Modal (Y). Adapun hasil uji koefisien determinasi (R^2) yaitu :

Tabel 4.16
Hasil Uji Model R Square

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	,994 ^a	,989	,954	13,07988	,989	28,952	3 ^a	1	,136

a. Predictors: (Constant), Efisiensi Keuangan Daerah (X_3), Efektivitas Keuangan Daerah (X_2), Kemandirian Daerah (X_1)

b. Dependent Variable: Belanja Modal (Y)

Dari tabel hasil uji koefisien determinasi simultan diatas didapatkan angka koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,989 dengan ($r^2 \times 100\%$) = ($0,994^2 \times 100\%$) = 0,989 (98,9%). Artinya variabel Kemandirian Daerah (X_1), Efektivitas Keuangan Daerah (X_2) dan Efisiensi Keuangan Daerah (X_3) secara bersama-sama mempengaruhi variabel Belanja Modal (Y) sebesar 98,9%, sedangkan sisanya sebesar $100\% - 98,9\% = 1,1\%$ masih dipengaruhi oleh faktor-faktor atau sebab-sebab yang lain di luar variabel yang diteliti.

C. Pembahasan

1. Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah (X_1), Rasio Efektivitas Keuangan Daerah (X_2) dan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (X_3) secara simultan terhadap Belanja Modal (Y) untuk Pelayanan Publik pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013-2017

Hasil penelitian dengan uji deskripsi pada proporsi belanja modal terhadap total belanja daerah Kabupaten Pemalang menunjukkan bahwa proporsi belanja modal tiap tahun meningkat. Tetapi proporsinya sangat kecil yaitu antara 10,17 sampai dengan 17,72, apabila dibandingkan dengan belanja tidak langsung, lebih besar dibandingkan dengan belanja langsung yaitu belanja yang manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, termasuk belanja modal untuk pelayanan publik.

Hasil penelitian dengan uji F menunjukkan bahwa F hitung senilai 28,952 dengan nilai signifikansi sebesar 0,136. Karena F_{hitung} sebesar 28,952 dan nilai F_{tabel} sebesar 19,164, ($28,952 > 19,164$), maka H_0 ditolak, artinya H_a diterima. Dan nilai signifikansi sebesar $0,136 > 0,05$ yang berarti tidak signifikan, jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang tidak signifikan antara Kemandirian Daerah (X_1), Efektivitas Keuangan Daerah (X_2) dan Efisiensi Keuangan Daerah (X_3) secara bersama-sama terhadap

Belanja Modal (Y) untuk pelayanan publik pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2013-2017.

Hasil penelitian dengan uji determinasi didapatkan angka koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,989 dengan $(r^2 \times 100\%) = (0,994^2 \times 100\%) = 0,989$ (98,9%). Hal ini berarti variabel Kemandirian Daerah (X_1), Efektivitas Keuangan Daerah (X_2) dan Efisiensi Keuangan Daerah (X_3) secara bersama-sama mempengaruhi variabel Belanja Modal (Y) sebesar 98,9%, sedangkan sisanya sebesar $100\% - 98,9\% = 1,1\%$ masih dipengaruhi oleh faktor-faktor atau sebab-sebab yang lain di luar variabel yang diteliti.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Vella Kurniasih Fitri (2013) yang menyatakan bahwa rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas keuangan daerah, rasio efisiensi keuangan daerah, dan dana alokasi umum memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap alokasi belanja modal.

2. Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah (X_1) secara Parsial terhadap Belanja Modal (Y) untuk Pelayanan Publik pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013-2017

Hasil penelitian dengan uji deskripsi terhadap rasio kemandirian daerah menunjukkan bahwa rasio kemandirian Kabupaten Pemalang meningkat tiap tahunnya, walaupun ada penurunan pada tahun anggaran 2015. Sedangkan rata-rata rasio kemandirian daerah Kabupaten Pemalang dalam tahun 2013-2017 adalah sekitar 12,98% dengan kriteria sangat rendah, dengan demikian proporsi bergantungnya daerah kepada bantuan pihak ekstern masih sangat tinggi. Kemampuan keuangan Kabupaten Pemalang

masih sangat rendah dan pola hubungannya instruktif dimana pemeritah pusat mendominasi daripada kemandirian Pemerintah Daerah.

Hasil penelitian dengan uji t parsial didapat nilai t hitung variabel Kemandirian Daerah (X_1) sebesar 2,136 dengan sig. senilai 0,279. Karena t_{hitung} variabel Kemandirian Daerah (X_1) $< t_{tabel}$ ($2,136 < 4,303$), maka H_0 diterima, artinya H_a ditolak, jadi variabel Kemandirian Daerah (X_1) tidak memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal (Y), dan karena nilai signifikansinya adalah 0,279 lebih besar dari nilai α (0,05), dengan demikian bisa diambil kesimpulan yaitu Kemandirian Daerah (X_1) secara parsial tidak berpengaruh tidak signifikan terhadap Belanja Modal untuk pelayanan publik pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2013-2017.

Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan Riko Novianto dan Rafiudin Hanafiah (2015) yang menyatakan bahwa tingkat kemandirian keuangan tahun sebelumnya secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap belanja modal.

3. Pengaruh Rasio Efektivitas Keuangan Daerah (X_2) secara parsial terhadap Belanja Modal (Y) untuk Pelayanan Publik pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013-2017

Hasil penelitian dengan uji deskripsi terhadap rasio efektivitas keuangan daerah menunjukkan bahwa rasio efektivitas Kabupaten Pemalang pada tahun 2014 meningkat dibandingkan sebelumnya sebesar 5,65%, pada tahun 2015 menurun sebesar 11,81%, pada tahun 2016 meningkat sebesar 1,46%, dan pada tahun 2017 menurun sebesar 6,6%. Namun demikian, dapat

disimpulkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Pemalang sudah efektif dalam mengelola pendapatan asli daerahnya karena nilai rasio efektivitas menunjukkan angka lebih dari 100%.

Hasil penelitian dengan uji t parsial didapat hasil t hitung variabel Efektivitas Keuangan Daerah (X_2) sebesar -6,084 dengan nilai signifikansi sebesar 0,104. Karena t_{hitung} variabel Efektivitas Keuangan Daerah (X_2) $< t_{tabel}$ (-6,084 $<$ 4,303), maka H_0 diterima, artinya H_a ditolak, jadi variabel Efektivitas Keuangan Daerah (X_2) tidak memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal (Y), dan karena nilai signifikansinya adalah 0,104 $>$ nilai α (0,05), dengan demikian bisa diambil kesimpulan yaitu Efektivitas Keuangan Daerah (X_2) secara parsial tidak berpengaruh tidak signifikan terhadap Belanja Modal untuk pelayanan publik pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2013-2017.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Novianto Indratno (2016) yang menyatakan bahwa rasio efektivitas dan rasio ketergantungan daerah tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

4. Pengaruh Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (X_3) secara parsial terhadap Belanja Modal (Y) untuk Pelayanan Publik pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013-2017

Hasil penelitian dengan uji deskripsi terhadap rasio efisiensi keuangan daerah menunjukkan bahwa rasio efisiensi Kabupaten Pemalang mengalami penurunan sebesar 3,59% di tahun 2014 sebesar 5,34% di tahun 2015, sebesar 3,18% di tahun 2016, dan sebesar 6,63% di tahun 2017. Secara umum

rasio efisiensi menunjukkan angka kurang dari 100% berarti bisa dikatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam mengelola Pendapatan Asli Daerahnya sudah efisien.

Hasil penelitian dengan uji t parsial diperoleh nilai t hitung variabel Efisiensi Keuangan Daerah (X_3) sebesar 2,637 dengan nilai signifikansi sebesar 0,231. Karena t_{hitung} variabel Efisiensi Keuangan Daerah (X_3) $< t_{tabel}$ ($2,637 < 4,303$), maka H_0 diterima, artinya H_a ditolak, jadi variabel Efisiensi Keuangan Daerah (X_3) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal (Y), dan karena nilai signifikansinya adalah 0,231 lebih besar dari nilai α (0,05), dengan demikian bisa diambil kesimpulan yaitu Efisiensi Keuangan Daerah (X_3) secara parsial tidak memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap Belanja Modal untuk pelayanan publik pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2013-2017.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Verawaty, Citra Indah Merina, dan Mela Sari (2013) yang menyatakan bahwa rasio efektivitas keuangan daerah, rasio efisiensi keuangan daerah, DAU, DAK, dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan positif terhadap pengalokasian belanja modal.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan uji hipotesis yang sudah dilaksanakan, bisa diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kemandirian Daerah, Efektivitas Keuangan Daerah, dan Efisiensi Keuangan Daerah secara simultan berpengaruh tidak signifikan terhadap Belanja Modal untuk pelayanan publik pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2013-2017, hal ini dibuktikan dengan hasil analisis Uji F yang menunjukkan bahwa nilai signifikansi $> 0,05$ ($0,136 > 0,05$).
2. Kemandirian Daerah secara parsial tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal untuk pelayanan publik pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2013-2017, hal ini dibuktikan dari hasil nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($2,136 < 4,303$).
3. Efektivitas Keuangan Daerah secara parsial tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal untuk pelayanan publik pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2013-2017, hal ini dibuktikan dari hasil nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($-6,084 < 4,303$).
4. Efisiensi Keuangan Daerah secara parsial tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal untuk pelayanan publik pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2013-2017, hal ini dibuktikan dari hasil nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($2,637 < 4,303$).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh diatas, maka dalam hal ini dapat diberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang Hariharan diharapkan mempertahankan atau meningkatkan kemandirian daerah, efektivitas keuangan daerah dan efisiensi keuangan daerah dalam mengalokasikan proporsi belanja modal untuk pelayanan publik sehingga dapat meningkat dan bertambah pada setiap tahunnya.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang Hariharan seharusnya lebih optimal dalam menggali potensi ekonomi daerahnya guna meningkatkan pendapatan daerah sehingga terwujud kemandirian daerah untuk mendanai semua pengeluaran agar dapat mengurangi ketergantungan pada pihak ekstern (Pemerintah Pusat dan Provinsi).
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang Hariharan hendaknya mempunyai strategi yang dapat meminimalisir rintangan/hambatan dalam menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD), seperti dengan cara melakukan penyempurnaan terhadap sistem perpajakan atau dengan melakukan pemungutan pajak secara intensif agar penerimaan pendapatan daerah dapat lebih efektif dan sesuai dengan target yang direncanakan.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang Hariharan sebaiknya melakukan efisiensi dan pengawasan terutama dalam membelanjakan anggaran supaya sesuai dengan kegunaannya dan rencana yang telah dibuat.

5. Untuk Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan variabel yang lebih bervariasi, dengan ditambah lagi variabel bebas lainnya baik ukuran maupun jenis penerimaan pemerintah daerah lainnya seperti penerimaan pembiayaan pada APBD atas SiLPA tahun anggaran sebelumnya, maupun variabel non keuangan seperti pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeny, Shinta Noor, Ahmad Kudhori dan Tri Lestariningsih. 2017. Analisis Kinerja Keuangan dan Alokasi Belanja Modal Pemerintah Daerah (Studi Kasus di Pemerintah Kota Madiun Tahun 2011-2015). *Jurnal Ilmu AKSI*. 1:2528-6145 Politeknik Negeri Madiun.
- Ardhini dan Handayani. 2011. *Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal untuk Pelayanan Publik Dalam Perspektif Teori Keagenan (Studi pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah)*. Jurnal Akuntansi Universitas Diponegoro Semarang.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Augusty, Ferdinand. 2006. *Metode Penelitian Manajemen : Pedoman Penelitian untuk Skripsi, Tesis, dan Disertasi Ilmu Manajemen*. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta : Erlangga.
- Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Pemerintah Kabupaten Pemalang untuk Tahun yang Berakhir dengan 31 Desember 2017.
- Fitri, Vella Kurniasih. 2013. *Pengaruh Rasio Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Alokasi Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2009-2012*. Jurnal Akuntansi Universitas Riau, Pekanbaru.
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul dan Syukriy Abdullah. 2006. Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*. 2 (1): 53-64.
- Halim, Abdul. 2006. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik; Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah edisi 3*. Jakarta : Salemba Empat.

- Hidayat, Saepul. 2017. Pengaruh Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja dan Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Akurasi Estimasi Anggaran. *Proceedings Profesionalisme Akuntan Menuju Sustainable Business Practice*. Bandung. ISSN: 2252-3936.
- Indiyanti, Ni Made Deni dan Henny Rahyuda . 2018. Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal di Provinsi Bali. *Jurnal Manajemen Unud*. 7 (9): 4713-4746.
- Indratno, Novianto . 2016. *Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah*. Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Keputusan MENDAGRI Nomor 690.900.327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan
- Keputusan MENPAN Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- Keputusan MENPAN Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tata laksana Pelayanan Umum.
- Kurniawan, Oki. 2017. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota se-Jawa Timur Tahun 2012-2016. *Jurnal Akuntansi Universitas Muhammadiyah, Purwokerto*.
- Laporan Realisasi APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013-2017, diakses melalui <https://www.pemalangkab.go.id>.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen keuangan daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI OFFSET.
- Modul Kerjasama Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah. 2015. *Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Dirjen Perimbangan Keuangan.
- Nisa, Maratun. 2014. Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah, Rasio Efektifitas Keuangan Daerah, dan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal untuk Pelayanan Publik (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Pemalang). Skripsi, Fakultas Ekonomi. Tegal.

Peraturan Bupati Pematang Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Priyadi, Deddy. 2019. Modul Pelatihan Alat Analisis Data dengan Program Aplikasi SPSS. Tegal: Universitas Pancasakti Tegal.

Ramadhani, Febby Randria. 2016. Analisis Kemandirian dan Efektivitas Keuangan Daerah di Kota Tarakan Tahun 2010-2015. Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 14, No. 01 Universitas Muhammadiyah Malang.

Rondonuwu, Ritno H, Jantje J. Tinangon dan Novi Budiarto. 2015. Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa. *Jurnal EMBA*. 3 (4): 23-32.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: ALFABETA.

Tamawiyu, Julius, Jullie J Sondakh dan Jessy D.L Warong. 2016. Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Belanja Modal untuk Pelayanan Publik (Studi pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Utara). Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "GOODWILL" Vol. 7, No. 2 Universitas Sam Ratulangi.

Trius, Jujun. 2017. Makalah Teori Pilihan Rasional. UIN Raden Fatah Palembang.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Verawaty, Citra Indah Merina dan Mela Sari. 2013. Determinan Pengalokasian Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel

Moderatingpada Pemerintah Provinsi di Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi XVII Universitas Bina Darma.

Website **TEMPO.CO** yang diakses melalui <https://bisnis.tempo.co/read/1036110/kemenkeu-pemerintah-daerah-tak-efektif-kelola-keuangannya/full&view=ok> (18 Maret 2019)

LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Penelitian

Realisasi Belanja Modal Kabupaten Pemalang
Periode 2013-2017 (dalam jutaan rupiah)

Jenis Belanja Modal	2013	2014	2015	2016	2017
Belanja Tanah	480	618	714	1.392	11.885
Belanja Peralatan dan Mesin	23.069	34.473	47.083	61.827	57.680
Belanja Bangunan dan Gedung	111.639	53.471	54.633	88.998	144.210
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	114.366	72.596	162.917	85.302	94.178
Belanja Aset Tetap Lainnya	421	3.231	2.421	8.562	28.135
Jumlah	249.976	164.388	267.767	246.080	336.088

Proporsi Realisasi Belanja Modal terhadap Total Belanja Daerah
Kabupaten Pemalang
Periode 2013-2017 (dalam rupiah)

Tahun	Realisasi Total Belanja	Realisasi Belanja Modal	Persentase
2013	1.477.106.031.341	249.976.019.799	16,92 %
2014	1.615.850.550.570	164.388.705.445	10,17 %
2015	1.777.978.292.423	267.766.979.163	15,06 %
2016	1.843.048.079.592	246.080.497.261	13,35 %
2017	1.896.830.515.438	336.088.968.940	17,72 %

Rasio Kemandirian Daerah Kabupaten Pemalang
Periode 2013-2017 (dalam rupiah)

Tahun	PAD	Total Pendapatan Daerah	Rasio (%)	Kriteria
	a	b	c=(a:b)	
2013	136.362.281.618	1.486.773.783.371	9,17 %	Rendah Sekali
2014	217.345.439.974	1.687.338.257.907	12,88 %	Rendah Sekali
2015	230.435.212.865	1.966.423.490.803	11,72 %	Rendah Sekali
2016	275.458.054.016	2.112.514.280.374	13,04 %	Rendah Sekali
2017	425.893.266.850	2.353.030.274.957	18,10 %	Rendah Sekali

Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Kabupaten Pemalang

Periode 2013-2017 (dalam rupiah)

Tahun	Realisasi Penerimaan PAD	Target Penerimaan PAD	Rasio (%)	Kriteria
	a	b	c=(a:b)	
2013	136.362.281.618	117.177.974.000	116,37	Sangat Efektif
2014	217.345.439.974	178.122.889.000	122,02	Sangat Efektif
2015	230.435.212.865	209.093.274.000	110,21	Sangat Efektif
2016	275.458.054.016	246.679.817.000	111,67	Sangat Efektif
2017	425.893.266.850	405.333.931.000	105,07	Sangat Efektif

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Pemalang

Periode 2013-2017 (dalam rupiah)

Tahun	Realisasi Pengeluaran	Realisasi Penerimaan	Rasio (%)	Kriteria
	a	b	c=(a:b)	
2013	1.477.106.031.341	1.486.773.783.371	99,35	Kurang Efisien
2014	1.615.850.550.570	1.687.338.257.907	95,76	Kurang Efisien
2015	1.777.978.292.423	1.966.423.490.803	90,42	Kurang Efisien
2016	1.843.048.079.592	2.112.514.280.374	87,24	Cukup Efisien
2017	1.896.830.515.438	2.353.030.274.957	80,61	Cukup Efisien

Lampiran 2. Input Data Analisis

Data Analisis

Tahun	Variabel Belanja Modal	Rasio Kemandirian (%)	Rasio Efektifitas Keuangan Daerah (%)	Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (%)
2013	249.98	9,17 %	116,37	99,35
2014	164.39	12,88 %	122,02	95,76
2015	267.77	11,72 %	110,21	90,42
2016	246.08	13,04 %	111,67	87,24
2017	336.09	18,10 %	105,07	80,61

Lampiran 3. Hasil Deskripsi Statistik

HASIL UJI DESKRIPSI STATISTIK

DESCRIPTIVES VARIABLES=X1
/STATISTICS=MEAN SUM STDDEV MIN MAX.

Descriptives

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation
Kemandirian Daerah (X1)	5	9,17	18,10	65,06	13,0120	3,20960
Valid N (listwise)	5					

DESCRIPTIVES VARIABLES=X2
/STATISTICS=MEAN SUM STDDEV MIN MAX.

Descriptives

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation
Efektivitas Keuangan Daerah (X2)	5	105,07	122,02	565,34	113,0680	6,42519
Valid N (listwise)	5					

DESCRIPTIVES VARIABLES=X3
/STATISTICS=MEAN SUM STDDEV MIN MAX.

Descriptives

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation
Efisiensi Keuangan Daerah (X3)	5	80,61	99,35	453,38	90,6760	7,31918
Valid N (listwise)	5					


```
DESCRIPTIVES VARIABLES=Y
  /STATISTICS=MEAN SUM STDDEV MIN MAX.
```

Descriptives

Descriptive Statistics						
	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation
Belanja Modal (Y)	5	164,39	336,09	1264,31	252,8620	61,29997
Valid N (listwise)	5					

```
DESCRIPTIVES VARIABLES=X1 X2 X3 Y
  /STATISTICS=MEAN SUM STDDEV MIN MAX.
```

Descriptives

Descriptive Statistics						
	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation
Kemandirian Daerah (X1)	5	9,17	18,10	65,06	13,0120	3,20960
Efektivitas Keuangan Daerah (X2)	5	105,07	122,02	565,34	113,0680	6,42519
Efisiensi Keuangan Daerah (X3)	5	80,61	99,35	453,38	90,6760	7,31918
Belanja Modal (Y)	5	164,39	336,09	1264,31	252,8620	61,29997
Valid N (listwise)	5					

Lampiran 4. Hasil Uji Asumsi Klasik

HASIL UJI ASUMSI KLASIK

NPAR TESTS

```

/K-S (NORMAL)=X1 X2 X3 Y
/STATISTICS DESCRIPTIVES
/MISSING ANALYSIS.

```

NPar Tests

Descriptive Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
Kemandirian Daerah (X1)	5	13,0120	3,20960	9,17	18,10
Efektivitas Keuangan Daerah (X2)	5	113,0680	6,42519	105,07	122,02
Efisiensi Keuangan Daerah (X3)	5	90,6760	7,31918	80,61	99,35
Belanja Modal (Y)	5	252,8620	61,29997	164,39	336,09

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Kemandirian Daerah (X1)	Efektivitas Keuangan Daerah (X2)	Efisiensi Keuangan Daerah (X3)	Belanja Modal (Y)
N	5	5	5	5
Normal Parameters ^{a,b}				
Mean	13,0120	113,0680	90,6760	252,8620
Std. Deviation	3,20960	6,42519	7,31918	61,29997
Absolute	,297	,186	,156	,256
Most Extreme Positive	,297	,186	,118	,204
Differences Negative	-,144	-,128	-,156	-,256
Kolmogorov-Smirnov Z	,663	,416	,350	,572
Asymp. Sig. (2-tailed)	,772	,995	1,000	,899

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

```

NPAR TESTS
  /K-S (NORMAL) =RES_1
  /MISSING ANALYSIS.

```

NPar Tests

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		5
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	6,53994134
	Absolute	,194
Most Extreme Differences	Positive	,178
	Negative	-,194
Kolmogorov-Smirnov Z		,435
Asymp. Sig. (2-tailed)		,992

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

```

REGRESSION
  /MISSING LISTWISE
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA COLLIN TOL
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
  /NOORIGIN
  /DEPENDENT Y
  /METHOD=ENTER X1 X2 X3.

```

Regression

Variables Entered/Removed ^a			
Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Efisiensi Keuangan Daerah (X3), Efektivitas Keuangan Daerah (X2), Kemandirian Daerah (X1) ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: Belanja Modal (Y)

b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,994 ^a	,989	,954	13,07988

a. Predictors: (Constant), Efisiensi Keuangan Daerah (X3), Efektivitas Keuangan Daerah (X2), Kemandirian Daerah (X1)

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	14859,661	3	4953,220	28,952	,136 ^b
Residual	171,083	1	171,083		
Total	15030,745	4			

a. Dependent Variable: Belanja Modal (Y)

b. Predictors: (Constant), Efisiensi Keuangan Daerah (X3), Efektivitas Keuangan Daerah (X2), Kemandirian Daerah (X1)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T
	B	Std. Error	Beta	
1 (Constant)	891,115	238,809		3,731
Kemandirian Daerah (X1)	12,161	5,692	,637	2,136
Efektivitas Keuangan Daerah (X2)	-15,016	2,468	-1,574	-6,084
Efisiensi Keuangan Daerah (X3)	9,941	3,769	1,187	2,637

Coefficients^a

Model	Sig.	Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
(Constant)	,167		
1 Kemandirian Daerah (X1)	,279	,128	7,804
Efektivitas Keuangan Daerah (X2)	,104	,170	5,880
Efisiensi Keuangan Daerah (X3)	,231	,156	7,796

a. Dependent Variable: Belanja Modal (Y)

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions		
				(Constant)	Kemandirian Daerah (X1)	Efektivitas Keuangan Daerah (X2)
1	1	3,950	1,000	,00	,00	,00
	2	,049	9,010	,00	,09	,00
	3	,001	75,640	,52	,11	,24
	4	,000	154,980	,48	,80	,76

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Variance Proportions	
		Efisiensi Keuangan Daerah (X3)	
1	1		,00
	2		,00
	3		,00
	4		1,00

a. Dependent Variable: Belanja Modal (Y)

```

REGRESSION
  /MISSING LISTWISE
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
  /NOORIGIN
  /DEPENDENT Y
  /METHOD=ENTER X1 X2 X3
  /RESIDUALS DURBIN.

```

Regression

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Efisiensi Keuangan Daerah (X3), Efektivitas Keuangan Daerah (X2), Kemandirian Daerah (X1) ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: Belanja Modal (Y)

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,994 ^a	,989	,954	13,07988	2,264

a. Predictors: (Constant), Efisiensi Keuangan Daerah (X3), Efektivitas Keuangan Daerah (X2), Kemandirian Daerah (X1)

b. Dependent Variable: Belanja Modal (Y)

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	14859,661	3	4953,220	28,952	,136 ^b
Residual	171,083	1	171,083		
Total	15030,745	4			

a. Dependent Variable: Belanja Modal (Y)

b. Predictors: (Constant), Efisiensi Keuangan Daerah (X3), Efektivitas Keuangan Daerah (X2), Kemandirian Daerah (X1)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	891,115	238,809		3,731	,167
Kemandirian Daerah (X1)	12,161	5,692	,637	2,136	,279
Efektivitas Keuangan Daerah (X2)	-15,016	2,468	-1,574	-6,084	,104
Efisiensi Keuangan Daerah (X3)	9,941	3,769	1,187	2,637	,231

a. Dependent Variable: ABS_RES

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	167,3688	334,7758	252,8620	60,95011	5
Residual	-9,75170	6,04036	,00000	6,53994	5
Std. Predicted Value	-1,403	1,344	,000	1,000	5
Std. Residual	-,746	,462	,000	,500	5

a. Dependent Variable: Belanja Modal (Y)

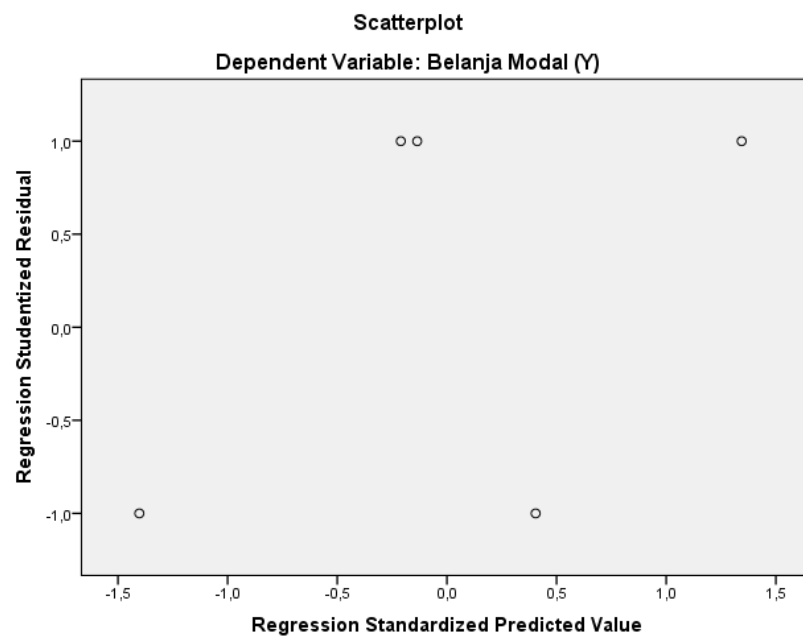
```

REGRESSION
  /MISSING LISTWISE
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
  /NOORIGIN
  /DEPENDENT Y
  /METHOD=ENTER X1 X2 X3
  /SCATTERPLOT=(*SRESID ,*ZPRED)
  /RESIDUALS NORMPROB(ZRESID) .

```

Regression

Charts



Lampiran 5. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

HASIL UJI REGRESI LINIER BERGANDA UJI F SIMULTAN & UJI t PARSIAL

```

REGRESSION
  /DESCRIPTIVES MEAN STDDEV CORR SIG N
  /MISSING LISTWISE
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA CHANGE
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
  /NOORIGIN
  /DEPENDENT Y
  /METHOD=ENTER X1 X2 X3
  /SCATTERPLOT=(*ZPRED ,Y)
  /RESIDUALS HISTOGRAM(ZRESID) NORMPROB(ZRESID) .

```

Regression

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Belanja Modal (Y)	252,8620	61,29997	5
Kemandirian Daerah (X1)	13,0120	3,20960	5
Efektivitas Keuangan Daerah (X2)	113,0680	6,42519	5
Efisiensi Keuangan Daerah (X3)	90,6760	7,31918	5

Correlations

	Belanja Modal (Y)	Kemandirian Daerah (X1)	Efektivitas Keuangan Daerah (X2)	Efisiensi Keuangan Daerah (X3)
Belanja Modal (Y)	1,000	,542	-,952	-,721
Kemandirian Daerah (X1)	,542	1,000	-,611	-,890
Pearson Efektivitas Keuangan Daerah (X2)	-,952	-,611	1,000	,852
Pearson Efisiensi Keuangan Daerah (X3)	-,721	-,890	,852	1,000
Sig. (1-tailed) Belanja Modal (Y)	.	,173	,006	,085

N	Kemandirian Daerah (X1)	,173	.	,137	,021
	Efektivitas Keuangan Daerah (X2)	,006	,137	.	,034
	Efisiensi Keuangan Daerah (X3)	,085	,021	,034	.
	Belanja Modal (Y)	5	5	5	5
	Kemandirian Daerah (X1)	5	5	5	5
	Efektivitas Keuangan Daerah (X2)	5	5	5	5
	Efisiensi Keuangan Daerah (X3)	5	5	5	5

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Efisiensi Keuangan Daerah (X3), Efektivitas Keuangan Daerah (X2), Kemandirian Daerah (X1) ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: Belanja Modal (Y)

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	,994 ^a	,989	,954	13,07988	,989	28,952	3 ^a	1	,136

a. Predictors: (Constant), Efisiensi Keuangan Daerah (X3), Efektivitas Keuangan Daerah (X2), Kemandirian Daerah (X1)

b. Dependent Variable: Belanja Modal (Y)

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	14859,661	3	4953,220	28,952	,136 ^b
Residual	171,083	1	171,083		
Total	15030,745	4			

a. Dependent Variable: Belanja Modal (Y)

b. Predictors: (Constant), Efisiensi Keuangan Daerah (X3), Efektivitas Keuangan Daerah (X2), Kemandirian Daerah (X1)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	891,115	238,809		3,731	,167
Kemandirian Daerah (X1)	12,161	5,692	,637	2,136	,279
Efektivitas Keuangan Daerah (X2)	-15,016	2,468	-1,574	-6,084	,104
Efisiensi Keuangan Daerah (X3)	9,941	3,769	1,187	2,637	,231

a. Dependent Variable: Belanja Modal (Y)

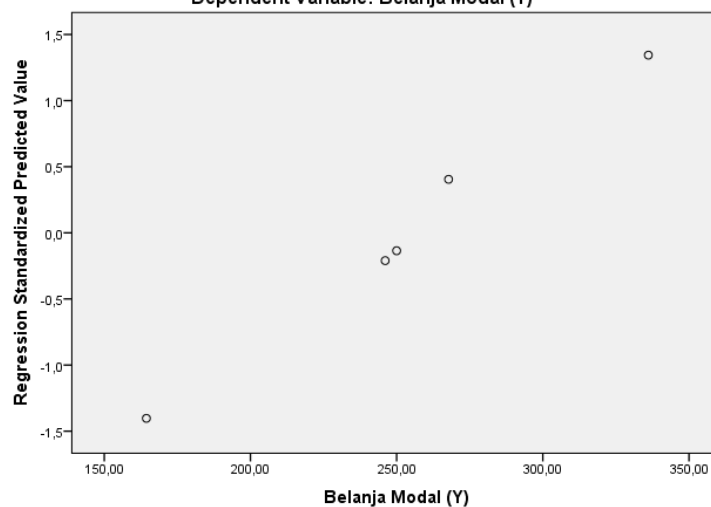
Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	167,3688	334,7758	252,8620	60,95011	5
Residual	-9,75170	6,04036	,00000	6,53994	5
Std. Predicted Value	-1,403	1,344	,000	1,000	5
Std. Residual	-,746	,462	,000	,500	5

a. Dependent Variable: Belanja Modal (Y)

Scatterplot

Dependent Variable: Belanja Modal (Y)



Lampiran 6. Nilai-nilai F tabel**NILAI-NILAI F tabel STATISTIK (0,05)**

V2=dk (Penyeb ut)	V1=dk (Pembilang)					
	1	2	3	4	5	6
1	199,500	199,500	215,707	224,583	230,162	233,986
2	19,000	19,000	19,164	19,247	19,296	19,330
3	9,552	9,552	9,277	9,117	9,013	8,941
4	6,944	6,944	6,591	6,388	6,256	6,163
5	5,786	5,786	5,409	5,192	5,050	4,950
6	5,143	5,143	4,757	4,534	4,387	4,284
7	4,737	4,737	4,347	4,120	3,972	3,866
8	4,459	4,459	4,066	3,838	3,687	3,581
9	4,256	4,256	3,863	3,633	3,482	3,374
10	4,103	4,103	3,708	3,478	3,326	3,217
11	3,982	3,982	3,587	3,357	3,204	3,095
12	3,885	3,885	3,490	3,259	3,106	2,996
13	3,806	3,806	3,411	3,179	3,025	2,915
14	3,739	3,739	3,344	3,112	2,958	2,848
15	3,682	3,682	3,287	3,056	2,901	2,790
16	3,634	3,634	3,239	3,007	2,852	2,741
17	3,592	3,592	3,197	2,965	2,810	2,699
18	3,555	3,555	3,160	2,928	2,773	2,661
19	3,522	3,522	3,127	2,895	2,740	2,628
20	3,493	3,493	3,098	2,866	2,711	2,599
21	3,467	3,467	3,072	2,840	2,685	2,573
22	3,443	3,443	3,049	2,817	2,661	2,549
23	3,422	3,422	3,028	2,796	2,640	2,528
24	3,403	3,403	3,009	2,776	2,621	2,508
25	3,385	3,385	2,991	2,759	2,603	2,490
26	3,369	3,369	2,975	2,743	2,587	2,474
27	3,354	3,354	2,960	2,728	2,572	2,459
28	3,340	3,340	2,947	2,714	2,558	2,445
29	3,328	3,328	2,934	2,701	2,545	2,432
30	3,316	3,316	2,922	2,690	2,534	2,421
31	3,305	3,305	2,911	2,679	2,523	2,409
32	3,295	3,295	2,901	2,668	2,512	2,399
33	3,285	3,285	2,892	2,659	2,503	2,389
34	3,276	3,276	2,883	2,650	2,494	2,380
35	3,267	3,267	2,874	2,641	2,485	2,372

V2=dk (Penyebut)	V1=dk (Pembilang)					
	1	2	3	4	5	6
36	3,259	3,259	2,866	2,634	2,477	2,364
37	3,252	3,252	2,859	2,626	2,470	2,356
38	3,245	3,245	2,852	2,619	2,463	2,349
39	3,238	3,238	2,845	2,612	2,456	2,342
40	3,232	3,232	2,839	2,606	2,449	2,336

Lampiran 7. Nilai-nilai dalam Distribusi t**NILAI-NILAI DALAM DISTRIBUSI t**

α untuk uji dua fihak (<i>two tail test</i>)						
	0,50	0,20	0,10	0,05	0,02	0,01
α untuk uji satu fihak (<i>one tail test</i>)						
dk	0,25	0,10	0,05	0,025	0,01	0,005
1	1,000	3,078	6,314	12,706	31,821	63,657
2	0,816	1,886	2,920	4,303	6,965	9,925
3	0,765	1,638	2,353	3,182	4,541	5,841
4	0,741	1,533	2,132	2,776	3,747	4,604
5	0,727	1,476	2,015	2,571	3,365	4,032
6	0,718	1,440	1,943	2,447	3,143	3,707
7	0,711	1,415	1,895	2,365	2,998	3,499
8	0,706	1,397	1,860	2,306	2,896	3,355
9	0,703	1,383	1,833	2,262	2,821	3,250
10	0,700	1,372	1,812	2,228	2,764	3,169
11	0,697	1,363	1,796	2,201	2,718	3,106
12	0,695	1,356	1,782	2,179	2,681	3,055
13	0,694	1,350	1,771	2,160	2,650	3,012
14	0,692	1,345	1,761	2,145	2,624	2,977
15	0,691	1,341	1,753	2,131	2,602	2,947
16	0,690	1,337	1,746	2,120	2,583	2,921
17	0,689	1,333	1,740	2,110	2,567	2,898
18	0,688	1,330	1,734	2,101	2,552	2,878
19	0,688	1,328	1,729	2,093	2,539	2,861
20	0,687	1,325	1,725	2,086	2,528	2,845
21	0,686	1,323	1,721	2,080	2,518	2,831
22	0,686	1,321	1,717	2,074	2,508	2,819
23	0,685	1,319	1,714	2,069	2,500	2,807
24	0,685	1,318	1,711	2,064	2,492	2,797
25	0,684	1,316	1,708	2,060	2,485	2,787
26	0,684	1,315	1,706	2,056	2,479	2,779
27	0,684	1,314	1,703	2,052	2,473	2,771
28	0,683	1,313	1,701	2,048	2,467	2,763
29	0,683	1,311	1,699	2,045	2,462	2,756
30	0,683	1,310	1,697	2,042	2,457	2,750
31	0,682	1,309	1,696	2,040	2,453	2,744
32	0,682	1,309	1,694	2,037	2,449	2,738
33	0,682	1,308	1,692	2,035	2,445	2,733
34	0,682	1,307	1,691	2,032	2,441	2,728
35	0,682	1,306	1,690	2,030	2,438	2,724

Lampiran 8. Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013-2017



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2013 DAN 2012
(Audited)

Dalam Rupiah (IDR)

NO URUT	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI 2012
1	PENDAPATAN	1.462.967.582.000.00	1.486.773.783.371.00	101.63	1.344.382.614.412.00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	117.177.974.000.00	136.362.281.618.00	116.37	97.951.207.914.00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	32.170.734.000.00	34.447.511.931.00	107.08	18.171.988.828.00
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	20.474.000.000.00	24.072.977.122.00	117.58	20.128.359.440.00
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan	9.903.248.000.00	9.903.250.709.00	100.00	9.716.177.698.00
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	54.629.992.000.00	67.938.541.856.00	124.36	49.934.681.948.00
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.304.452.293.000.00	1.309.426.926.613.00	100.38	1.202.791.086.756.00
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.033.469.834.000.00	1.029.201.574.058.00	99.59	965.594.442.210.00
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	29.087.677.000.00	32.869.676.240.00	113.00	43.667.707.891.00
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	1.552.909.000.00	1.400.331.818.00	90.17	1.894.482.319.00
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	931.426.998.000.00	931.426.998.000.00	100.00	827.163.222.000.00
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	71.402.250.000.00	63.504.568.000.00	88.94	92.869.030.000.00
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	211.556.562.000.00	211.556.562.000.00	100.00	179.101.037.000.00
1.2.2.1	Dana Penyesuaian	211.556.562.000.00	211.556.562.000.00	100.00	179.101.037.000.00
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	59.425.897.000.00	68.668.790.555.00	115.55	58.095.607.546.00
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	59.425.897.000.00	68.668.790.555.00	115.55	58.095.607.546.00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	41.337.315.000.00	40.984.575.140.00	99.15	43.640.319.742.00
1.3.1	Pendapatan Hibah	112.000.000.00	110.890.140.00	99.01	112.681.020.00
1.3.3	Pendapatan Lainnya	41.225.315.000.00	40.873.685.000.00	99.15	43.527.638.722.00
2	BELANJA	1.647.297.208.000.00	1.477.106.031.341.00	89.67	1.196.452.995.116.00
2.1	BELANJA OPERASI	1.320.560.897.845.00	1.226.418.323.542.00	92.87	1.066.847.634.986.00
2.1.1	Belanja Pegawai	948.521.333.500.00	873.645.960.310.00	92.11	811.271.781.318.00
2.1.2	Belanja Barang	239.063.395.345.00	226.379.906.337.00	94.69	160.462.511.042.00
2.1.3	Belanja Bunga	184.900.000.00	84.583.170.00	45.75	213.716.591.00
2.1.5	Belanja Hibah	49.154.697.000.00	44.882.857.000.00	91.31	26.946.382.000.00
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	16.033.000.000.00	15.584.850.000.00	97.20	12.948.250.000.00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	67.603.572.000.00	65.840.166.725.00	97.39	55.004.994.035.00
2.2	BELANJA MODAL	325.245.887.155.00	249.976.019.799.00	76.86	128.366.719.130.00
2.2.1	Belanja Tanah	4.567.872.064.00	480.450.000.00	10.52	-
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	51.784.375.983.00	23.069.134.678.00	44.55	21.108.445.737.00
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	140.917.968.508.00	111.638.926.821.00	79.22	53.538.114.240.00
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	119.806.898.200.00	114.366.487.840.00	95.46	50.303.551.669.00
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	8.168.772.400.00	421.020.460.00	5.15	431.901.484.00
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	-	-	-	2.984.706.000.00
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	1.490.423.000.00	711.688.000.00	47.75	1.238.641.000.00
2.3.1	Belanja Tak Terduga	1.490.423.000.00	711.688.000.00	47.75	1.238.641.000.00
2.4	TRANSFER	0.00	0.00	-	-
2.4.1	Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/DESA	0.00	0.00	0.00	0.00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(184.329.626.000.00)	9.667.752.030.00	(5.24)	147.929.619.296.00



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2013 DAN 2012
 (Audited)

Dalam Rupiah (IDR)

NO URUT	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI 2012
3	PEMBIAYAAN				
3.1	PENERIMAAN DAERAH	200.966.880.000.00	200.810.505.727.00	99.92	70.084.514.534.66
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	194.866.880.000.00	194.866.880.727.00	100.00	64.910.264.534.66
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	-
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	-
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	6.100.000.000.00	5.943.625.000.00	97.44	5.174.250.000.00
3.2	PENGELUARAN DAERAH	16.637.254.000.00	16.323.626.552.00	98.11	23.147.253.104.00
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	4.000.000.000.00	4.000.000.000.00	100.00	8.000.000.000.00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	6.660.000.000.00	6.660.000.000.00	100.00	10.170.000.000.00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	477.254.000.00	238.626.552.00	50.00	477.253.104.00
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	5.500.000.000.00	5.425.000.000.00	98.64	4.500.000.000.00
	PEMBIAYAAN NETTO	184.329.626.000.00	184.486.879.175.00	100.09	46.937.261.430.66
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0.00	194.154.631.205.00		194.866.880.726.66

Pemalang, 12 Mei 2014

BUPATI PEMALANG,

H. JUNAEDI, SH, MM

*Lihat catatan atas laporan keuangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan
dari laporan keuangan secara keseluruhan*



LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 13 TAHUN 2015
TANGGAL: 30 JULI 2015

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
(Audited)

Dalam Rupiah (IDR)

NO URUT	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI 2013
1	PENDAPATAN	1.652.375.217.000.00	1.687.338.257.907.00	102.12	1.486.773.783.371.00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	178.122.889.000.00	217.345.439.974.00	122.02	136.362.281.618.00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	37.590.000.000.00	37.315.308.607.00	99.27	34.447.511.931.00
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	19.206.616.000.00	21.419.433.463.00	111.52	24.072.977.122.00
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Diolsahkan	12.265.202.000.00	12.265.204.487.00	100.00	9.903.250.709.00
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	109.061.071.000.00	146.345.493.417.00	134.19	67.938.541.856.00
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.433.940.923.000.00	1.427.909.330.523.00	99.58	1.309.426.926.613.00
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.116.451.989.000.00	1.100.398.916.758.00	98.56	1.029.201.574.058.00
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	25.300.000.000.00	27.531.298.671.00	108.82	32.869.676.240.00
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	2.313.916.000.00	2.035.730.087.00	87.98	1.400.331.818.00
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	1.016.813.333.000.00	1.016.813.333.000.00	100.00	931.426.998.000.00
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	72.024.740.000.00	54.018.555.000.00	75.00	63.504.568.000.00
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	238.222.414.000.00	238.222.414.000.00	100.00	211.556.562.000.00
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	238.222.414.000.00	238.222.414.000.00	100.00	211.556.562.000.00
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	79.266.520.000.00	89.287.999.765.00	112.64	68.668.790.555.00
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	79.266.520.000.00	89.287.999.765.00	112.64	68.668.790.555.00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	40.311.405.000.00	42.083.487.410.00	104.40	40.984.575.140.00
1.3.1	Pendapatan Hibah	241.570.000.00	2.128.372.410.00	881.06	110.890.140.00
1.3.3	Pendapatan Lainnya	40.069.835.000.00	39.955.115.000.00	99.71	40.873.685.000.00
2	BELANJA	1.832.302.594.000.00	1.615.850.550.570.00	88.19	1.477.106.031.341.00
2.1	BELANJA OPERASI	1.584.769.419.839.00	1.451.058.045.125.00	91.56	1.226.418.323.542.00
2.1.1	Belanja Pegawai	1.077.546.755.920.00	993.381.464.925.00	92.19	873.645.960.310.00
2.1.2	Belanja Barang	311.573.672.580.00	277.126.956.583.00	88.94	226.379.906.337.00
2.1.3	Belanja Bunga	128.044.000.00	128.043.030.00	100.00	84.583.170.00
2.1.5	Belanja Hibah	84.492.368.339.00	73.092.995.400.00	86.51	44.882.857.000.00
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	25.231.165.000.00	24.088.652.800.00	95.47	15.584.850.000.00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	85.797.414.000.00	83.239.932.387.00	97.02	65.840.166.725.00
2.2	BELANJA MODAL	245.685.054.161.00	164.388.705.445.00	66.91	249.976.019.799.00
2.2.1	Belanja Tanah	3.223.275.000.00	617.976.800.00	19.17	480.450.000.00
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	74.272.057.543.00	34.472.891.767.00	46.41	23.069.134.678.00
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	69.755.286.302.00	53.470.647.929.00	76.65	111.638.926.821.00
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan	75.604.464.000.00	72.595.924.450.00	96.02	114.366.487.840.00
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	22.829.971.316.00	3.231.264.499.00	14.15	421.020.460.00
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	1.848.120.000.00	403.800.000.00	21.85	711.688.000.00
2.3.1	Belanja Tak Terduga	1.848.120.000.00	403.800.000.00	21.85	711.688.000.00
2.4	TRANSFER	0.00	0.00	-	-
2.4.1	Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/DESA	0.00	0.00	0.00	0.00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(179.927.377.000.00)	71.487.707.337.00	(39.73)	9.667.752.030.00

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
(Audited)

Dalam Rupiah (IDR)

NO URUT	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI 2013
3	PEMBIAYAAN				
3.1	PENERIMAAN DAERAH	200.054.631.000.00	198.887.631.205.00	99.42	200.810.505.727.00
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	194.154.631.000.00	194.154.631.205.00	100.00	194.866.880.727.00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.900.000.000.00	4.733.000.000.00	80.22	5.943.625.000.00
3.2	PENGELUARAN DAERAH	20.127.254.000.00	18.627.253.102.00	92.55	16.323.626.552.00
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	4.000.000.000.00	4.000.000.000.00	100.00	4.000.000.000.00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	10.150.000.000.00	10.150.000.000.00	100.00	6.660.000.000.00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	477.254.000.00	477.253.102.00	100.00	238.626.552.00
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	5.500.000.000.00	4.000.000.000.00	72.73	5.425.000.000.00
	PEMBIAYAAN NETTO	179.927.377.000.00	180.260.378.103.00	100.19	184.486.879.175.00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0.00	251.748.085.440.00		194.154.631.205.00

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 2015

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015 DAN 2014**
(Audited)

Dalam Rupiah (IDR)

NO URUT	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI 2014
1	PENDAPATAN - LRA	1.947.424.255.000,00	1.966.423.490.803,00	100,98	1.687.338.257.907,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	209.093.274.000,00	230.435.212.865,00	110,21	217.345.439.974,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	39.155.000.000,00	40.594.774.039,00	103,68	37.315.308.607,00
1.1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	22.486.883.000,00	21.685.600.023,00	96,44	21.419.433.463,00
1.1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LRA	13.746.968.000,00	13.746.971.117,00	100,00	12.265.204.487,00
1.1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah - LRA	133.704.423.000,00	154.407.867.686,00	115,48	146.345.493.417,00
1.2	PENDAPATAN TRANSFER - LRA	1.735.262.832.000,00	1.726.919.827.278,00	99,52	1.467.864.445.523,00
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	1.210.668.734.000,00	1.201.017.714.717,00	99,20	1.100.398.916.758,00
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak - LRA	38.863.386.000,00	30.089.602.027,00	77,42	27.531.298.671,00
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam - LRA	2.205.828.000,00	1.328.592.690,00	60,23	2.035.730.087,00
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	1.058.982.530.000,00	1.058.982.530.000,00	100,00	1.016.813.333.000,00
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	110.616.990.000,00	110.616.990.000,00	100,00	54.018.555.000,00
1.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LRA	362.578.932.000,00	362.578.932.000,00	100,00	238.222.414.000,00
1.2.2.1	Dana Penyesuaian - LRA	362.578.932.000,00	362.578.932.000,00	100,00	238.222.414.000,00
1.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	117.578.117.000,00	121.474.565.561,00	103,31	89.287.999.765,00
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	117.578.117.000,00	121.474.565.561,00	103,31	89.287.999.765,00
1.2.4	Bantuan Keuangan - LRA	44.437.049.000,00	41.848.615.000,00	94,18	39.955.115.000,00
1.2.4.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi - LRA	44.437.049.000,00	41.848.615.000,00	94,18	39.955.115.000,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	3.068.149.000,00	9.068.450.660,00	295,57	2.128.372.410,00
1.3.1	Pendapatan Hibah - LRA	3.068.149.000,00	9.068.450.660,00	295,57	2.128.372.410,00
1.3.3	Pendapatan Lainnya - LRA	0,00	0,00		
2	BELANJA	2.017.362.915.000,00	1.777.978.292.423,00	88,13	1.532.610.618.183,00
2.1	BELANJA OPERASI	1.669.932.288.580,00	1.509.917.813.260,00	90,42	1.367.818.112.738,00
2.1.1	Belanja Pegawai	1.181.023.647.004,00	1.067.255.389.374,00	90,37	993.381.464.925,00
2.1.2	Belanja Barang	368.294.644.757,00	328.610.279.346,00	89,22	277.126.956.583,00
2.1.3	Belanja Bunga	71.187.000,00	71.186.939,00	100,00	128.043.030,00
2.1.4	Belanja Hibah	117.787.674.819,00	111.268.805.501,00	94,47	73.092.995.400,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	2.755.135.000,00	2.712.152.100,00	98,44	24.088.652.800,00
2.2	BELANJA MODAL	345.430.626.420,00	267.766.979.163,00	77,52	164.388.705.445,00
2.2.1	Belanja Tanah	920.000.000,00	714.200.000,00	77,63	617.976.800,00
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	89.301.057.056,00	47.082.570.184,00	52,72	34.472.891.767,00
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	66.799.733.389,00	54.633.025.274,00	81,79	53.470.647.929,00
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	176.253.720.850,00	162.916.674.430,00	92,43	72.595.924.450,00
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	12.156.115.125,00	2.420.509.275,00	19,91	3.231.264.499,00
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	2.000.000.000,00	293.500.000,00	14,68	403.800.000,00
2.3.1	Belanja Tak Terduga	2.000.000.000,00	293.500.000,00	14,68	403.800.000,00
3	TRANSFER	183.172.171.000,00	180.590.445.642,00	98,59	83.239.932.387,00
3.1	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	5.873.475.000,00	3.684.035.643,00	62,72	-
3.1.1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	5.873.475.000,00	3.684.035.643,00	62,72	
3.2	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	177.298.696.000,00	176.906.409.999,00	99,78	83.239.932.387,00
3.2.2	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	176.221.842.000,00	176.221.842.000,00	100,00	82.437.881.225,00
3.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	1.076.854.000,00	684.567.999,00	63,57	802.051.162,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(253.110.831.000,00)	7.854.752.738,00		71.487.707.337,00

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015 DAN 2014
(Audited)

Dalam Rupiah (IDR)

NO URUT	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI 2014
4	PEMBIAYAAN				
4.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	272.148.085.000,00	272.482.085.440,00	100,12	198.867.631.205,00
4.1.1	Penggunaan SILPA	251.748.085.000,00	251.748.085.440,00	100,00	194.154.631.205,00
4.1.2	Pencairan Dana Cadangan	16.000.000.000,00	16.000.000.000,00	100,00	-
4.1.3	Penerimaan Kembali Piutang	4.400.000.000,00	4.734.000.000,00	107,59	4.733.000.000,00
4.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	19.037.254.000,00	18.862.253.102,00	99,08	18.627.253.102,00
4.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00		4.000.000.000,00
4.2.2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	14.560.000.000,00	14.560.000.000,00	100,00	10.150.000.000,00
4.2.3	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	477.254.000,00	477.253.102,00	100,00	477.253.102,00
4.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	4.000.000.000,00	3.825.000.000,00	95,63	4.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	253.110.831.000,00	253.619.832.338,00	100,20	180.260.378.103,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	261.474.585.076,00		251.748.085.440,00

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2016

KABUPATEN PEMALANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Audited)

Dalam Rupiah (IDR)						
NO URUT	URAIAN	REF	ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI 2015
4	PENDAPATAN - LRA	5.1.1	2.264.674.144.000,00	2.112.514.280.374,00	93,28	1.966.423.490.803,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	5.1.1.1	246.679.817.000,00	275.458.054.016,00	111,67	230.435.212.865,00
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	5.1.1.1.1	41.440.000.000,00	45.544.391.390,00	109,90	40.594.774.039,00
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	5.1.1.1.2	23.272.528.000,00	26.074.275.115,00	112,04	21.685.600.023,00
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LRA	5.1.1.1.3	37.153.817.000,00	37.153.819.470,00	100,00	13.746.971.117,00
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah - LRA	5.1.1.1.4	144.813.472.000,00	166.685.568.041,00	115,10	154.407.867.686,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER - LRA	5.1.1.2	2.008.919.172.000,00	1.828.008.148.518,00	90,99	1.726.919.827.278,00
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	5.1.1.2.1	1.658.120.676.000,00	1.507.813.090.093,00	90,94	1.201.017.714.717,00
4.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak - LRA	5.1.1.2.1.1	36.013.448.000,00	38.025.063.794,00	105,59	30.089.602.027,00
4.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam - LRA	5.1.1.2.1.2	1.979.863.000,00	1.444.850.091,00	72,98	1.328.592.690,00
4.2.1.3	Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	5.1.1.2.1.3	1.197.916.501.000,00	1.197.916.501.000,00	100,00	1.058.982.530.000,00
4.2.1.4	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	5.1.1.2.1.4	422.210.864.000,00	270.426.675.208,00	64,05	110.616.990.000,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LRA	5.1.1.2.2	149.607.350.000,00	149.607.350.000,00	100,00	362.578.932.000,00
4.2.2.3	Dana Penyesuaian - LRA	5.1.1.2.2.3	149.607.350.000,00	149.607.350.000,00	100,00	362.578.932.000,00
4.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	5.1.1.2.3	149.849.646.000,00	120.896.166.425,00	80,68	121.474.565.561,00
4.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	5.1.1.2.3.1	149.849.646.000,00	120.896.166.425,00	80,68	121.474.565.561,00
4.2.4	Bantuan Keuangan - LRA	5.1.1.2.4	51.341.500.000,00	49.691.542.000,00	96,79	41.848.615.000,00
4.2.4.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi - LRA	5.1.1.2.4.1	51.341.500.000,00	49.691.542.000,00	96,79	41.848.615.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	5.1.1.3	9.075.155.000,00	9.048.077.840,00	99,70	9.068.450.660,00
4.3.1	Pendapatan Hibah - LRA	5.1.1.3.1	9.075.155.000,00	9.048.077.840,00	99,70	9.068.450.660,00
4.3.3	Pendapatan Lainnya - LRA	5.1.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00
5	BELANJA	5.1.2	2.157.722.824.000,00	1.843.048.079.592,00	85,42	1.777.978.292.423,00
5.1	BELANJA OPERASI	5.1.2.1	1.811.561.575.920,00	1.596.367.882.331,00	88,12	1.509.917.813.260,00
5.1.1	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	1.287.657.416.300,00	1.133.211.267.192,00	88,01	1.067.255.389.374,00
5.1.2	Belanja Barang	5.1.2.1.2	466.188.130.620,00	410.135.051.496,00	87,98	328.610.279.346,00
5.1.3	Belanja Bunga	5.1.2.1.3	71.187.000,00	14.330.850,00	20,13	71.186.939,00
5.1.5	Belanja Hibah	5.1.2.1.4	51.427.877.000,00	47.030.617.043,00	91,45	111.268.805.501,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.5	6.216.965.000,00	5.976.615.750,00	96,13	2.712.152.100,00
5.2	BELANJA MODAL	5.1.2.2	345.161.248.080,00	246.080.497.261,00	71,29	267.766.979.163,00
5.2.1	Belanja Tanah	5.1.2.2.1	2.372.300.000,00	1.392.393.450,00	58,69	714.200.000,00
5.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	113.483.788.974,00	61.826.740.863,00	54,48	47.082.570.184,00
5.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	5.1.2.2.3	106.559.466.353,00	88.997.526.329,00	83,52	54.633.025.274,00
5.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.4	97.822.653.000,00	85.302.120.264,00	87,20	162.916.674.430,00
5.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	24.923.039.753,00	8.561.716.355,00	34,35	2.420.509.275,00
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	5.1.2.3	1.000.000.000,00	599.700.000,00	59,97	293.500.000,00
5.3.1	Belanja Tak Terduga	5.1.2.3.1	1.000.000.000,00	599.700.000,00	59,97	293.500.000,00
6	TRANSFER	5.1.3	324.733.651.000,00	320.088.656.371,00	98,57	180.590.445.642,00
6.1	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	5.1.3.1	6.503.188.000,00	4.256.365.204,00	65,45	3.684.035.643,00
6.1.1	Bagi Hasil Pajak	5.1.3.1.1	4.144.000.000,00	3.731.531.001,00	90,05	3.684.035.643,00
6.1.2	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	5.1.3.1.2	2.359.188.000,00	524.834.203,00	22,25	
6.2	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	5.1.3.2	318.230.463.000,00	315.832.291.167,00	99,25	176.906.409.999,00
6.2.2	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	5.1.3.2.1	317.096.704.000,00	315.141.062.840,00	99,38	176.221.842.000,00
6.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	5.1.3.2.2	1.133.759.000,00	691.228.327,00	60,97	684.567.999,00

KABUPATEN PEMALANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Audited)

Dalam Rupiah (IDR)

NO URUT	URAIAN	REF	ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI 2015
	SURPLUS / (DEFISIT)		(217.782.331.000,00)	(50.622.455.589,00)	23,24	7.854.752.738,00

KABUPATEN PEMALANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Audited)

Dalam Rupiah (IDR)

NO URUT	URAIAN	REF	ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI 2015
7	PEMBIAYAAN	5.1.4				
7.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.4.1	265.874.585.000,00	264.942.785.076,00	99,65	272.482.085.440,00
7.1.1	Penggunaan SILPA	5.1.4.1.1	261.474.585.000,00	261.474.585.076,00	100,00	251.748.085.440,00
7.1.2	Pencairan Dana Cadangan	5.1.4.1.2	0,00	0,00	0,00	16.000.000.000,00
7.1.5	Penerimaan Kembali Piutang	5.1.4.1.3	4.400.000.000,00	3.468.200.000,00	78,82	4.734.000.000,00
7.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.4.2	48.092.254.000,00	47.853.626.551,00	99,50	18.862.253.102,00
7.2.1	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	5.1.4.2.1	43.615.000.000,00	43.615.000.000,00	100,00	14.560.000.000,00
7.2.3	Pembayaran Pokok Pinjaman	5.1.4.2.2	477.254.000,00	238.626.551,00	50,00	477.253.102,00
7.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	5.1.4.2.3	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100,00	3.825.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO		217.782.331.000,00	217.089.158.525,00	99,68	253.619.832.338,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		0,00	166.466.702.936,00		261.474.585.076,00

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI


PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 2017

KABUPATEN PEMALANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 DAN 2016
(Audited)

Dalam Rupiah (IDR)						
NO URUT	URAIAN	REF	ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI 2016
4	PENDAPATAN - LRA	5.1.1	2.366.403.484.000,00	2.353.030.274.957,00	99,43	2.112.514.280.374,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	5.1.1.1	405.333.931.000,00	425.893.266.850,00	105,07	275.458.054.016,00
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	5.1.1.1.1	54.232.000.000,00	64.270.887.023,00	118,51	45.544.391.390,00
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	5.1.1.1.2	25.737.744.000,00	27.884.961.093,00	108,34	26.074.275.115,00
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kelayaan Daerah Yang Dipisahkan - LRA	5.1.1.1.3	15.471.277.000,00	15.471.278.657,00	100,00	37.153.819.470,00
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah - LRA	5.1.1.1.4	309.892.910.000,00	318.266.140.077,00	102,70	166.685.568.041,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER - LRA	5.1.1.2	1.962.009.553.000,00	1.918.137.008.107,00	98,26	1.528.008.148.518,00
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	5.1.1.2.1	1.599.147.048.000,00	1.554.319.330.524,00	97,20	1.507.813.090.093,00
4.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak - LRA	5.1.1.2.1.1	38.032.765.000,00	32.090.565.423,00	84,38	38.025.063.794,00
4.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam - LRA	5.1.1.2.1.2	2.558.592.000,00	1.825.078.703,00	71,33	1.444.850.091,00
4.2.1.3	Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	5.1.1.2.1.3	1.197.916.501.000,00	1.176.872.960.000,00	98,24	1.197.916.501.000,00
4.2.1.4	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	5.1.1.2.1.4	360.639.190.000,00	343.530.726.398,00	95,26	270.426.675.208,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LRA	5.1.1.2.2	191.002.083.000,00	191.002.083.000,00	100,00	149.607.350.000,00
4.2.2.3	Dana Penyesuaian - LRA	5.1.1.2.2.1	191.002.083.000,00	191.002.083.000,00	100,00	149.607.350.000,00
4.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	5.1.1.2.3	124.737.092.000,00	142.831.010.535,00	114,51	120.896.166.425,00
4.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	5.1.1.2.3.1	124.737.092.000,00	142.831.010.535,00	114,51	120.896.166.425,00
4.2.4	Bantuan Keuangan - LRA	5.1.1.2.4	37.123.330.000,00	29.984.584.048,00	80,77	49.691.542.000,00
4.2.4.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi - LRA	5.1.1.2.4.1	37.123.330.000,00	29.984.584.048,00	80,77	49.691.542.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	5.1.1.3	9.060.000.000,00	9.000.000.000,00	99,34	9.048.077.840,00
4.3.1	Pendapatan Hibah - LRA	5.1.1.3.1	9.060.000.000,00	9.000.000.000,00	99,34	9.048.077.840,00
4.3.3	Pendapatan Lainnya - LRA		0,00	0,00	0,00	0,00
5	BELANJA	5.1.2	2.135.329.325.000,00	1.896.830.515.438,00	88,83	1.843.048.079.592,00
5.1	BELANJA OPERASI	5.1.2.1	1.681.057.008.286,00	1.558.479.332.453,00	92,71	1.596.367.882.331,00
5.1.1	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	1.146.460.316.908,00	1.075.327.539.055,00	93,80	1.133.211.267.192,00
5.1.2	Belanja Barang	5.1.2.1.2	508.601.291.378,00	457.928.343.398,00	90,04	410.135.051.496,00
5.1.3	Belanja Bunga	5.1.2.1.3	0,00	0,00	0,00	14.330.850,00
5.1.5	Belanja Hibah	5.1.2.1.4	22.990.400.000,00	22.684.800.000,00	98,67	47.030.617.043,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.5	3.005.000.000,00	2.538.650.000,00	84,48	5.976.615.750,00
5.2	BELANJA MODAL	5.1.2.2	451.272.316.714,00	336.088.968.940,00	74,48	246.080.497.261,00
5.2.1	Belanja Tanah	5.1.2.2.1	12.550.000.000,00	11.884.647.920,00	94,70	1.392.393.450,00
5.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	75.378.348.240,00	57.680.231.826,00	76,52	61.826.740.863,00
5.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	5.1.2.2.3	214.105.987.974,00	144.210.358.951,00	67,35	88.997.526.329,00
5.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.4	109.657.397.500,00	94.178.467.430,00	85,88	85.302.120.264,00
5.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	39.580.583.000,00	28.135.262.813,00	71,08	8.561.716.355,00
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	5.1.2.3	3.000.000.000,00	2.262.214.045,00	75,41	599.700.000,00
5.3.1	Belanja Tak Terduga	5.1.2.3.1	3.000.000.000,00	2.262.214.045,00	75,41	599.700.000,00
6	TRANSFER	5.1.3	366.915.221.000,00	361.509.357.482,00	98,53	320.088.656.371,00
6.1	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	5.1.3.1	7.996.975.000,00	7.128.202.482,00	89,14	4.256.365.204,00
6.1.1	Bagi Hasil Pajak Daerah	5.1.3.1.1	5.423.200.000,00	4.554.438.977,00	83,98	3.731.531.001,00
6.1.2	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	5.1.3.1.2	2.573.775.000,00	2.573.763.505,00	100,00	524.834.203,00
6.2	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	5.1.3.2	358.918.246.000,00	354.381.155.000,00	98,74	315.832.291.167,00
6.2.2	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	5.1.3.2.1	358.009.082.000,00	353.471.993.000,00	98,73	315.141.062.840,00
6.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	5.1.3.2.2	909.164.000,00	909.162.000,00	100,00	691.228.327,00
SURPLUS / (DEFISIT)			(135.841.062.000,00)	94.690.402.037,00	(69,71)	(50.622.455.589,00)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 DAN 2016
 (Audited)

NO URUT	URAIAN	REF	ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI 2016
7	PEMBIAYAAN	5.1.4				
7.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.4.1	170.841.062.000,00	166.750.302.936,00	97,61	264.942.785.076,00
7.1.1	Penggunaan SILPA	5.1.4.1.1	166.441.062.000,00	166.466.702.936,00	100,02	261.474.585.076,00
7.1.2	Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.3	Penerimaan Kembali Pinjaman	5.1.4.1.2	4.400.000.000,00	283.600.000,00	6,45	3.468.200.000,00
7.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.4.2	35.000.000.000,00	31.000.000.000,00	88,57	47.893.626.551,00
7.2.1	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	5.1.4.2.1	31.000.000.000,00	31.000.000.000,00	100,00	43.613.000.000,00
7.2.3	Pembayaran Pokok Pinjaman	5.1.4.2.2	0,00	0,00	0,00	238.626.551,00
7.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	5.1.4.2.3	4.000.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO		135.841.062.000,00	135.750.302.936,00	99,93	217.089.158.525,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		0,00	230.440.704.973,00		166.466.702.936,00


 BUPATI PEMALANG,
 JUNAEDI

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2013

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		SETELAH	BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM		
		3	4		(Rp)	%			
4	PENDAPATAN	1.353.366.632.000,00	1.462.967.582.000,00	4	5 = 4 - 3	6	7		
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	92.422.000.000,00	117.177.974.000,00		109.606.950.000,00	8,10			
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	29.984.000.000,00	32.170.734.000,00		24.755.974.000,00	26,79			
4.1.1.01	Pajak Hotel	175.000.000,00	180.000.000,00		5.000.000,00	2,86			
4.1.1.01.09	Hotel Melati Satu	175.000.000,00	180.000.000,00		5.000.000,00	2,86	Penda Kab.Pemalang No.1 Tahun 2012		
4.1.1.02	Pajak Restoran	290.000.000,00	300.000.000,00		10.000.000,00	3,45			
4.1.1.02.01	Restoran	290.000.000,00	300.000.000,00		10.000.000,00	3,45	Penda Kab.Pemalang No.1 Tahun 2012		
4.1.1.03	Pajak Hiburan	34.000.000,00	34.000.000,00		0,00	0,00			
4.1.1.03.01	Tontonan Film/Bioskop	34.000.000,00	34.000.000,00		0,00	0,00	Penda Kab.Pemalang No.1 Tahun 2012		
4.1.1.04	Pajak Reklame	390.000.000,00	750.000.000,00		360.000.000,00	92,31			
4.1.1.04.01	Reklame Papan/Bill Board/Video/ve/ megatron	390.000.000,00	750.000.000,00		360.000.000,00	92,31	Penda Kab.Pemalang No.1 Tahun 2012		
4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	13.750.000.000,00	15.000.000.000,00		1.250.000.000,00	9,09			
4.1.1.05.01	Pajak Penerangan Jalan PLN	13.750.000.000,00	15.000.000.000,00		1.250.000.000,00	9,09	Penda Kab.Pemalang No.1 Tahun 2012		
4.1.1.06	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	120.000.000,00	120.000.000,00		0,00	0,00			
4.1.1.06.23	Pasir dan Kerikil	120.000.000,00	120.000.000,00		0,00	0,00	Penda Kab.Pemalang No.1 Tahun 2012		
4.1.1.07	Pajak Parkir	15.000.000,00	15.000.000,00		0,00	0,00			
4.1.1.07.01	Pajak Parkir	15.000.000,00	15.000.000,00		0,00	0,00	Penda Kab.Pemalang No.1 Tahun 2012		
4.1.1.08	Pajak Air Bawah Tanah	90.000.000,00	90.000.000,00		0,00	0,00			
4.1.1.08.01	Pajak Air Bawah Tanah	90.000.000,00	90.000.000,00		0,00	0,00	Penda Kab.Pemalang No.1 Tahun 2012		
4.1.1.09	Pajak Sising Burung Walet	120.000.000,00	50.000.000,00		(70.000.000,00)	(58,33)			
4.1.1.09.01	Pajak Sising Burung Walet	120.000.000,00	50.000.000,00		(70.000.000,00)	(58,33)	Penda Kab.Pemalang No.1 Tahun 2012		
4.1.1.11	Pajak Pemeliharaan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.900.000.000,00	2.531.734.000,00		631.734.000,00	33,25			
4.1.1.11.01	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.900.000.000,00	2.531.734.000,00		631.734.000,00	33,25	Penda Kab.Pemalang No.1 Tahun 2012		
4.1.1.12	Pajak Bumi dan Bangunan	13.100.000.000,00	13.100.000.000,00		0,00	0,00			

RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Halaman

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SETELAH	5 = 4 - 3 (Rp)	6 %	
1	2	3	4			7
4.1.1.1.12.01	Pajak Bumi dan Bangunan	13.100.000.000,00	13.100.000.000,00	0,00	0,00	Penda Kab. Pemaling No.1 Tahun 2012
4.1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	18.849.500.000,00	20.474.000.000,00	1.624.500.000,00	8,62	
4.1.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	12.912.255.000,00	13.960.755.000,00	1.048.500.000,00	8,12	
4.1.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Keperawatan	6.250.000.000,00	7.000.000.000,00	750.000.000,00	12,00	Penda Kab. Pemaling No. 3 Th 2012
4.1.1.2.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.056.755.000,00	1.101.755.000,00	45.000.000,00	4,26	Penda Kab. Pemaling No. 3 Th 2012
4.1.1.2.01.03	Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil	325.000.000,00	431.000.000,00	106.000.000,00	32,62	Penda Kab. Pemaling No. 3 Th 2012
4.1.1.2.01.04	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Penda Kab. Pemaling No. 3 Th 2012
4.1.1.2.01.05	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	865.500.000,00	865.000.000,00	(500.000,00)	(0,06)	Penda Kab. Pemaling No. 3 Th 2012
4.1.1.2.01.06	Retribusi Pelayanan Pasar	3.709.000.000,00	3.828.000.000,00	119.000.000,00	3,21	Penda Kab. Pemaling No. 3 Th 2012
4.1.1.2.01.07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	205.000.000,00	205.000.000,00	0,00	0,00	Penda Kab. Pemaling No. 3 Th 2012
4.1.1.2.01.15	Retribusi pengendalian sarana telekomunikasi	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	Penda Kab. Pemaling No. 3 Th 2012
4.1.1.2.01.16	Retribusi Penyediaan dan/atau penyediaan kakus	0,00	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	Penda Kab. Pemaling No. 3 Th 2012
4.1.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	4.812.245.000,00	4.888.245.000,00	76.000.000,00	1,58	Penda Kab. Pemaling No. 03 Tahun 2012
4.1.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kelayakan Daerah	422.500.000,00	412.500.000,00	(10.000.000,00)	(2,37)	Penda Kab. Pemaling No. 2 Th 2012
4.1.1.2.02.02	Retribusi Jasa Usaha Pasar Groat/Pertokoan	282.000.000,00	297.000.000,00	15.000.000,00	5,32	Penda Kab. Pemaling No. 2 Th 2012
4.1.1.2.02.03	Retribusi Tempat Pedalangan	986.500.000,00	1.038.500.000,00	50.000.000,00	5,07	Penda Kab. Pemaling No. 2 Th 2012
4.1.1.2.02.04	Retribusi Jasa Usaha Terminal	218.000.000,00	218.000.000,00	0,00	0,00	Penda Kab. Pemaling No. 2 Th 2012
4.1.1.2.02.06	Retribusi Tempat Penginapan/Pesangrahan/Villa	10.250.000,00	10.250.000,00	0,00	0,00	Penda Kab. Pemaling No. 2 Th 2012
4.1.1.2.02.07	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyediaan Kakus	29.000.000,00	0,00	(29.000.000,00)	(100,00)	Penda Kab. Pemaling No. 2 Th 2012
4.1.1.2.02.08	Retribusi Rumah Potong Hewan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Penda Kab. Pemaling No. 2 Th 2012
4.1.1.2.02.10	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	2.813.995.000,00	2.863.995.000,00	50.000.000,00	1,78	Penda Kab. Pemaling No. 2 Th 2012
4.1.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.125.000.000,00	1.625.000.000,00	500.000.000,00	44,44	
4.1.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	644.000.000,00	725.000.000,00	81.000.000,00	12,58	Penda Kab. Pemaling No. 4 Th 2012
4.1.1.2.03.03	Retribusi Izin Ganguan/Keramaian	0,00	66.923.000,00	66.923.000,00	0,00	Penda Kab. Pemaling No. 4 Th 2012
4.1.1.2.03.04	Retribusi Izin Trayek	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Penda Kab. Pemaling No. 4 Th 2012
4.1.1.2.03.05	Retribusi Izin Usaha Perikanan	6.000.000,00	8.000.000,00	2.000.000,00	33,33	Penda Kab. Pemaling No. 4 Th 2012
4.1.1.2.03.13	Retribusi Tempat Usaha	450.000.000,00	800.077.000,00	350.077.000,00	77,79	Penda Kab. Pemaling No. 4 Th 2012
4.1.1.3	Hasil Pengelolaan Kelayakan Daerah yang Dipisahkan	8.226.000.000,00	9.903.248.000,00	1.677.248.000,00	20,39	
4.1.1.3.01	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah (BUMD)	2.310.000.000,00	2.394.633.000,00	84.633.000,00	4,11	
4.1.1.3.01.01	Perusahaan Daerah Air Minum	2.000.000.000,00	2.078.641.000,00	78.641.000,00	3,93	
4.1.1.3.01.02	Perusahaan Daerah Bank Pasar	300.000.000,00	315.992.000,00	15.992.000,00	5,33	
4.1.1.3.02	Bagian Laba Lembaga Keuangan Bank	5926.000.000,00	7.506.615.000,00	1.580.615.000,00	26,71	
4.1.1.3.02.01	Bank Pembangunan Daerah	4.950.000.000,00	6.388.522.000,00	1.438.522.000,00	29,06	
4.1.1.3.02.02	Bank Kredit Kecamatan	976.000.000,00	1.120.093.000,00	144.093.000,00	14,76	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
		SEBELUM	SETELAH			
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	35.362.500.000,00	54.629.992.000,00	19.267.492.000,00	54,49	
4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	3.600.000.000,00	133.762.000,00	(3.466.238.000,00)	(96,28)	
4.1.4.01.01	Pelepasan Hak Atas Tanah dan Bangunan	3.572.000.000,00	0,00	(3.572.000.000,00)	(100,00)	
4.1.4.01.02	Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor tidak terpakai	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.01.05	Penjualan Kendaraan Dinas roda dua	5.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
4.1.4.01.06	Penjualan Kendaraan Dinas roda empat	10.000.000,00	50.000.000,00	40.000.000,00	400,00	
4.1.4.01.10	Penjualan bahan-bahan Bekas Bangunan	10.000.000,00	70.762.000,00	60.762.000,00	607,62	
4.1.4.02	Penerimaan Jasa Giro	930.000.000,00	2.036.682.000,00	1.106.682.000,00	119,00	
4.1.4.02.01	Jasa Giro Kas Daerah	750.000.000,00	1.856.682.000,00	1.106.682.000,00	147,56	
4.1.4.02.02	Jasa Giro Pemegang Kas/Bendahara	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.03	Penerimaan Bunga	4.387.500.000,00	8.672.500.000,00	4.285.000.000,00	97,66	
4.1.4.03.01	Rekening Deposito pada Bank	4.172.500.000,00	8.497.500.000,00	4.325.000.000,00	103,65	
4.1.4.03.02	Pendapatan Bunga Pinjaman	215.000.000,00	175.000.000,00	(40.000.000,00)	(18,60)	
4.1.4.04	Turunan Sanksi Kerugian Daerah (TKR)	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	
4.1.4.04.02	Kerugian Barang Daerah	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	
4.1.4.06	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	70.107.000,00	70.107.000,00	0,00	
4.1.4.06.01	Bidang Pendidikan	0,00	56.799.000,00	56.799.000,00	0,00	
4.1.4.06.03	Denda Keterlambatan Bidang Otonomi Daerah,	0,00	12.327.000,00	12.327.000,00	0,00	
4.1.4.06.11	Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangia	0,00	981.000,00	981.000,00	0,00	
4.1.4.08	Pendapatan Denda Retribusi	245.000.000,00	370.000.000,00	125.000.000,00	51,02	
4.1.4.08.01	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	245.000.000,00	370.000.000,00	125.000.000,00	51,02	
4.1.4.09	Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan	0,00	856.408.000,00	856.408.000,00	0,00	
4.1.4.09.01	Hasil Eksekusi Jaminan atas Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	856.408.000,00	856.408.000,00	0,00	
4.1.4.10	Pendapatan Dari Pengembalian	0,00	243.273.000,00	243.273.000,00	0,00	
4.1.4.10.03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran Gaji dan Tunjangan	0,00	138.358.000,00	138.358.000,00	0,00	
4.1.4.10.04	Pendapatan dari pengembalian Non CP/Hasil Laporan Perijinan Dinas	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	
4.1.4.10.06	Pendapatan dari pengembalian Non CP/Hasil Laporan Hasil Pemeriksaan	0,00	76.153.000,00	76.153.000,00	0,00	
4.1.4.10.07	Pendapatan dari Pengembalian Kltm Asuransi	0,00	9.162.000,00	9.162.000,00	0,00	
4.1.4.10.08	Pendapatan dari Pengembalian Sisa Dana Hibah / Bantuan	0,00	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	
4.1.4.14	Penerimaan Lain-Lain	0,00	7.960.000,00	7.960.000,00	0,00	
4.1.4.14.01	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	0,00	7.960.000,00	7.960.000,00	0,00	

RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OPREK PENGUPATAN, BELAKAU DAN PERBAYARAN

Halaman

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SETELAH	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	40.141.000.000,00	59.425.897.000,00	19.284.897.000,00	48,04	
4.3.3.01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	40.141.000.000,00	59.425.897.000,00	19.284.897.000,00	48,04	
4.3.3.01.01	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	12.100.000.000,00	15.432.160.000,00	3.332.160.000,00	27,54	
4.3.3.01.03	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	14.500.000.000,00	21.279.597.000,00	6.779.597.000,00	46,76	
4.3.3.01.05	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	13.400.000.000,00	18.121.827.000,00	4.721.827.000,00	35,24	
4.3.3.01.07	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemakaian Air Permukaan	31.000.000,00	64.714.000,00	33.714.000,00	108,75	
4.3.3.01.08	Bagi Hasil dari Retribusi Pelayanan Terra/ Terra Ulang	15.000.000,00	43.679.000,00	28.679.000,00	191,19	
4.3.3.01.10	Bagi Hasil dari Penerimaan Cukai Hasil Tembakau	0,00	4.391.904.000,00	4.391.904.000,00	0,00	
4.3.3.01.11	Bagi Hasil dari Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga (SP3 / Perhutani)	95.000.000,00	90.484.000,00	(4.516.000,00)	(4,75)	
4.3.3.01.12	Bagi Hasil Retribusi Perikanan	0,00	1.532.000,00	1.532.000,00	0,00	
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	154.156.069.000,00	211.556.562.000,00	57.398.493.000,00	37,23	
4.3.4.01	Dana Penyesuaian	154.156.069.000,00	211.556.562.000,00	57.398.493.000,00	37,23	
4.3.4.01.02	Dana Tambahan Penghasilan Guru	11.604.000.000,00	3.929.250.000,00	(7.674.750.000,00)	(66,14)	
4.3.4.01.03	Dana Tunjangan Profesi Guru	842.554.069.000,00	207.627.312.000,00	(634.926.757.000,00)	(75,36)	
4.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	36.185.315.000,00	41.225.315.000,00	5.040.000.000,00	13,93	
4.3.5.01	Bantuan Keuangan Dari Provinsi	36.185.315.000,00	41.225.315.000,00	5.040.000.000,00	13,93	
4.3.5.01.01	Bantuan Keuangan Dari Provinsi	36.185.315.000,00	41.225.315.000,00	5.040.000.000,00	13,93	
5	BELANJA	1.476.289.683.000,00	1.647.297.008.000,00	171.007.325.000,00	11,58	
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	952.785.493.000,00	1.021.982.337.000,00	69.196.844.000,00	7,26	
5.1.1	Belanja Pegawai	841.388.901.000,00	887.515.745.000,00	46.126.844.000,00	5,48	
5.1.1.01	Gaji Dan Tunjangan	664.113.117.000,00	639.072.621.000,00	(25.040.496.000,00)	(3,77)	
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	483.964.975.400,00	478.066.956.000,00	(5.898.019.400,00)	(1,22)	
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	60.702.329.000,00	50.819.729.000,00	(9.882.600.000,00)	(16,28)	
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	7.995.026.000,00	8.007.691.000,00	14.665.000,00	0,18	
5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	37.906.741.000,00	38.867.103.000,00	958.362.000,00	2,53	
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	10.614.630.000,00	9.342.715.000,00	(1.271.915.000,00)	(11,98)	
5.1.1.01.06	Tunjangan Bersas	32.405.728.000,00	30.366.283.000,00	(2.039.445.000,00)	(6,29)	
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	17.011.183.000,00	10.640.720.000,00	(6.370.463.000,00)	(37,45)	
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	14.133.600,00	13.097.000,00	(1.036.600,00)	(7,33)	
5.1.1.01.09	Turan Asuransi Kesehatan	10.276.357.000,00	9.713.423.000,00	(562.934.000,00)	(5,48)	
RINGKASAN AYO BERASRAN RENCANA ORKET PEMERINTAH, BELANJA DAN PEMBIAYAAN						
						Halaman

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SETELAH	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.1.1.01.10	Uang Paket	95.508.000,00	95.508.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.11	Tunjangan Panitia Musyawarah	30.511.000,00	30.511.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.12	Tunjangan Komisi	61.388.000,00	61.388.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.13	Tunjangan Panitia Anggaran	27.954.000,00	27.954.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.14	Tunjangan Badan Kehormatan	7.858.000,00	7.858.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	44.945.000,00	44.945.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.16	Tunjangan Perumahan	2.388.000.000,00	2.388.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.17	Uang Duka Wafat/Tewas	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.18	Uang Jasa Pengabdian	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.19	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	252.000.000,00	252.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.20	Tunjangan Kompensasi	242.850.000,00	255.740.000,00	12.890.000,00	5,31	
5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	17.061.150.000,00	17.700.450.000,00	639.300.000,00	3,75	
5.1.1.02.01	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	7.551.950.000,00	7.965.650.000,00	413.700.000,00	5,76	
5.1.1.02.02	Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas	1.320.000.000,00	1.346.800.000,00	26.800.000,00	2,03	
5.1.1.02.03	Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja	237.000.000,00	240.000.000,00	3.000.000,00	1,27	
5.1.1.02.05	Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja	7.972.200.000,00	8.148.000.000,00	175.800.000,00	2,21	
5.1.1.03	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH	2.920.000.000,00	2.976.287.000,00	56.287.000,00	1,93	
5.1.1.03.01	Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.570.000.000,00	2.520.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.03.02	Biaya Penunjang Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00	456.287.000,00	56.287.000,00	14,07	
5.1.1.04	Biaya Pemungutan Pajak dan Retribusi	3.136.565.000,00	3.394.890.000,00	258.325.000,00	8,24	
5.1.1.04.01	Biaya pemungutan PBB	694.890.000,00	694.890.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.04.02	Biaya pemungutan Pajak Daerah	1.499.200.000,00	1.615.000.000,00	115.800.000,00	7,72	
5.1.1.04.04	Biaya pemungutan retribusi	942.475.000,00	1.085.000.000,00	142.525.000,00	15,12	Peraturan Pemerintah No 69 Tahun 2010
5.1.1.05	Penghasilan Lainnya	154.156.069.000,00	224.371.487.000,00	70.215.418.000,00	45,55	Peraturan Pemerintah No 69 Tahun 2010
5.1.1.05.01	Tambahan Penghasilan Guru	11.604.000.000,00	10.630.250.000,00	(973.750.000,00)	(8,39)	
5.1.1.05.02	Tunjangan Profesi Guru	842.554.069.000,00	213.741.237.000,00	71.187.168.000,00	49,94	
5.1.2	Belanja Bunga	184.900.000,00	184.900.000,00	0,00	0,00	
5.1.2.01	Bunga Utang Pinjaman	184.900.000,00	184.900.000,00	0,00	0,00	
5.1.2.01.01	Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah	184.900.000,00	184.900.000,00	0,00	0,00	
5.1.4	Belanja Hibah	31.707.597.000,00	49.154.697.000,00	17.447.100.000,00	55,02	
5.1.4.01	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat	1.420.000.000,00	1.420.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.4.01.01	Pemerintah Pusat	1.420.000.000,00	1.420.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.4.05	Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi	30.287.597.000,00	47.734.697.000,00	17.447.100.000,00	57,60	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SETELAH	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	96.770.500,00	98.977.000,00	3.206.500,00	3,35	
5.2.1.1.19	Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	15.828.845.000,00	27.942.075.000,00	12.113.230.000,00	76,53	
5.2.1.19.01	Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD dr. H Achari	15.828.845.000,00	27.942.075.000,00	12.113.230.000,00	76,53	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	390.820.371.520,00	239.063.395.545,00	48.249.023.825,00	25,28	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.427.539.905,00	11.732.709.352,00	1.305.169.447,00	12,52	
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	3.768.894.727,00	4.263.482.302,00	494.587.575,00	13,12	
5.2.2.01.02	Belanja dokumen/administrasi tender	276.120.000,00	20.800.000,00	(255.320.000,00)	(92,47)	
5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar battery kering)	368.832.298,00	420.407.000,00	31.574.702,00	8,12	
5.2.2.01.04	Belanja perangko material dan benda pos lainnya	177.721.717,00	201.001.000,00	23.279.283,00	13,10	
5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	659.493.132,00	781.444.550,00	122.011.418,00	18,50	
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.091.470.830,00	3.562.965.200,00	471.494.370,00	15,25	
5.2.2.01.07	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	12.400.000,00	12.400.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.01.08	Belanja pengisian tabung gas	44.101.817,00	59.767.000,00	14.665.183,00	33,25	
5.2.2.01.09	Belanja pengisian tinta	119.244.575,00	135.807.800,00	16.563.225,00	13,89	
5.2.2.01.10	Belanja Memory Stick	52.380.000,00	63.445.000,00	11.065.000,00	21,12	
5.2.2.01.11	Belanja bahan pelumas (operasional Kantor)	82.322.000,00	83.122.000,00	800.000,00	0,97	
5.2.2.01.12	Belanja bahan habis pakai material kesehatan	293.371.706,00	467.121.000,00	173.749.292,00	59,22	
5.2.2.01.13	Belanja bahan habis pakai material laboratorium	731.751.937,00	764.988.000,00	33.236.063,00	4,54	
5.2.2.01.14	Belanja bahan habis pakai material besi	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.01.15	Belanja bahan habis pakai material tenun dan jahit	205.250.000,00	359.250.000,00	154.000.000,00	75,03	
5.2.2.01.16	Belanja bahan habis pakai radiologi	328.796.664,00	399.550.000,00	10.813.336,00	3,29	
5.2.2.01.18	Belanja bahan kelengkapan perlengkapan	2.230.000,00	2.230.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.01.20	Belanja bahan kelengkapan teknis elektronika	4.250.000,00	8.300.000,00	4.050.000,00	95,29	
5.2.2.01.22	Belanja bahan pengharum ruangan	152.978.500,00	143.178.500,00	(9.800.000,00)	(6,41)	
5.2.2.01.23	Belanja bahan pengharum/ parfum kendaraan	10.480.000,00	13.030.000,00	2.550.000,00	24,33	
5.2.2.01.24	Belanja Pila/Tropi	11.630.000,00	11.970.000,00	350.000,00	3,01	
5.2.2.01.25	Belanja peralatan dan kelengkapan kasamanan	7.150.000,00	12.650.000,00	5.500.000,00	76,92	
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	19.769.705.081,00	23.133.504.200,00	3.363.799.119,00	17,01	
5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	3.378.167.010,00	3.648.903.000,00	270.735.990,00	8,01	
5.2.2.02.02	Belanja bahan bibit tanaman	735.158.000,00	894.514.000,00	159.356.000,00	21,68	
5.2.2.02.03	Belanja bibit ternak	134.000.000,00	198.250.000,00	64.250.000,00	47,95	
5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	12.615.733.000,00	14.178.303.100,00	1.562.570.100,00	12,39	
5.2.2.02.05	Belanja bahan kimia	310.780.000,00	460.780.000,00	150.000.000,00	48,27	
5.2.2.02.06	Belanja alat peraga	123.690.000,00	224.242.800,00	100.552.800,00	81,29	
5.2.2.02.07	Belanja bahan praktek dan bahan baku percontohan	857.522.000,00	1.170.294.000,00	312.772.000,00	36,47	
5.2.2.02.08	Belanja pupuk	115.375.000,00	227.110.000,00	111.735.000,00	96,85	

RINCIAN APBD BERDASARKAN RINCIAN ORYK PEMDAPATAN, BELAJA DAN PEMBELAYAN

Halaman

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	
		SERELAJ	SETILAH	(Rp)	%		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7	
5.2.2.02.09	Belanja makanan dan minuman temak	234.030.000,00	297.030.000,00	63.000.000,00	26,92		
5.2.2.02.11	Belanja bahan kostum dan perlengkapan upacara	59.376.000,00	83.376.000,00	24.000.000,00	40,42		
5.2.2.02.12	Belanja bahan pestisida	50.580.000,00	91.850.000,00	41.270.000,00	81,59		
5.2.2.02.13	Belanja tas kegiatan	132.355.000,00	349.890.000,00	217.535.000,00	164,36		
5.2.2.02.14	Belanja bahan logistik rumah tangga	203.579.174,00	281.117.600,00	77.538.426,00	38,09		
5.2.2.02.15	Belanja cinderamata	109.584.500,00	119.652.200,00	10.067.700,00	9,19		
5.2.2.02.16	Belanja dekorasi	113.346.000,00	152.711.000,00	39.365.000,00	34,73		
5.2.2.02.17	Belanja dokumentasi	46.636.500,00	62.560.000,00	15.923.500,00	34,14		
5.2.2.02.18	Belanja bahan arsip dokumen	9.555.000,00	16.078.000,00	6.523.000,00	68,27		
5.2.2.02.19	Belanja perlengkapan olah raga	15.350.000,00	11.600.000,00	(3.750.000,00)	(24,43)		
5.2.2.02.20	Belanja bahan specimen	160.750.000,00	185.107.500,00	24.357.500,00	15,15		
5.2.2.02.21	Belanja bahan insiniasi buatan	66.300.000,00	66.300.000,00	0,00	0,00		
5.2.2.02.22	Belanja bahan publikasi	252.344.989,00	359.435.000,00	107.090.011,00	42,44		
5.2.2.02.25	Belanja bahan dan peralatan permainan	500.000,00	8.500.000,00	8.000.000,00	1.600,00		
5.2.2.02.28	Belanja tempat sampah/ tong sampah	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00		
5.2.2.02.29	Belanja bahan material service peralatan kantor	44.992.900,00	35.900.000,00	(9.092.900,00)	(20,21)		
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	33.767.471.132,00	38.907.761.200,00	5.140.290.068,00	15,22		
5.2.2.03.01	Belanja telepon	1.025.409.950,00	1.108.387.950,00	82.978.000,00	8,09		
5.2.2.03.02	Belanja air	517.718.050,00	602.822.820,00	85.104.770,00	16,44		
5.2.2.03.03	Belanja listrik	2.546.130.750,00	2.999.915.480,00	453.785.730,00	17,68		
5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	379.814.346,00	418.739.500,00	38.925.154,00	10,25		
5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	213.900.000,00	177.490.000,00	(36.410.000,00)	(17,02)		
5.2.2.03.07	Belanja paket/pengiriman	203.720.000,00	242.550.000,00	38.830.000,00	19,06		
5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	183.900.000,00	179.572.000,00	(4.328.000,00)	(2,35)		
5.2.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	72.650.000,00	73.275.000,00	625.000,00	0,86		
5.2.2.03.10	Belanja jasa administrasi penunngutan Pajak Penerangan Jalan Umum	7.866.000.000,00	8.466.000.000,00	600.000.000,00	7,63		
5.2.2.03.11	Belanja jasa administrasi penunngutan pajak	507.729.000,00	1.024.935.000,00	517.206.000,00	101,87		
5.2.2.03.12	Belanja jasa administrasi kepegawaian	162.630.000,00	155.170.000,00	(7.460.000,00)	(4,59)		
5.2.2.03.13	Belanja jasa publikasi	562.580.000,00	653.040.000,00	90.460.000,00	12,10		
5.2.2.03.14	Belanja jasa dokumentasi dan dekorasi	397.741.300,00	423.700.000,00	25.958.700,00	6,53		
5.2.2.03.15	Belanja jasa services peralatan dan perlengkapan kantor	1.241.915.725,00	1.457.562.000,00	215.646.275,00	17,36		
5.2.2.03.16	Belanja jasa atas prestasi	965.305.000,00	897.555.000,00	(67.750.000,00)	(7,02)		
5.2.2.03.17	Belanja jasa administrasi peserta	6.614.447.934,00	8.516.745.000,00	1.902.297.066,00	28,76		
5.2.2.03.18	Belanja jasa perawatan kesehatan	3.885.500.000,00	3.940.500.000,00	55.000.000,00	1,42		
5.2.2.03.19	Belanja jasa analisis di laboratorium	101.133.200,00	125.383.200,00	24.250.000,00	23,98		
5.2.2.03.20	Belanja retribusi kebersihan	12.242.462,00	12.900.000,00	657.538,00	5,37		
5.2.2.03.21	Belanja jasa perijinan	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00		
5.2.2.03.23	Belanja jasa bundre	3.900.000,00	6.220.000,00	2.320.000,00	59,49		

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SETELAH	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.2.03.24	Belanja Jasa Pendukung Operasional Kantor	6.265.103.215,00	7.328.798.250,00	1.063.695.035,00	16,98	
5.2.2.03.25	Belanja Jasa kalibrasi alat kesehatan	15.000.000,00	95.000.000,00	80.000.000,00	533,33	
5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	1.136.100.000,00	1.136.100.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	801.100.000,00	801.100.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.04.02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	335.000.000,00	335.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.504.341.502,00	4.530.447.600,00	946.106.098,00	26,40	
5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	499.264.026,00	683.960.000,00	184.695.974,00	36,99	
5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.117.974.450,00	1.281.481.000,00	163.506.550,00	14,63	
5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1.631.911.326,00	2.189.988.900,00	558.077.574,00	34,20	
5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	6.775.000,00	6.775.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	328.416.700,00	368.242.700,00	39.826.000,00	12,13	
5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Pengandaan	6.965.576.498,00	7.123.992.550,00	158.016.052,00	2,27	
5.2.2.06.01	Belanja cetak	5.272.678.268,00	5.194.320.300,00	(78.357.968,00)	(1,49)	
5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan	1.693.298.230,00	1.929.672.250,00	236.374.020,00	13,96	
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	665.560.000,00	895.970.000,00	230.410.000,00	34,62	
5.2.2.07.01	Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	
5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	348.440.000,00	408.290.000,00	64.850.000,00	18,88	
5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	58.900.000,00	85.550.000,00	26.650.000,00	45,25	
5.2.2.07.05	Belanja Sewa Tanah	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.07.06	Belanja sewa penginapan/ tempat tinggal/ kamar/ hotel	261.220.000,00	396.530.000,00	135.310.000,00	51,80	
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	880.622.500,00	712.310.000,00	(168.312.500,00)	(19,11)	
5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	880.622.500,00	712.310.000,00	(168.312.500,00)	(19,11)	
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	1.153.333.500,00	1.312.460.000,00	159.126.500,00	13,80	
5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	414.671.000,00	474.994.000,00	60.323.000,00	14,55	
5.2.2.10.02	Belanja sewa komputer dan printer	0,00	33.550.000,00	33.550.000,00	0,00	
5.2.2.10.03	Belanja sewa proyektor	1.200.000,00	1.350.000,00	150.000,00	12,50	
5.2.2.10.04	Belanja sewa generator	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda dan perlengkapannya (termasuk tenda, layan)	290.287.500,00	322.637.500,00	32.350.000,00	11,14	
5.2.2.10.06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	7.500.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	33,33	
5.2.2.10.07	Belanja sewa film	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.10.08	Belanja sewa sound system	335.445.000,00	355.707.500,00	20.262.500,00	6,04	
5.2.2.10.09	Belanja sewa tanaman hias	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.10.10	Belanja sewa mesin peralihan kerja	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	100,00	
5.2.2.10.16	Belanja Sewa Alat Musik dan Perlengkapannya	46.850.000,00	51.350.000,00	4.500.000,00	9,61	
5.2.2.10.17	Belanja Sewa Karpet/ Tiler/ Permadani	5.380.000,00	5.380.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.10.18	Belanja Sewa Kipas Angin Bleswer	9.000.000,00	14.000.000,00	5.000.000,00	55,56	

KENDAHAN APD BERDASARAN ENCIAN OFEK PENDUYAN, BELAU DAN PHRYAN

Lampiran 3.10.10.18

Halaman

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SETELAH	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	9.866.273.944,00	11.996.122.300,00	2.109.448.356,00	21,34	
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	1.765.411.239,00	1.907.765.200,00	142.353.961,00	8,06	
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.462.362.000,00	5.313.790.000,00	831.428.000,00	18,55	
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	455.589.689,00	848.401.500,00	392.811.811,00	86,22	
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.161.436.016,00	3.897.415.600,00	735.979.584,00	23,28	
5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman pasien	21.875.000,00	28.750.000,00	6.875.000,00	31,43	
5.2.2.12	Belanja Pakaiat Dinas Dan Atributnya	455.375.000,00	476.725.000,00	21.350.000,00	4,69	
5.2.2.12.02	Belanja Pakaiat Sipil Harian (PSH)	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.12.03	Belanja Pakaiat Sipil Lengkap (PSL)	24.000.000,00	38.500.000,00	14.500.000,00	60,42	
5.2.2.12.04	Belanja Pakaiat Dinas Harian (PDH)	125.500.000,00	125.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.12.05	Belanja Pakaiat Dinas Upacara (PDU)	69.025.000,00	74.025.000,00	5.000.000,00	7,24	
5.2.2.12.06	Belanja atribut kelengkapan pakaiain dinas	26.600.000,00	28.450.000,00	1.850.000,00	6,95	
5.2.2.12.07	Pakaian Sipil Resmi	110.250.000,00	110.250.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.13	Belanja Pakaiat Kerja	397.120.000,00	525.837.000,00	128.717.000,00	32,41	
5.2.2.13.01	Belanja pakaian kerja lapangan	395.220.000,00	521.937.000,00	126.717.000,00	32,06	
5.2.2.13.02	Belanja atribut kelengkapan pakaian kerja lapangan	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.13.03	Belanja Pakaiat dan Atribut Satpam	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
5.2.2.14	Belanja Pakaiat Khusus Dan Hari-Hari Tertentu	272.260.000,00	404.215.000,00	131.955.000,00	48,47	
5.2.2.14.02	Belanja pakaian adat daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	118.960.000,00	159.560.000,00	40.600.000,00	34,13	
5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga dan atributnya	86.100.000,00	172.900.000,00	86.800.000,00	100,81	
5.2.2.14.05	Belanja pakaian khusus beserta kelengkapan atributnya	47.200.000,00	51.755.000,00	4.555.000,00	9,65	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.526.742.256,00	25.638.478.800,00	3.111.736.544,00	13,81	
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.224.577.402,00	10.991.294.000,00	756.756.598,00	7,39	
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.292.204.854,00	14.647.184.800,00	2.354.979.946,00	19,16	
5.2.2.16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	2.195.000.000,00	1.789.000.000,00	(406.000.000,00)	(18,50)	
5.2.2.16.01	Belanja beasiswa tugas belajar Diploma	176.000.000,00	176.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.16.02	Belanja beasiswa tugas belajar S1	879.000.000,00	503.000.000,00	(376.000.000,00)	(42,78)	
5.2.2.16.03	Belanja beasiswa tugas belajar S2	150.000.000,00	120.000.000,00	(30.000.000,00)	(20,00)	
5.2.2.16.04	Belanja beasiswa tugas belajar S3	990.000.000,00	990.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis	3.351.314.000,00	2.443.767.000,00	(907.547.000,00)	(27,08)	
5.2.2.17.01	Belanja kursus-kursus singkat / pelatihan	2.949.654.000,00	2.177.907.000,00	(771.747.000,00)	(26,16)	
5.2.2.17.02	Belanja sosialisasi	146.360.000,00	121.360.000,00	(24.000.000,00)	(16,51)	
5.2.2.17.03	Belanja bimbingan teknis	246.800.000,00	135.000.000,00	(111.800.000,00)	(45,74)	
5.2.2.17.04	Belanja mengikuti seminar	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
5.2.2.17.05	Belanja mengikuti workshop	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	

KENDAHAN APD BERGABUNGAN RENCANA PEKERJAAN, RENCANA DAN PERHAYAN

Lampiran 4.10.10

Halaman

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SETELAH	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	35.439.011.740,00	57.403.875.650,00	21.964.863.910,00	61,98	
5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan dan Mesin	1.570.586.575,00	1.864.846.500,00	294.259.925,00	18,74	
5.2.2.20.02	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.941.841.165,00	7.360.665.150,00	2.418.823.985,00	48,95	
5.2.2.20.03	Belanja pemeliharaan jalan, irigasi dan jaringan	25.698.244.000,00	43.619.094.000,00	17.920.850.000,00	69,74	
5.2.2.20.04	Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya	3.228.340.000,00	4.559.270.000,00	1.330.930.000,00	41,23	
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	2.529.330.000,00	3.018.545.000,00	489.215.000,00	19,34	
5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	65.100.000,00	199.655.000,00	114.555.000,00	134,61	
5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.952.600.000,00	2.197.000.000,00	244.400.000,00	12,52	
5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pelatihan dan Pengawasan	144.490.000,00	240.510.000,00	96.060.000,00	66,50	
5.2.2.21.04	Belanja Jasa Konsultansi lainnya	347.180.000,00	381.380.000,00	34.200.000,00	9,85	
5.2.2.22	Belanja Barang Serupa Modal Non Aset Tetap	6.546.936.769,00	8.137.584.000,00	1.590.647.231,00	24,41	
5.2.2.22.02	Belanja pengadaan peralatan dan mesin non aset tetap	587.070.000,00	673.535.000,00	86.465.000,00	14,73	
5.2.2.22.03	Belanja pembangunan gedung dan bangunan non aset tetap	2.469.336.000,00	2.887.936.000,00	418.600.000,00	19,96	
5.2.2.22.04	Belanja pembangunan jalan, irigasi dan jaringan non aset tetap	3.108.240.000,00	3.920.740.000,00	812.500.000,00	26,14	
5.2.2.22.05	Belanja pengadaan barang serupa aset tetap lainnya non aset tetap	456.290.769,00	655.373.000,00	219.082.231,00	50,21	
5.2.2.23	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	8.046.260.000,00	8.046.260.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.23.01	Belanja Hibah Barang dan Jasa berkenaan kepada pihak ketiga/masyarakat	8.046.260.000,00	8.046.260.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.24	Belanja Hibah barang atau jasa kepada pihak ketiga/masyarakat	7.963.842.693,00	8.200.832.693,00	236.990.000,00	2,98	
5.2.2.24.01	Belanja Bantuan Sosial Barang berkenaan yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	235.700.000,00	1.259.765.000,00	1.024.065.000,00	434,48	
5.2.2.25	Belanja Bantuan Sosial Barang berkenaan yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	235.700.000,00	1.259.765.000,00	1.024.065.000,00	434,48	
5.2.2.26	Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	10.371.155.000,00	17.582.124.000,00	7.210.969.000,00	69,53	
5.2.2.26.01	Belanja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Ashari	10.371.155.000,00	17.582.124.000,00	7.210.969.000,00	69,53	
5.2.2.28	Belanja Kurus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Bagi Anggota DPRD	2.259.000.000,00	2.655.000.000,00	396.000.000,00	17,53	
5.2.2.28.01	Belanja Kurus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Bagi Anggota DPRD	2.259.000.000,00	2.655.000.000,00	396.000.000,00	17,53	
5.2.3	Belanja Modal	288.004.507.980,00	325.246.887.155,00	37.241.379.175,00	12,93	
5.2.3.01	Belanja Modal Pengadaan Tanah	3.456.448.973,00	4.567.872.064,00	1.111.423.091,00	32,16	

RINGKASAN APBD BERDASARKAN KENDAL OPRK PEMBAKHTH, BELANJA DAN PEMBIAYAN

Page 14 of 14

Halaman

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SETELAH	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.3.01.01	Belanja modal pengadaan tanah kantor	389.525.000,00	389.525.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.01.06	Belanja modal pengadaan tanah sarana pendidikan sekolah dasar	170.000.000,00	527.445.000,00	357.445.000,00	210,26	
5.2.3.01.07	Belanja modal pengadaan tanah sarana pendidikan menengah umum dan kejuruan	2.296.923.973,00	3.050.902.064,00	753.978.091,00	32,83	
5.2.3.01.19	Belanja modal pengadaan tanah sarana umum tempat pembuangan akhir sampah	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor	3.435.495.000,00	4.403.303.025,00	967.808.025,00	28,17	
5.2.3.03.03	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor station wagon	1.761.775.000,00	1.761.775.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.03.05	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor micro bus	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.03.08	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor boks	337.000.000,00	277.973.000,00	(59.027.000,00)	(17,52)	
5.2.3.03.09	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pick up	0,00	445.877.025,00	445.877.025,00	0,00	
5.2.3.03.10	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor ambulans	0,00	260.930.000,00	260.930.000,00	0,00	
5.2.3.03.12	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	1.126.720.000,00	1.446.748.000,00	320.028.000,00	28,40	
5.2.3.04	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	10.000.000,00	49.500.000,00	39.500.000,00	395,00	
5.2.3.04.01	Belanja modal pengadaan gerobak	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.04.04	Belanja modal pengadaan sepeda	0,00	39.500.000,00	39.500.000,00	0,00	
5.2.3.08	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel	132.135.000,00	355.235.000,00	243.100.000,00	216,79	
5.2.3.08.01	Belanja modal pengadaan mesin las	34.150.000,00	43.150.000,00	9.000.000,00	26,35	
5.2.3.08.07	Belanja modal pengadaan mesin jahit dan obras	25.000.000,00	36.100.000,00	11.100.000,00	44,40	
5.2.3.08.12	Belanja modal peralatan televisi elektronika	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.08.13	Belanja modal pengadaan stand engine/ mesin praktik	26.135.000,00	109.135.000,00	83.000.000,00	317,58	
5.2.3.08.27	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Praktek	16.850.000,00	156.850.000,00	140.000.000,00	830,86	
5.2.3.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Peralatan Pertanian Dan Perikanan	8.800.000,00	9.800.000,00	1.100.000,00	12,50	
5.2.3.09.05	Belanja modal pengadaan alat penyemprot tanaman	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.09.06	Belanja modal pengadaan mesin potong rumput dan tanaman	5.000.000,00	6.100.000,00	1.100.000,00	22,00	
5.2.3.09.08	Belanja modal peralatan RPH/RPU	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	766.010.000,00	970.410.000,00	204.400.000,00	26,68	
5.2.3.10.01	Belanja modal pengadaan mesin tik	5.800.000,00	8.300.000,00	2.500.000,00	43,10	
5.2.3.10.02	Belanja modal pengadaan mesin hitung	4.085.000,00	4.085.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.10.05	Belanja modal pengadaan mesin cetak	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	

RINGKASAN APBD BERDASARKAN ENCIKIPENYAIRAN, BELANDA DAN PERUBAHAN

Lampiran 11.1.1.1

Halaman

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SETELAH	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.3.10.07	Belanja modal pengadaan mesin potong kertas	400.000,00	700.000,00	300.000,00	75,00	
5.2.3.10.08	Belanja modal pengadaan mesin penghancur kertas	8.500.000,00	15.850.000,00	7.350.000,00	86,47	
5.2.3.10.10	Belanja modal pengadaan papan visual elektronik	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.10.11	Belanja modal pengadaan tabung penadam kebakaran	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.10.12	Belanja modal pengadaan vacuum cleaner	30.500.000,00	73.500.000,00	43.000.000,00	140,98	
5.2.3.10.13	Belanja modal pengadaan tenda dan perlengkapan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.10.15	Belanja modal genset	316.200.000,00	639.500.000,00	323.300.000,00	102,25	
5.2.3.10.16	Belanja modal pengadaan peralatan audio visual	41.350.000,00	56.300.000,00	14.950.000,00	36,15	
5.2.3.10.17	Belanja modal pengadaan alat pompa	44.375.000,00	104.375.000,00	60.000.000,00	135,21	
5.2.3.10.18	Belanja modal pengadaan peralatan laundry	263.650.000,00	3.650.000,00	(260.000.000,00)	(98,62)	
5.2.3.10.20	Belanja modal mesin laminating	700.000,00	1.700.000,00	1.000.000,00	142,86	
5.2.3.10.23	Belanja modal pengadaan mesin potong rumput dan tanaman	17.400.000,00	21.400.000,00	4.000.000,00	22,99	
5.2.3.10.35	Belanja Modal Pengadaan Mesin Aksensi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.10.36	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pendeteksi	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
5.2.3.10.37	Belanja modal pengadaan sebak tabung	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	890.212.730,00	1.464.886.630,00	594.673.900,00	66,80	
5.2.3.11.02	Belanja modal pengadaan almari	200.351.000,00	250.316.000,00	49.965.000,00	24,94	
5.2.3.11.03	Belanja modal pengadaan brankas	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.11.04	Belanja modal pengadaan filling kabinet	81.100.000,00	107.400.000,00	26.300.000,00	32,43	
5.2.3.11.05	Belanja modal pengadaan white board	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.11.06	Belanja modal pengadaan penunjuk waktu	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
5.2.3.11.07	Belanja modal pengadaan alat pendingin / AC	249.711.730,00	434.951.730,00	185.240.000,00	74,18	
5.2.3.11.08	Belanja modal pengadaan kipas angin	13.200.000,00	75.950.000,00	62.650.000,00	474,62	
5.2.3.11.09	Belanja modal penyekat ruangan	25.050.000,00	30.550.000,00	5.500.000,00	21,96	
5.2.3.11.10	Belanja modal pengadaan papan informasi/ papan nama	65.800.000,00	30.550.000,00	(35.250.000,00)	(53,57)	
5.2.3.11.11	Belanja modal pengadaan minibar/ podium	5.300.000,00	10.300.000,00	5.000.000,00	94,34	
5.2.3.11.12	Belanja modal pengadaan exhaust fan / kipas angin sedot	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
5.2.3.11.16	Belanja Modal Televisi	64.500.000,00	134.500.000,00	70.000.000,00	108,53	
5.2.3.11.17	Belanja modal tiang bendera/ perlengkapan upacara	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.11.33	Belanja modal pengadaan rak obat	150.000.000,00	143.483.600,00	(6.506.100,00)	(4,34)	
5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	3.023.990.000,00	3.967.124.168,00	943.134.168,00	31,19	
5.2.3.12.01	Belanja modal pengadaan komputer mainframe/server	124.280.000,00	144.710.000,00	20.430.000,00	16,46	
5.2.3.12.02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	632.750.000,00	1.007.531.200,00	374.781.200,00	59,23	
5.2.3.12.03	Belanja modal pengadaan komputer note book	678.635.000,00	966.320.600,00	287.685.600,00	42,39	
5.2.3.12.04	Belanja modal pengadaan printer	585.475.000,00	638.471.268,00	52.996.268,00	9,05	
5.2.3.12.05	Belanja modal pengadaan scanner	10.150.000,00	31.791.500,00	21.641.500,00	213,22	
5.2.3.12.06	Belanja modal pengadaan monitor/display	39.150.000,00	58.700.000,00	19.550.000,00	49,94	

RINGKASAN APBD BERASASAKAN RINCIAN ORKES PEMUPATAN, BELAJA DAN PEMERINTAHAN

Lampiran 10.5.16

Halaman

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	
		SEBELUM	SETELAH	(Rp)	%		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7	
5.2.3.12.07	Belanja modal pengadaan CPU	54.400.000,00	65.100.000,00	10.700.000,00	19,67		
5.2.3.12.08	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer	153.100.000,00	162.351.600,00	9.151.600,00	5,98		
5.2.3.12.09	Belanja modal pengadaan perlengkapan komputer (flash disk; mouse; keyboard; harddisk; speaker)	30.270.000,00	38.255.000,00	8.285.000,00	27,37		
5.2.3.12.10	Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer	600.800.000,00	667.600.000,00	66.800.000,00	11,12		
5.2.3.12.11	Belanja modal pengadaan software/aplikasi komputer	115.000.000,00	186.093.000,00	71.093.000,00	61,82		
5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	3.267.392.000,00	4.210.358.500,00	942.966.500,00	28,86		
5.2.3.13.01	Belanja modal pengadaan meja kerja	131.050.000,00	213.271.400,00	82.221.400,00	62,74		
5.2.3.13.02	Belanja modal pengadaan meja rapat	37.750.000,00	44.980.000,00	7.130.000,00	18,89		
5.2.3.13.03	Belanja modal pengadaan meja makan	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00		
5.2.3.13.04	Belanja modal pengadaan kursi makan	152.650.000,00	224.622.500,00	71.972.500,00	47,15		
5.2.3.13.05	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	120.650.000,00	167.740.000,00	47.090.000,00	39,03		
5.2.3.13.07	Belanja modal pengadaan tempat tidur	27.000.000,00	64.025.000,00	37.025.000,00	137,13		
5.2.3.13.08	Belanja modal pengadaan sofa	20.000.000,00	35.000.000,00	15.000.000,00	75,00		
5.2.3.13.09	Belanja modal pengadaan rak buku/tv/kembang	30.850.000,00	26.853.000,00	(3.997.000,00)	(12,96)		
5.2.3.13.11	Belanja modal pengadaan kursi siswa	140.750.000,00	540.750.000,00	400.000.000,00	284,19		
5.2.3.13.12	Belanja modal pengadaan kursi tamu	51.100.000,00	51.100.000,00	0,00	0,00		
5.2.3.13.13	Belanja modal pengadaan meja tamu	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00		
5.2.3.13.14	Belanja modal pengadaan kursi tunggu	262.742.000,00	365.304.000,00	102.562.000,00	39,04		
5.2.3.13.15	Belanja modal pengadaan meja front office	0,00	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00		
5.2.3.13.16	Belanja modal pengadaan lemari buku	34.000.000,00	41.000.000,00	7.000.000,00	20,59		
5.2.3.13.17	Belanja Modal Pengadaan meja dan kursi lainnya	2.236.850.000,00	2.406.563.000,00	169.713.000,00	7,59		
5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	296.491.000,00	471.840.000,00	175.349.000,00	59,08		
5.2.3.14.01	Belanja modal pengadaan tabung gas	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00		
5.2.3.14.02	Belanja modal pengadaan kompor gas	23.300.000,00	23.800.000,00	300.000,00	1,29		
5.2.3.14.04	Belanja modal pengadaan dispenser	16.200.000,00	38.450.000,00	22.250.000,00	137,35		
5.2.3.14.05	Belanja modal pengadaan kalkas	123.731.000,00	251.519.000,00	127.519.000,00	103,06		
5.2.3.14.06	Belanja modal pengadaan rak piring	1.000.000,00	1.720.000,00	720.000,00	72,00		
5.2.3.14.07	Belanja modal pengadaan piring/gelas/mangkuk/cangkir/sendok/garpu/pisau	43.260.000,00	63.260.000,00	20.000.000,00	46,23		
5.2.3.14.11	Belanja Modal Pengadaan Magic Jar	0,00	205.000,00	205.000,00	0,00		
5.2.3.14.12	Alat dapur Lainnya	91.000.000,00	91.855.000,00	855.000,00	0,94		
5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	187.457.000,00	420.700.000,00	233.243.000,00	124,42		
5.2.3.15.01	Belanja modal pengadaan lampu hias	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00		
5.2.3.15.02	Belanja modal pengadaan jam dinding/meja	9.450.000,00	9.450.000,00	0,00	0,00		
5.2.3.15.03	Belanja modal pengadaan gorden dan perlengkapannya	75.507.000,00	162.750.000,00	87.243.000,00	115,54		
5.2.3.15.04	Belanja modal pengadaan karpet/ tikar/ permadani	48.500.000,00	120.500.000,00	72.000.000,00	148,45		
5.2.3.15.05	Belanja modal Pengadaan wallpaper	0,00	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00		

ANGKARAN APBD BERDASARKAN RENCANA PENGADAAN, BELAJAR DAN PERBANYAAN

Halaman

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		SETELAH	BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM	3		(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7	
5.2.3.15.06	Belanja modal terakumulasi terakumulasi terakumulasi	54.000.000,00	71.500.000,00	17.500.000,00	32,41		
5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-Mat Studio	732.138.000,00	990.778.800,00	258.620.800,00	35,32		
5.2.3.16.01	Belanja modal pengadaan kamera	191.980.000,00	339.129.000,00	147.149.000,00	76,65		
5.2.3.16.02	Belanja modal pengadaan lemari	32.900.000,00	57.935.000,00	25.035.000,00	76,09		
5.2.3.16.03	Belanja modal pengadaan proyektor	117.398.000,00	248.174.600,00	130.976.600,00	111,57		
5.2.3.16.04	Belanja modal pengadaan mesin photo TDA	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00		
5.2.3.16.05	Belanja modal pengadaan Tape recorder	6.000.000,00	7.650.000,00	1.650.000,00	27,50		
5.2.3.16.06	Belanja modal pengadaan wireless mic	28.360.000,00	34.510.000,00	6.250.000,00	22,04		
5.2.3.16.07	Belanja modal pengadaan sound system	354.200.000,00	297.950.000,00	(56.250.000,00)	(15,88)		
5.2.3.16.08	Belanja modal pengadaan amplifier	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00		
5.2.3.16.09	Belanja modal pengadaan typed	0,00	1.860.200,00	1.860.200,00	0,00		
5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-Mat Komunikasi	17.780.000,00	29.509.000,00	11.529.000,00	64,84		
5.2.3.17.01	Belanja modal pengadaan telepon	5.750.000,00	7.750.000,00	2.000.000,00	34,78		
5.2.3.17.02	Belanja modal pengadaan fasilitas	1.450.000,00	10.579.000,00	9.529.000,00	657,17		
5.2.3.17.03	Belanja modal pengadaan radio SSB	10.580.000,00	10.580.000,00	0,00	0,00		
5.2.3.18	Belanja Modal Pengadaan Alat-Mat Ukur	78.575.000,00	88.830.000,00	10.255.000,00	13,05		
5.2.3.18.01	Belanja modal pengadaan timbangan	10.175.000,00	10.175.000,00	0,00	0,00		
5.2.3.18.04	Belanja modal pengadaan alat GPS	36.200.000,00	46.715.000,00	10.505.000,00	29,02		
5.2.3.18.07	Belanja modal pengadaan barometer	4.000.000,00	13.000.000,00	(250.000,00)	(6,25)		
5.2.3.18.11	Belanja modal pengadaan alat uji keasaman (PH)	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00		
5.2.3.18.14	Belanja modal alat ukur panjang	24.200.000,00	24.200.000,00	0,00	0,00		
5.2.3.19	Belanja Modal Pengadaan Alat-Mat Kodokteran	6.792.573.000,00	9.114.368.000,00	2.321.795.000,00	34,18		
5.2.3.19.01	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran umum	6.708.573.000,00	8.892.218.000,00	2.183.645.000,00	32,55		
5.2.3.19.02	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran gigi	10.000.000,00	13.000.000,00	3.000.000,00	30,00		
5.2.3.19.12	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran hewan	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00		
5.2.3.19.13	Belanja modal pengadaan alat-alat farmasi	50.000.000,00	45.500.000,00	(4.500.000,00)	(9,00)		
5.2.3.19.26	Belanja modal alat kesehatan non medis	5.000.000,00	14.650.000,00	139.650.000,00	2.793,00		
5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Alat-Mat Laboratorium	25.552.092.109,00	25.206.852.460,00	(345.239.649,00)	(1,35)		
5.2.3.20.01	Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium biologi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00		
5.2.3.20.03	Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium kimia	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00		
5.2.3.20.07	Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium perikanan	89.400.000,00	89.400.000,00	0,00	0,00		
5.2.3.20.09	Belanja modal pengadaan alat-alat pengapa / praktik sekolah	25.349.692.109,00	25.004.452.460,00	(345.239.649,00)	(1,36)		
5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	70.709.875.000,00	90.451.143.200,00	19.741.268.200,00	27,92		
5.2.3.21.01	Belanja modal pengadaan konstruksi jalan	70.709.875.000,00	90.451.143.200,00	19.741.268.200,00	27,92		

INDUKSIAN ATFD BERDASARKAN KENDAL OFFICE PEMBAKARAN, TELUK DAN PEMBAKARAN

Halaman

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	
		SEBELUM	SETELAH	(Rp)	%	6	7
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6		
5.2.3.22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	230.000.000,00	730.000.000,00	500.000.000,00	217,39		
5.2.3.22.03	Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan orang	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00		
5.2.3.22.04	Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air	200.000.000,00	700.000.000,00	500.000.000,00	250,00		
5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	22.094.255.000,00	24.950.405.000,00	2.856.150.000,00	12,93		
5.2.3.23.01	Belanja modal pengadaan konstruksi bendungan	153.700.000,00	153.700.000,00	0,00	0,00		
5.2.3.23.02	Belanja modal pengadaan konstruksi waduk	302.250.000,00	243.400.000,00	(58.850.000,00)	(19,47)		
5.2.3.23.03	Belanja modal pengadaan konstruksi kanal permukaan	2.335.000.000,00	2.935.000.000,00	600.000.000,00	25,70		
5.2.3.23.05	Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi	11.282.674.000,00	12.532.674.000,00	1.250.000.000,00	11,08		
5.2.3.23.06	Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum	4.006.281.000,00	5.071.281.000,00	1.065.000.000,00	26,58		
5.2.3.23.10	Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan kolam dan sejenisnya	3.233.750.000,00	3.233.750.000,00	0,00	0,00		
5.2.3.23.14	Belanja modal pengadaan konstruksi air bawah tanah	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	0,00		
5.2.3.23.15	Belanja modal konstruksi sumur dan pengeboran	54.600.000,00	54.600.000,00	0,00	0,00		
5.2.3.23.35	Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi (Bangrov/Ingub)	575.000.000,00	575.000.000,00	0,00	0,00		
5.2.3.23.36	Belanja modal pengadaan konstruksi kanal permukaan (bangrov/Ingub)	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00		
5.2.3.24	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman Dan Hutan Kota	1.525.000.000,00	2.413.000.000,00	888.000.000,00	58,23		
5.2.3.24.01	Belanja modal pengadaan lampu hias jalan	1.475.000.000,00	2.363.000.000,00	888.000.000,00	60,20		
5.2.3.24.02	Belanja modal pengadaan lampu hias taman	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00		
5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik, Telepon dan Air	666.325.000,00	1.262.350.000,00	596.025.000,00	89,45		
5.2.3.25.01	Belanja modal pengadaan instalasi listrik	613.325.000,00	1.162.600.000,00	549.275.000,00	89,56		
5.2.3.25.02	Belanja modal pengadaan instalasi telepon	53.000.000,00	98.000.000,00	45.000.000,00	84,91		
5.2.3.25.04	Belanja modal pengadaan instalasi Air	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00		
5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	135.159.360.768,00	139.779.863.508,00	4.620.502.740,00	3,42		
5.2.3.26.01	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	113.390.766.498,00	113.686.960.606,00	296.194.108,00	0,26		
5.2.3.26.04	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang	6.218.495.270,00	6.145.410.902,00	(73.084.368,00)	(1,18)		
5.2.3.26.08	Belanja modal pengadaan konstruksi tempat perdagangan Irian (TP2)	2.641.252.000,00	3.201.517.000,00	560.265.000,00	21,21		
5.2.3.26.09	Belanja modal pengadaan konstruksi terminal	0,00	2.410.800.000,00	2.410.800.000,00	0,00		
5.2.3.26.11	Belanja modal pengadaan konstruksi tempat parkir	127.450.000,00	149.850.000,00	22.200.000,00	17,42		
5.2.3.26.12	Belanja modal pengadaan konstruksi pagar keliling	132.740.000,00	230.100.000,00	97.358.000,00	73,34		
5.2.3.26.13	Belanja modal pengadaan konstruksi gapura	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00		

RINGKASAN APBD BERDASARKAN KENDAL ORIENT PEMBATASAN BELAJA DAN PEMBELAJAN

Halaman

Printed by the Signet

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	
		SEBELUM	SETELAH	(Rp)	%		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH						
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	137.560.305.000,00	200.966.880.000,00	63.406.575.000,00	46,09		
		331.060.305.000,00	194.866.880.000,00	63.806.575.000,00	48,68		
6.1.1.01	Penerimaan Perorangan PAD	0,00	16.129.335.398,00	16.129.335.398,00	0,00		
6.1.1.01.01	Pajak Daerah	0,00	1.680.988.838,00	1.680.988.838,00	0,00		
6.1.1.01.02	Retribusi Daerah	0,00	2.083.484.000,00	2.083.484.000,00	0,00		
6.1.1.01.03	Hasil Pengalihan Kelayakan Daerah yang Dipisahkan	0,00	(1.997.302,00)	(1.997.302,00)	0,00		
6.1.1.01.04	Lain-Lain PAD yang sah	0,00	12.366.859.872,00	12.366.859.872,00	0,00		
6.1.1.02	Penerimaan Perorangan Dana Perimbangan	0,00	2.995.223.000,00	2.995.223.000,00	0,00		
6.1.1.02.01	Bagi Hasil Pajak	0,00	2.995.223.000,00	2.995.223.000,00	0,00		
6.1.1.03	Penerimaan Perorangan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	4.420.137.288,00	4.420.137.288,00	0,00		
6.1.1.03.01	Pendapatan Hibah	0,00	12.681.020,00	12.681.020,00	0,00		
6.1.1.03.03	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	6.146.602.546,00	6.146.602.546,00	0,00		
6.1.1.03.05	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	(1.739.146.278,00)	(1.739.146.278,00)	0,00		
6.1.1.04	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	331.060.305.000,00	175.088.932.884,00	44.028.627.884,00	33,59		
6.1.1.04.01	Belanja Pegawai dari Belanja Tidak langsung	0,00	37.160.990.832,00	37.160.990.832,00	0,00		
6.1.1.04.02	Belanja Pegawai dari Belanja langsung	0,00	3.672.179.871,00	3.672.179.871,00	0,00		
6.1.1.04.03	Belanja Barang dan Jasa	0,00	19.971.027.627,00	19.971.027.627,00	0,00		
6.1.1.04.04	Belanja Modal	331.060.305.000,00	104.937.920.180,00	(26.122.384.820,00)	(19,93)		
6.1.1.04.05	Belanja Bunga	0,00	28.662.409,00	28.662.409,00	0,00		
6.1.1.04.07	Belanja Hibah	0,00	4.489.950.000,00	4.489.950.000,00	0,00		
6.1.1.04.08	Belanja Bantuan Sosial	0,00	342.500.000,00	342.500.000,00	0,00		
6.1.1.04.10	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	2.435.144.965,00	2.435.144.965,00	0,00		
6.1.1.04.11	Belanja Tidak Tertuga	0,00	2.050.557.000,00	2.050.557.000,00	0,00		
6.1.1.05	Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Sampai Dengan Akhir Tahun Belum Terealisasi	0,00	2.555.000.896,00	2.555.000.896,00	0,00		
6.1.1.05.05	Pembayaran Polok Utang	0,00	896,00	896,00	0,00		
6.1.1.05.06	Pembelian Perorangan Daerah	0,00	2.555.000.000,00	2.555.000.000,00	0,00		
6.1.1.07	Penerimaan Perorangan Pembiayaan	0,00	(6.325.749.466,00)	(6.325.749.466,00)	0,00		
6.1.1.07.01	Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya	0,00	534,00	534,00	0,00		
6.1.1.07.04	Penerimaan Perorangan Daerah	0,00	(6.000.000.000,00)	(6.000.000.000,00)	0,00		
6.1.1.07.05	Penerimaan Kembali Pembelian Perorangan	0,00	(325.750.000,00)	(325.750.000,00)	0,00		
6.1.1.08	Sisa Penghematan Pengeluaran Pembiayaan	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00		
6.1.1.09.02	Penyerahan Modal	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00		

RINCIAN APBD BERDASAR RENCANA OPK PEMBAYARAN, BELAJA DAN PEMBIAYAAN

Rincian APBD

Halaman

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SETELAH	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	
<p>Pemalang,</p> <p>BUPATI PEMALANG</p> <p>JUNAEDI</p>						
<p>RINGKASAN APBD BERDASARAN ENCIAN GINTES KEMAHAPATAN, BELAKA DAN PERUBAHAN</p> <p>Halaman</p>						

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	SURPLUS / (DEFISIT)				
		(34.495.918,000,00)	(179.927.377,000,00)	(145.431.459,000,00)	421,59
	PEMBIAYAAN DAERAH				
3	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	53.723.172,000,00	200.054.631,000,00	146.331.459,000,00	272,38
3.1.1	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	47.823.172,000,00	194.154.631,000,00	146.331.459,000,00	305,88
3.1.1.5		5.900.000,000,00	5.900.000,000,00	0,00	0,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH				
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	19.227.254,000,00	20.127.254,000,00	900.000,000,00	4,68
3.2.1.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	4.000.000,000,00	4.000.000,000,00	0,00	0,00
3.2.1.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	9.250.000,000,00	10.150.000,000,00	900.000,000,00	9,73
3.2.2	Pembayaran Pokok Utang	477.254,000,00	477.254,000,00	0,00	0,00
3.2.2.3		5.500.000,000,00	5.500.000,000,00	0,00	0,00
3.2.2.4	Penerimaan Pinjaman Daerah				
	PEMBIAYAAN NETTO				
		34.495.918,000,00	179.927.377,000,00	145.431.459,000,00	421,59
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN				
		0,00	0,00	0,00	0,00

Pemalang, 1 Desember 2014
BUPATI PEMALANG


JUNAEDI

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	290.295.408.540,00	446.274.318.576,00	157.978.910.036,00	54,42
2.2.3	Belanja Modal	283.606.209.314,00	345.430.626.420,00	61.824.417.106,00	21,80
		(121.670.437.000,00)	(253.110.831.000,00)	(131.440.394.000,00)	108,03
3	SURPLUS / (DEFISIT)				
3.1	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	133.647.691.000,00	272.148.085.000,00	138.500.394.000,00	103,63
3.1.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	113.247.691.000,00	251.748.085.000,00	138.500.394.000,00	122,30
3.1.1.2	Pencairan Dana Cadangan	16.000.000.000,00	16.000.000.000,00	0,00	0,00
3.1.1.5	Penerimaan Kembali Pembiayaan Pinjaman	4.400.000.000,00	4.400.000.000,00	0,00	0,00
3.1.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	11.977.254.000,00	19.037.254.000,00	7.060.000.000,00	58,95
3.1.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	7.500.000.000,00	14.560.000.000,00	7.060.000.000,00	94,13
3.1.2.2	Pembayaran Pokok Utang	477.254.000,00	477.254.000,00	0,00	0,00
3.1.2.3	Pembayaran Pinjaman Daerah	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00
3.1.2.4					
	PEMBIAYAAN NETTO	121.670.437.000,00	253.110.831.000,00	131.440.394.000,00	108,03
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00

Penang, 10 October 2015
BUPATI PEMALANG

JUNAEDI

Lampiran I Peraturan Daerah
 Nomor : 14 TAHUN 2016
 Tanggal : 13 September 2016

 PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG RINGKASAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016					
NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN	1.803.937.319.000,00	2.264.674.144.000,00	460.736.825.000,00	25,54
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	212.482.621.000,00	246.679.817.000,00	34.197.196.000,00	16,09
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	40.205.000.000,00	41.440.000.000,00	1.235.000.000,00	3,07
1.1.1.1	Hasil Retribusi Daerah	23.493.000.000,00	23.272.528.000,00	(220.480.000,00)	(0,94)
1.1.1.2	Hasil Penghasilan Kelayakan Daerah yang Dipisahkan	13.537.621.000,00	37.153.817.000,00	23.216.196.000,00	166,57
1.1.1.3	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	134.846.992.000,00	144.813.472.000,00	9.966.480.000,00	7,39
1.1.1.4		1.099.222.494.000,00	1.658.120.676.000,00	558.898.182.000,00	50,84
1.2	DANA PERIMBANGAN	40.239.964.000,00	37.993.311.000,00	(2.246.653.000,00)	(5,58)
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	1.058.982.530.000,00	1.197.916.501.000,00	138.933.971.000,00	13,12
1.2.2	Dana Abdi Umum	0,00	422.210.864.000,00	422.210.864.000,00	0,00
1.2.3	Dana Abdi Khusus	492.332.204.000,00	359.873.651.000,00	(132.358.553.000,00)	(26,89)
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	12.075.155.000,00	9.075.155.000,00	(3.000.000.000,00)	(24,84)
1.3.1	Pendapatan Hibah	117.578.117.000,00	149.849.646.000,00	32.271.529.000,00	27,45
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	295.959.400.000,00	0,00	(295.959.400.000,00)	(100,00)
1.3.4	Dana Penyelesaian dan Otonomi Khusus	0,00	51.341.500.000,00	51.341.500.000,00	0,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	66.619.532.000,00	149.607.350.000,00	82.987.818.000,00	124,57
1.3.6	Abdi Dana Desa				
2	BELANJA	1.832.248.065.000,00	2.482.486.475.000,00	650.238.410.000,00	35,49
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.344.394.787.000,00	1.531.807.678.000,00	187.412.891.000,00	13,94
2.1.1	Belanja Pegawai	1.104.543.819.000,00	1.176.727.525.000,00	72.183.706.000,00	6,54
2.1.2	Belanja Bunga	71.187.000,00	71.187.000,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	8.625.000.000,00	23.995.315.000,00	15.370.315.000,00	178,21
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	2.400.000.000,00	5.380.000.000,00	2.880.000.000,00	120,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	6.379.688.000,00	6.503.188.000,00	123.500.000,00	1,94
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	226.375.093.000,00	318.230.463.000,00	97.855.370.000,00	44,40
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	1.000.000.000,00	(1.000.000.000,00)	(50,00)
2.2	BELANJA LANGSUNG	487.853.278.000,00	950.648.797.000,00	462.795.519.000,00	94,86
2.2.1	Belanja Pegawai	96.811.516.950,00	110.929.891.300,00	14.118.374.350,00	14,58

RINGKASAN PERUBAHAN APBD
 Lembar 1 dari 1

Halaman 1

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
2.2.2 2.2.3	Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal	293.318.431.820,00 97.723.329.230,00	494.557.657.620,00 345.161.248.080,00	201.239.226.800,00 247.437.918.850,00	68,61 253,20
3	SURPLUS / (DEFISIT)	(28.310.746.000,00)	(217.782.331.000,00)	(189.471.585.000,00)	669,26
3.1	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	52.500.000.000,00	265.374.585.000,00	213.374.585.000,00	406,43
3.1.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	48.100.000.000,00	261.474.585.000,00	213.374.585.000,00	443,61
3.1.1.5	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	4.400.000.000,00	4.400.000.000,00	0,00	0,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	24.189.254.000,00	48.092.254.000,00	23.903.000.000,00	98,82
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	19.712.000.000,00	43.615.000.000,00	23.903.000.000,00	121,26
3.2.3	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	477.254.000,00	477.254.000,00	0,00	0,00
3.2.4	Pembayaran Pokok Utang	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00
	Penerimaan Pinjaman Daerah				
	PEMBIAYAAN NETTO	28.310.746.000,00	217.782.331.000,00	189.471.585.000,00	669,26
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>Penalang, 13 September 2016</p> <p>BUPATI PEMALANG</p> <p>JUNAEDI</p>					
<p>KEMASUKAN PERUBAHAN APBD</p> <p>Emilia Ety Sudi</p>					
					Halaman 2

Lampiran Ia PERATURAN BUPATI PEMALANG
 Nomor : 45 TAHUN 2017
 Tanggal : 25 September 2017

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2017


NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4	PENDAPATAN					
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.117.211.252.000,00	2.366.403.484.000,00	249.192.232.000,00	11,77	
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	249.273.252.000,00	405.333.931.000,00	156.060.679.000,00	62,61	
4.1.1.01	Pajak Hotel	46.334.000.000,00	54.232.000.000,00	8.898.000.000,00	19,63	
4.1.1.01.09	Hotel Melati Satu	286.000.000,00	310.000.000,00	24.000.000,00	8,39	Perda Kab.Pemalang No.1 Tahun 2012
4.1.1.02	Pajak Restoran	605.000.000,00	640.000.000,00	35.000.000,00	5,79	Perda Kab.Pemalang No.1 Tahun 2012
4.1.1.02.01	Restoran	605.000.000,00	640.000.000,00	35.000.000,00	5,79	Perda Kab.Pemalang No.1 Tahun 2012
4.1.1.03	Pajak Hiburan	110.000.000,00	200.000.000,00	90.000.000,00	81,82	Perda Kab.Pemalang No.1 Tahun 2012
4.1.1.03.01	Tontonan Film/Elokop	110.000.000,00	200.000.000,00	90.000.000,00	81,82	Perda Kab.Pemalang No.1 Tahun 2012
4.1.1.04	Pajak Reklame	1.138.500.000,00	1.200.000.000,00	61.500.000,00	5,40	Perda Kab.Pemalang No.1 Tahun 2012
4.1.1.04.01	Reklame Papan/Bill Board/Videootron/ megatron	1.138.500.000,00	1.200.000.000,00	61.500.000,00	5,40	Perda Kab.Pemalang No.1 Tahun 2012
4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	24.860.000.000,00	30.000.000.000,00	5.140.000.000,00	20,68	Perda Kab.Pemalang No.1 Tahun 2012
4.1.1.05.01	Pajak Penerangan Jalan PLN	24.860.000.000,00	30.000.000.000,00	5.140.000.000,00	20,68	Perda Kab.Pemalang No.1 Tahun 2012
4.1.1.06	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	247.500.000,00	750.000.000,00	502.500.000,00	203,03	Perda Kab.Pemalang No.1 Tahun 2012
4.1.1.06.23	Pasir dan Kerikil	247.500.000,00	750.000.000,00	502.500.000,00	203,03	Perda Kab.Pemalang No.1 Tahun 2012
4.1.1.07	Pajak Parkir	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	Perda Kab.Pemalang No.1 Tahun 2012
4.1.1.07.01	Pajak Parkir	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	Perda Kab.Pemalang No.1 Tahun 2012
4.1.1.08	Pajak Air Bawah Tanah	99.000.000,00	99.000.000,00	0,00	0,00	Perda Kab.Pemalang No.1 Tahun 2012
4.1.1.08.01	Pajak Air Bawah Tanah	99.000.000,00	99.000.000,00	0,00	0,00	Perda Kab.Pemalang No.1 Tahun 2012
4.1.1.09	Pajak Sarang Burung Walet	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	Perda Kab.Pemalang No.1 Tahun 2012
4.1.1.09.01	Pajak Sarang Burung Walet	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	Perda Kab.Pemalang No.1 Tahun 2012
4.1.1.11	Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHHTB)	4.455.000.000,00	7.500.000.000,00	3.045.000.000,00	68,35	Perda Kab.Pemalang No.1 Tahun 2012
4.1.1.11.01	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHHTB)	4.455.000.000,00	7.500.000.000,00	3.045.000.000,00	68,35	Perda Kab.Pemalang No.1 Tahun 2012
4.1.1.12	Pajak Bumi dan Bangunan	13.500.000.000,00	13.500.000.000,00	0,00	0,00	Perda Kab.Pemalang No.1 Tahun 2012

RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Halaman

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.1.1.12.01	Pajak Bumi dan Bangunan	13.500.000.000,00	13.500.000.000,00	0,00	0,00	Perda Kab. Pemalang No.1 Tahun 2012
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	24.358.028.000,00	25.737.744.000,00	1.379.716.000,00	5,66	
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	15.815.625.000,00	16.423.845.000,00	608.216.000,00	3,85	
4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	9.500.000.000,00	10.000.000.000,00	500.000.000,00	5,26	Perda Kab. Pemalang No. 3 Th 2012
4.1.2.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.297.516.000,00	1.357.481.000,00	59.665.000,00	4,60	Perda Kab. Pemalang No. 3 Th 2012
4.1.2.01.04	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat	3.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	33,33	Perda Kab. Pemalang No. 3 Th 2012
4.1.2.01.05	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	410.500.000,00	410.500.000,00	0,00	0,00	Perda Kab. Pemalang No. 3 Th 2012
4.1.2.01.06	Retribusi Pelayanan Pasar	4.259.313.000,00	4.304.864.000,00	45.551.000,00	1,07	Perda Kab. Pemalang No. 3 Th 2012
4.1.2.01.07	Retribusi Pelayanan Kendaraan bermotor	330.000.000,00	330.000.000,00	0,00	0,00	Perda Kab. Pemalang No. 3 Th 2012
4.1.2.01.16	Retribusi Penyediaan dan/atau penyedotan kakus	15.000.000,00	17.000.000,00	2.000.000,00	13,33	Perda Kab. Pemalang No. 3 Th 2012
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	5.818.395.000,00	6.373.899.000,00	555.500.000,00	9,55	Perda Kab. Pemalang No. 03 Tahun 2012
4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	396.000.000,00	424.500.000,00	26.500.000,00	6,66	Perda Kab. Pemalang No. 2 Th 2012
4.1.2.02.02	Retribusi Jasa Usaha Pasar Grosir/Pertokoan	404.899.000,00	428.899.000,00	24.000.000,00	5,93	Perda Kab. Pemalang No. 2 Th 2012
4.1.2.02.03	Retribusi Tempat Pelelangan	1.184.000.000,00	1.584.000.000,00	400.000.000,00	33,78	Perda Kab. Pemalang No. 2 Th 2012
4.1.2.02.04	Retribusi Jasa Usaha Terminal	625.000.000,00	625.000.000,00	0,00	0,00	Perda Kab. Pemalang No. 2 Th 2012
4.1.2.02.08	Retribusi Rumah Potong Hewan	71.500.000,00	74.500.000,00	3.000.000,00	4,20	Perda Kab. Pemalang No. 2 Th 2012
4.1.2.02.10	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	3.135.000.000,00	3.237.000.000,00	102.000.000,00	3,25	Perda Kab. Pemalang No. 2 Th 2012
4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	2.724.000.000,00	2.940.000.000,00	216.000.000,00	7,93	
4.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.460.000.000,00	1.550.000.000,00	90.000.000,00	13,01	Perda Kab. Pemalang No. 4 Th 2012
4.1.2.03.03	Retribusi Izin Ganguan/Keramaian	1.220.000.000,00	1.249.710.000,00	29.710.000,00	2,44	Perda Kab. Pemalang No. 4 Th 2012
4.1.2.03.04	Retribusi Izin Trayek	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Perda Kab. Pemalang No. 4 Th 2012
4.1.2.03.05	Retribusi Izin Usaha Perikanan	4.000.000,00	290.000,00	(3.710.000,00)	(92,75)	Perda Kab. Pemalang No. 4 Th 2012
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17.303.752.000,00	15.471.277.000,00	(1.832.475.000,00)	(10,59)	
4.1.3.01	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	4.875.031.000,00	3.982.749.000,00	(892.282.000,00)	(18,30)	
4.1.3.01.01	Perusahaan Daerah Air Minum	4.537.000.000,00	3.646.839.000,00	(890.161.000,00)	(19,62)	
4.1.3.01.02	Perusahaan Daerah Bank Pemalang	335.031.000,00	335.910.000,00	879.000,00	(0,63)	
4.1.3.02	Bagian Laba Lembaga Keuangan Bank	12.428.721.000,00	11.488.528.000,00	(940.193.000,00)	(7,56)	
4.1.3.02.01	Bank Pembangunan Daerah	9.874.800.000,00	10.486.976.000,00	614.176.000,00	6,22	
4.1.3.02.02	PD. BPR BKK Tampan	1.023.954.000,00	999.552.000,00	(24.402.000,00)	(2,38)	
4.1.3.02.03	PD. BKK Pemalang	1.529.967.000,00	0,00	(1.529.967.000,00)	(100,00)	
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	162.277.472.000,00	309.892.910.000,00	147.615.438.000,00	90,96	
4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	135.000.000,00	331.000.000,00	196.000.000,00	145,19	
4.1.4.01.02	Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor tidak terpakai	6.000.000,00	35.000.000,00	29.000.000,00	483,33	

RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBJEK PENGAPATAN, BELANJA DAN PEMBIYARAN



Halaman

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.1.4.01.05	Penjualan Kendaraan Dinas roda dua	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.01.06	Penjualan Kendaraan Dinas roda empat	12.000.000,00	179.000.000,00	167.000.000,00	1.391,67	
4.1.4.01.10	Penjualan bahan-bahan Bekas Bangunan	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.02	Penerimaan Jasa Giro	5.000.000.000,00	6.000.000.000,00	1.000.000.000,00	20,00	
4.1.4.02.01	Jasa Giro Kas Daerah	4.250.000.000,00	5.000.000.000,00	750.000.000,00	17,65	
4.1.4.02.02	Jasa Giro Pemegang Kas/Bendahara	750.000.000,00	1.000.000.000,00	250.000.000,00	33,33	
4.1.4.03	Penerimaan Bunga	14.500.000.000,00	7.250.000.000,00	(7.250.000.000,00)	(50,00)	
4.1.4.03.01	Rekening Deposito pada Bank	14.500.000.000,00	7.250.000.000,00	(7.250.000.000,00)	(50,00)	
4.1.4.04	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	0,00	57.326.000,00	57.326.000,00	0,00	
4.1.4.04.01	Kerugian Uang Daerah	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
4.1.4.04.02	Kerugian Barang Daerah	0,00	42.326.000,00	42.326.000,00	0,00	
4.1.4.07	Pendapatan Denda Pajak	0,00	77.594.000,00	77.594.000,00	0,00	
4.1.4.07.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	0,00	77.594.000,00	77.594.000,00	0,00	
4.1.4.08	Pendapatan Denda Retribusi	265.000.000,00	265.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.08.01	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	265.000.000,00	265.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.09	Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan	0,00	889.332.000,00	889.332.000,00	0,00	
4.1.4.09.01	Hasil Eksekusi Jaminan atas Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	889.332.000,00	889.332.000,00	0,00	
4.1.4.10	Pendapatan Dari Pengembalian	0,00	891.813.000,00	891.813.000,00	0,00	
4.1.4.10.03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran Gaji dan Tunjangan	0,00	164.133.000,00	164.133.000,00	0,00	
4.1.4.10.06	Pendapatan dari pengembalian Non C2/hasil Laporan Hasil Pemeriksaan	0,00	727.680.000,00	727.680.000,00	0,00	
4.1.4.14	Penerimaan Lain-Lain	0,00	6.089.000,00	6.089.000,00	0,00	
4.1.4.14.01	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	0,00	6.089.000,00	6.089.000,00	0,00	
4.1.4.15	Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	82.225.000.000,00	82.225.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.15.01	Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD dr M Ashari	82.225.000.000,00	82.225.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.16	Pendapatan Sewa	4.652.472.000,00	3.317.606.000,00	(1.334.866.000,00)	(28,69)	
4.1.4.16.01	Pendapatan Sewa Tanah Dana Pendidikan	1.675.000.000,00	0,00	(1.675.000.000,00)	(100,00)	
4.1.4.16.02	Pendapatan Sewa Tanah Eks Borda Deso	2.000.000.000,00	2.100.000.000,00	100.000.000,00	5,00	
4.1.4.16.03	Pendapatan Sewa Tanah Lainnya	76.016.000,00	65.000.000,00	(11.016.000,00)	(14,49)	
4.1.4.16.04	Pendapatan Sewa Gedung dan Bangunan	901.456.000,00	1.152.606.000,00	251.150.000,00	27,86	
4.1.4.17	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada RKTP	55.500.000.000,00	57.000.000.000,00	1.500.000.000,00	2,70	
4.1.4.17.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Banyumudal	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	

RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASAR RINCIAN DEKAT, BELAKA DAN PEMBIAYAN

Halaman

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.1.4.17.02	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Warungpring	1.430.000.000,00	1.500.000.000,00	70.000.000,00	4,90	
4.1.4.17.03	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Pulosari	2.952.000.000,00	3.025.000.000,00	73.000.000,00	2,47	
4.1.4.17.04	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Belik	5.150.000.000,00	5.175.000.000,00	25.000.000,00	0,49	
4.1.4.17.05	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Watukumpul	2.840.000.000,00	2.950.000.000,00	110.000.000,00	3,87	
4.1.4.17.06	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Kebandaran	2.720.000.000,00	2.800.000.000,00	80.000.000,00	2,94	
4.1.4.17.07	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Bantarbolang	3.190.000.000,00	3.250.000.000,00	60.000.000,00	1,88	
4.1.4.17.08	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Randudongkal	1.870.000.000,00	1.950.000.000,00	80.000.000,00	4,28	
4.1.4.17.09	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Kalimas	1.350.000.000,00	1.375.000.000,00	25.000.000,00	1,85	
4.1.4.17.10	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Paduraksa	1.530.000.000,00	1.580.000.000,00	50.000.000,00	3,27	
4.1.4.17.11	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Muhoarjo	1.910.000.000,00	1.910.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.17.12	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Kebondalem	2.370.000.000,00	2.425.000.000,00	55.000.000,00	2,32	
4.1.4.17.13	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Banjarbaru	2.050.000.000,00	2.125.000.000,00	75.000.000,00	3,66	
4.1.4.17.14	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Kabunan	2.175.000.000,00	2.200.000.000,00	25.000.000,00	1,15	
4.1.4.17.15	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Jebel	2.350.000.000,00	2.350.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.17.16	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Petruhan	3.945.000.000,00	4.010.000.000,00	65.000.000,00	1,65	
4.1.4.17.17	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Klareyan	3.130.000.000,00	3.340.000.000,00	210.000.000,00	6,71	
4.1.4.17.18	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Losari	3.340.000.000,00	3.425.000.000,00	85.000.000,00	2,54	
4.1.4.17.19	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Purwoharjo	2.670.000.000,00	2.800.000.000,00	130.000.000,00	4,87	
4.1.4.17.20	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Sarwodadi	1.195.000.000,00	1.275.000.000,00	80.000.000,00	6,69	
4.1.4.17.21	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Rowosari	1.480.000.000,00	1.682.000.000,00	202.000.000,00	13,65	
4.1.4.17.22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Mojo	2.853.000.000,00	2.853.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.19	Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	151.582.160.000,00	151.582.160.000,00	0,00	
4.1.4.19.01	Dana BOS SD Negeri	0,00	105.988.160.000,00	105.988.160.000,00	0,00	
4.1.4.19.02	Dana BOS SMP Negeri	0,00	45.594.000.000,00	45.594.000.000,00	0,00	
4.2	DANA PERIMBANGAN	1.587.692.533.000,00	1.599.147.048.000,00	11.454.515.000,00	0,72	
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	31.636.180.000,00	40.591.357.000,00	8.955.177.000,00	28,31	
4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak	39.656.317.000,00	38.032.765.000,00	8.376.448.000,00	28,25	
4.2.1.01.01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	15.585.035.000,00	13.478.284.000,00	(2.106.751.000,00)	(13,52)	
4.2.1.01.03	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang Pribadi dalam negeri	14.071.282.000,00	17.550.664.000,00	3.479.382.000,00	24,73	
4.2.1.01.04	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	0,00	7.003.817.000,00	7.003.817.000,00	0,00	
4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1.979.863.000,00	2.558.592.000,00	578.729.000,00	29,23	
4.2.1.02.02	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	446.728.000,00	540.414.000,00	91.686.000,00	20,43	
4.2.1.02.07	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	1.051.083.000,00	1.493.124.000,00	442.041.000,00	42,06	
4.2.1.02.08	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	443.433.000,00	54.762.000,00	(388.671.000,00)	(87,65)	
4.2.1.02.09	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	0,00	413.252.000,00	413.252.000,00	0,00	

RINCIAN PERUBAHAN APBD BERASASAKAN RINCIAN DEKRE PERUBAHAN, BELANJA DAN PEMERINTAH

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.2.1.02.10 4.2.1.02.12	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi Bagi Hasil dari SDA Mineral dan Batu Bara	36.061.000,00 558.000,00	53.945.000,00 3.095.000,00	17.884.000,00 2.537.000,00	49,59 454,66	
4.2.2 4.2.2.01 4.2.2.01.01	Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Umum	1.284.676.435.000,00 1.284.676.435.000,00 1.284.676.435.000,00	1.197.916.501.000,00 1.197.916.501.000,00 1.197.916.501.000,00	(86.759.934.000,00) (86.759.934.000,00) (86.759.934.000,00)	(6,75) (6,75) (6,75)	
4.2.3 4.2.3.02 4.2.3.02.01 4.2.3.02.02 4.2.3.02.04 4.2.3.02.05 4.2.3.02.09 4.2.3.02.10 4.2.3.02.11	Dana Alokasi Khusus Dana Alokasi Khusus Fisik DAK Fisik Bidang Pendidikan DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB DAK Fisik Bidang Keadulaan Pangan dan Pertanian DAK Fisik Bidang Keadulaan dan Perikanan DAK Fisik Penugasan Jalan (Pendukung Konektivitas) DAK Fisik Penugasan Pasar DAK Fisik Penugasan Triptasi (Pendukung Keadulaan Pangan)	271.379.918.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	360.639.190.000,00 70.470.090.000,00 14.959.000.000,00 19.853.000.000,00 4.800.090.000,00 1.311.000.000,00 22.508.000.000,00 852.000.000,00 6.187.000.000,00	89.259.272.000,00 70.470.090.000,00 14.959.000.000,00 19.853.000.000,00 4.800.090.000,00 1.311.000.000,00 22.508.000.000,00 852.000.000,00 6.187.000.000,00	32,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	SE Mendagri No.905/S01/SJ SE Mendagri No.905/S01/SJ SE Mendagri No.905/S01/SJ SE Mendagri No.905/S01/SJ
4.2.3.03 4.2.3.03.01 4.2.3.03.02 4.2.3.03.03 4.2.3.03.04 4.2.3.03.05 4.2.3.03.06 4.2.3.03.07 4.2.3.03.08 4.2.3.03.09	Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tunjangan Profesi Guru PNSD Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tambahan Penghasilan Guru PNSD Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dana Alokasi Khusus Non Fisik Akreditasi Puskesmas Dana Alokasi Khusus Non Fisik Jamnihan Penyalinan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional KB Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tunjangan Khusus Guru Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	271.379.918.000,00 0,00 267.409.218.000,00 3.970.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	290.169.100.000,00 17.220.600.000,00 250.171.702.000,00 3.732.000.000,00 10.236.317.000,00 1.395.124.000,00 3.007.614.000,00 604.170.000,00 739.234.000,00 3.062.339.000,00	18.789.182.000,00 17.220.600.000,00 (17.237.516.000,00) (238.708.000,00) 10.236.317.000,00 1.395.124.000,00 3.007.614.000,00 604.170.000,00 739.234.000,00 3.062.339.000,00	6,92 0,00 (6,45) (6,01) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	SE Mendagri No.905/S01/SJ SE Mendagri No.905/S01/SJ SE Mendagri No.905/S01/SJ SE Mendagri No.905/S01/SJ SE Mendagri No.905/S01/SJ SE Mendagri No.905/S01/SJ SE Mendagri No.905/S01/SJ SE Mendagri No.905/S01/SJ
4.3 4.3.1 4.3.1.01 4.3.1.01.01 4.3.1.03	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Pendapatan Hibah Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Pemerintah Pendapatan Hibah Dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	280.245.467.000,00 9.060.000.000,00 9.000.000.000,00 9.000.000.000,00 60.000.000,00	361.922.505.000,00 9.060.000.000,00 9.000.000.000,00 9.000.000.000,00 60.000.000,00	81.677.038.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	29,14 0,00 0,00 0,00 0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.3.1.03.01	Badan/lembaga /organisasi swasta	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	121.578.117.000,00	124.737.092.000,00	3.158.975.000,00	2,60	
4.3.3.01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	121.578.117.000,00	124.737.092.000,00	3.158.975.000,00	2,60	
4.3.3.01.01	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	18.735.916.000,00	21.894.891.000,00	3.158.975.000,00	16,86	
4.3.3.01.03	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	43.026.647.000,00	43.026.647.000,00	0,00	0,00	
4.3.3.01.05	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	30.135.143.000,00	30.135.143.000,00	0,00	0,00	
4.3.3.01.07	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	47.695.000,00	47.695.000,00	0,00	0,00	
4.3.3.01.14	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	29.632.716.000,00	29.632.716.000,00	0,00	0,00	
4.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	37.123.330.000,00	37.123.330.000,00	0,00	
4.3.5.01	Bantuan Keuangan Dari Provinsi	0,00	37.123.330.000,00	37.123.330.000,00	0,00	
4.3.5.01.01	Bantuan Keuangan Dari Provinsi	0,00	37.123.330.000,00	37.123.330.000,00	0,00	
4.3.6	Alokasi Dana Desa	149.607.350.000,00	191.002.083.000,00	41.394.733.000,00	27,67	
4.3.6.01	Alokasi Dana Desa	149.607.350.000,00	191.002.083.000,00	41.394.733.000,00	27,67	
4.3.6.01.01	Alokasi Dana Desa	149.607.350.000,00	191.002.083.000,00	41.394.733.000,00	27,67	
5	BELANJA	2.141.783.328.000,00	2.502.244.546.000,00	360.461.218.000,00	16,83	
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.491.303.988.000,00	1.395.672.302.000,00	(96.231.686.000,00)	(6,45)	
5.1.1	Belanja Pegawai	1.110.896.440.000,00	999.761.681.000,00	(111.134.759.000,00)	(10,00)	
5.1.1.01	Gaji Dan Tunjangan	1.063.418.619.000,00	946.649.390.000,00	(114.769.229.000,00)	(10,79)	
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	556.005.639.000,00	533.489.401.000,00	(22.516.238.000,00)	(4,05)	
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	56.526.521.000,00	49.551.246.000,00	(6.975.275.000,00)	(12,34)	
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	8.179.945.000,00	8.180.045.000,00	100.000,00	0,00	
5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	40.870.263.000,00	34.555.563.000,00	(6.314.700.000,00)	(15,45)	
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	11.651.760.000,00	9.666.580.000,00	(1.985.180.000,00)	(17,04)	
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	36.254.825.000,00	27.778.951.000,00	(8.475.874.000,00)	(23,38)	
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	714.546.000,00	376.094.000,00	(338.452.000,00)	(47,37)	
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	11.150.000,00	11.415.000,00	265.000,00	2,38	
5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	19.403.063.000,00	15.282.758.000,00	(4.120.305.000,00)	(21,24)	
5.1.1.01.10	Uang Paket	32.400.000,00	95.508.000,00	63.108.000,00	194,75	
5.1.1.01.11	Tunjangan Panitia Musyawarah	32.400.000,00	32.400.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.12	Tunjangan Komisi	61.388.000,00	61.388.000,00	0,00	0,00	

RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN DOKTER PENCIPTAAN, BELANJA DAN PEMERIKSAAN

Halaman

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.1.1.01.13	Tunjangan Panitia Anggaran	32.400.000,00	32.400.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.14	Tunjangan Badan Kehormatan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	44.945.000,00	44.945.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.16	Tunjangan Perumahan	4.344.000.000,00	5.041.000.000,00	697.000.000,00	16,05	
5.1.1.01.17	Uang Duka Wafat/Tewas	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.18	Uang Jasa Pengabdian	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.20	Tunjangan Kompensasi	252.705.000,00	291.438.000,00	(1.267.000,00)	(0,43)	
5.1.1.01.21	Turan jaminan kecelakaan kerja dan kematian	3.186.587.000,00	2.584.483.000,00	(602.084.000,00)	(18,89)	
5.1.1.01.22	Tunjangan Profesi Guru PNSD	321.581.294.000,00	253.047.390.000,00	(68.533.904.000,00)	(21,31)	
5.1.1.01.23	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	3.970.700.000,00	5.332.385.000,00	1.361.685.000,00	34,29	
5.1.1.01.24	Tunjangan Reses	0,00	735.000.000,00	735.000.000,00	0,00	
5.1.1.01.25	Tunjangan Transportasi	0,00	2.300.000.000,00	2.300.000.000,00	0,00	
5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	39.755.100.000,00	39.765.900.000,00	10.800.000,00	0,03	
5.1.1.02.01	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	39.755.100.000,00	39.765.900.000,00	10.800.000,00	0,03	
5.1.1.03	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dan Anggota DPRD	4.773.120.000,00	7.075.620.000,00	2.302.500.000,00	48,24	
	Serta KDH/WKDH					
5.1.1.03.01	Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.780.000.000,00	6.082.500.000,00	2.302.500.000,00	60,91	
5.1.1.03.02	Biaya Penunjang Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.03.03	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00	393.120.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.04	Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi	2.949.601.000,00	3.531.537.000,00	581.936.000,00	19,73	
5.1.1.04.02	Insentif pemungutan Pajak Daerah	2.266.700.000,00	2.711.600.000,00	444.900.000,00	19,63	Peraturan Pemerintah No 69 Tahun 2010
5.1.1.04.04	Insentif pemungutan retribusi	682.901.000,00	819.937.000,00	137.036.000,00	20,07	Peraturan Pemerintah No 69 Tahun 2010
5.1.1.05	Penghasilan Lainnya	0,00	739.234.000,00	739.234.000,00	0,00	
5.1.1.05.04	Tunjangan Khusus Guru	0,00	739.234.000,00	739.234.000,00	0,00	
5.1.1.4	Belanja Hibah	69.625.000.000,00	22.990.400.000,00	(46.634.600.000,00)	(66,98)	
5.1.1.4.01	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat	625.000.000,00	0,00	(625.000.000,00)	(100,00)	
5.1.1.4.01.01	Pemerintah Pusat	625.000.000,00	0,00	(625.000.000,00)	(100,00)	
5.1.1.4.05	Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi	69.000.000.000,00	22.990.400.000,00	(46.009.600.000,00)	(66,68)	
5.1.1.4.05.01	Badan / Lembaga / Organisasi....	69.000.000.000,00	22.990.400.000,00	(46.009.600.000,00)	(66,68)	
5.1.1.5	Belanja Bantuan Sosial	1.680.000.000,00	3.005.000.000,00	1.325.000.000,00	78,87	
5.1.1.5.02	Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat	1.000.000.000,00	2.225.000.000,00	1.225.000.000,00	122,50	
5.1.1.5.02.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat....	1.000.000.000,00	2.225.000.000,00	1.225.000.000,00	122,50	
5.1.1.5.05	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu dan/atau Keluarga	680.000.000,00	780.000.000,00	100.000.000,00	14,71	

RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN DEKAT PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIYARAN

Halamar

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.1.5.05.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu dan/atau Keluarga	680.000.000,00	780.000.000,00	100.000.000,00	14,71	
5.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	6.929.702.000,00	7.996.975.000,00	1.067.273.000,00	15,40	
5.1.6.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	4.533.400.000,00	5.423.200.000,00	889.800.000,00	19,63	
5.1.6.03.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa ...	4.533.400.000,00	5.423.200.000,00	889.800.000,00	19,63	
5.1.6.05	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	2.396.302.000,00	2.573.775.000,00	177.473.000,00	7,41	
5.1.6.05.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa ...	2.396.302.000,00	2.573.775.000,00	177.473.000,00	7,41	
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	380.772.846.000,00	358.918.246.000,00	58.145.400.000,00	15,33	
5.1.7.03	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	150.256.332.000,00	167.006.999.000,00	16.750.667.000,00	11,15	
5.1.7.03.01	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	132.969.433.000,00	136.720.100.000,00	3.750.667.000,00	2,82	
5.1.7.03.03	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Plakaran Kecamatan Moga	394.726.000,00	394.726.000,00	0,00	0,00	
5.1.7.03.05	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Walangsanga Kecamatan Moga	154.482.000,00	154.482.000,00	0,00	0,00	
5.1.7.03.08	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Banyumudal Kecamatan Moga	0,00	324.400.000,00	324.400.000,00	0,00	
5.1.7.03.10	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Kabanggan Kecamatan Moga	340.001.000,00	340.001.000,00	0,00	0,00	
5.1.7.03.11	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Pepedan Kecamatan Moga	213.450.000,00	213.450.000,00	0,00	0,00	
5.1.7.03.12	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Gendoang Kecamatan Moga	210.227.000,00	210.227.000,00	0,00	0,00	
5.1.7.03.13	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Cikotakan Kecamatan Pulosari	0,00	2.140.003.000,00	2.140.003.000,00	0,00	
5.1.7.03.14	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Batusari Kecamatan Pulosari	325.407.000,00	651.828.000,00	322.421.000,00	97,88	
5.1.7.03.15	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Penakir Kecamatan Pulosari	315.648.000,00	315.648.000,00	0,00	0,00	
5.1.7.03.16	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Gunungzari Kecamatan Pulosari	381.115.000,00	381.115.000,00	0,00	0,00	
5.1.7.03.18	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Gambuhan Kecamatan Pulosari	367.495.000,00	367.495.000,00	0,00	0,00	
5.1.7.03.20	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Nyalembeng Kecamatan Pulosari	399.810.000,00	399.810.000,00	0,00	0,00	
5.1.7.03.23	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Siremang Kecamatan Pulosari	0,00	377.379.000,00	377.379.000,00	0,00	

RINCIAN PERUBAHAN USD BERDASAR RINCIAN ORFET PENDAPATAN, BELAJA DAN PERUBAHAN

Halamar

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.1.7.03.24	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Cikendung Kecamatan Pulosari	0,00	347.100.000,00	347.100.000,00	0,00	
5.1.7.03.25	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Gombong Kecamatan Belik	148.692.000,00	308.889.000,00	160.197.000,00	107,74	
5.1.7.03.26	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Belik Kecamatan Belik	0,00	330.100.000,00	330.100.000,00	0,00	
5.1.7.03.28	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Kuta Kecamatan Belik	321.150.000,00	321.150.000,00	0,00	0,00	
5.1.7.03.30	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Kalihaleh Kecamatan Belik	88.951.000,00	88.951.000,00	0,00	0,00	
5.1.7.03.31	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Gunungjaya Kecamatan Belik	313.761.000,00	313.761.000,00	0,00	0,00	
5.1.7.03.35	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Bulakan Kecamatan Belik	358.171.000,00	358.171.000,00	0,00	0,00	
5.1.7.03.37	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Tlagasana Kecamatan Watukumpul	0,00	294.000.000,00	294.000.000,00	0,00	
5.1.7.03.38	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Tundagan Kecamatan Watukumpul	0,00	289.700.000,00	289.700.000,00	0,00	
5.1.7.03.39	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Bongas Kecamatan Watukumpul	0,00	356.937.000,00	356.937.000,00	0,00	
5.1.7.03.44	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Bodas Kecamatan Watukumpul	356.937.000,00	0,00	(356.937.000,00)	(100,00)	
5.1.7.03.46	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Majalangu Kecamatan Watukumpul	140.577.000,00	140.577.000,00	0,00	0,00	
5.1.7.03.47	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Tambi Kecamatan Watukumpul	350.932.000,00	350.932.000,00	0,00	0,00	
5.1.7.03.48	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Watukumpul Kecamatan Watukumpul	0,00	305.400.000,00	305.400.000,00	0,00	
5.1.7.03.54	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Sikayu Kecamatan Comal	0,00	266.600.000,00	266.600.000,00	0,00	
5.1.7.03.56	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Kauman Kecamatan Comal	0,00	291.300.000,00	291.300.000,00	0,00	
5.1.7.03.61	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Gintung Kecamatan Comal	0,00	254.000.000,00	254.000.000,00	0,00	
5.1.7.03.63	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Sarwodadi Kecamatan Comal	15.120.000,00	127.120.000,00	112.000.000,00	740,74	
5.1.7.03.64	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Susukan Kecamatan Comal	352.683.000,00	352.683.000,00	0,00	0,00	
5.1.7.03.65	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Klegan Kecamatan Comal	274.747.000,00	274.747.000,00	0,00	0,00	
5.1.7.03.68	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Kandang Kecamatan Comal	276.910.000,00	276.910.000,00	0,00	0,00	
5.1.7.03.74	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Samong Kecamatan Lujami	0,00	299.800.000,00	299.800.000,00	0,00	

KINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN DIBEK PENDAPATAN, BELAJA DAN PEMBIAYAN

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.1.7.03.75	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Tasikrejo Kecamatan Ulujami	397.606.000,00	397.606.000,00	0,00	0,00	
5.1.7.03.77	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Kaliprau Kecamatan Ulujami	0,00	335.300.000,00	335.300.000,00	0,00	
5.1.7.03.79	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Pamutih Kecamatan Ulujami	0,00	286.600.000,00	286.600.000,00	0,00	
5.1.7.03.80	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Padak Kecamatan Ulujami	113.149.000,00	113.149.000,00	0,00	0,00	
5.1.7.03.81	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Blerending Kecamatan Ulujami	208.740.000,00	208.740.000,00	0,00	0,00	
5.1.7.03.82	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Ketapang Kecamatan Ulujami	0,00	321.600.000,00	321.600.000,00	0,00	
5.1.7.03.84	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Mojo Kecamatan Ulujami	300.360.000,00	300.360.000,00	0,00	0,00	
5.1.7.03.86	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Pagergunung Kecamatan Ulujami	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.7.03.91	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Kwasen Kecamatan Bodeh	320.161.000,00	320.161.000,00	0,00	0,00	
5.1.7.03.92	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Jatroyom Kecamatan Bodeh	256.735.000,00	256.735.000,00	0,00	0,00	
5.1.7.03.94	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Payung Kecamatan Bodeh	0,00	302.700.000,00	302.700.000,00	0,00	
5.1.7.03.95	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Cangak Kecamatan Bodeh	124.492.000,00	124.492.000,00	0,00	0,00	
5.1.7.03.97	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Kesesiwo Kecamatan Bodeh	356.878.000,00	356.878.000,00	0,00	0,00	
5.1.7.03.99	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Karangbrai Kecamatan Bodeh	277.570.000,00	277.570.000,00	0,00	0,00	
5.1.7.03.00	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Jraganan Kecamatan Bodeh	0,00	328.900.000,00	328.900.000,00	0,00	
5.1.7.03.03	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Muncang Kecamatan Bodeh	359.447.000,00	359.447.000,00	0,00	0,00	
5.1.7.03.06	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Sokawati Kecamatan Ampelgading	176.652.000,00	176.652.000,00	0,00	0,00	
5.1.7.03.07	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Tegalsari Timur Kecamatan Ampelgading	0,00	319.100.000,00	319.100.000,00	0,00	
5.1.7.03.08	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Kemuning Kecamatan Ampelgading	310.918.000,00	310.918.000,00	0,00	0,00	
5.1.7.03.09	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Karangtalok Kecamatan Ampelgading	0,00	330.400.000,00	330.400.000,00	0,00	
5.1.7.03.11	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Blimbing Kecamatan Ampelgading	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	
5.1.7.03.14	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Karangtengah Kecamatan Ampelgading	190.411.000,00	190.411.000,00	0,00	0,00	

RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBJEK PENDAFTARAN, BELANJA DAN PEMBIYARAN

Halaman

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.1.7.03.15	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Banglarangan Kecamatan Ampelgading	346.952.000,00	346.952.000,00	0,00	0,00	
5.1.7.03.17	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Ujunggede Kecamatan Ampelgading	299.880.000,00	299.880.000,00	0,00	0,00	
5.1.7.03.22	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Sumur Kidang Kecamatan Bantarbolang	301.460.000,00	301.460.000,00	0,00	0,00	
5.1.7.03.24	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Pedagung Kecamatan Bantarbolang	397.063.000,00	397.063.000,00	0,00	0,00	
5.1.7.03.25	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Suru Kecamatan Bantarbolang	514.224.000,00	514.224.000,00	0,00	0,00	
5.1.7.03.28	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Kebongede Kecamatan Bantarbolang	0,00	334.300.000,00	334.300.000,00	0,00	
5.1.7.03.33	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Sarwodadi Kecamatan Bantarbolang	324.896.000,00	718.486.000,00	393.600.000,00	121,15	
5.1.7.03.34	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Bantarbolang Kecamatan Bantarbolang	0,00	272.800.000,00	272.800.000,00	0,00	
5.1.7.03.36	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Kuta Kecamatan Bantarbolang	251.822.000,00	251.822.000,00	0,00	0,00	
5.1.7.03.38	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Lenggerong Kecamatan Bantarbolang	315.122.000,00	315.122.000,00	0,00	0,00	
5.1.7.03.40	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Gembyang Kecamatan Randudongkal	152.506.000,00	152.506.000,00	0,00	0,00	
5.1.7.03.41	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Mejagung Kecamatan Randudongkal	123.694.000,00	123.694.000,00	0,00	0,00	
5.1.7.03.42	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Penusupan Kecamatan Randudongkal	161.881.000,00	161.881.000,00	0,00	0,00	
5.1.7.03.44	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal	0,00	283.400.000,00	283.400.000,00	0,00	
5.1.7.03.46	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Semingkir Kecamatan Randudongkal	266.135.000,00	266.135.000,00	0,00	0,00	
5.1.7.03.48	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Tanahbaya Kecamatan Randudongkal	0,00	299.800.000,00	299.800.000,00	0,00	
5.1.7.03.54	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Kalitrong Kecamatan Randudongkal	283.846.000,00	283.846.000,00	0,00	0,00	
5.1.7.03.56	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Gongseng Kecamatan Randudongkal	325.941.000,00	325.941.000,00	0,00	0,00	
5.1.7.03.57	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Pakembaran Kecamatan Warungpring	0,00	296.800.000,00	296.800.000,00	0,00	
5.1.7.03.59	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Karangdawa Kecamatan Warungpring	205.105.000,00	205.105.000,00	0,00	0,00	
5.1.7.03.60	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Datar Kecamatan Warungpring	62.079.000,00	62.079.000,00	0,00	0,00	
5.1.7.03.62	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Mereng Kecamatan Warungpring	344.591.000,00	344.591.000,00	0,00	0,00	

REKAPITULASI PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN GUSKEL DAN PEMBIYARAN

Halaman

RINGKASAN PERUBAHAN APED BERDASARKAN RINCIAN OFSET PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBAYARAN



Halaman

NOMOR URUT	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		Dasar Hukum
		3	4	5 = 4 - 3	6	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.1.7.03.64	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Surajaya Kecamatan Pemalang	0,00	298.800.000,00	298.800.000,00	0,00	
5.1.7.03.69	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Sawaka Kecamatan Pemalang	238.712.000,00	238.712.000,00	0,00	0,00	
5.1.7.03.73	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Tambakrejo Kecamatan Pemalang	0,00	286.300.000,00	286.300.000,00	0,00	
5.1.7.03.77	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Pener Kecamatan Taman	307.046.000,00	307.046.000,00	0,00	0,00	
5.1.7.03.80	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Sokawangi Kecamatan Taman	376.618.000,00	376.618.000,00	0,00	0,00	
5.1.7.03.81	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Kejambon Kecamatan Taman	0,00	316.300.000,00	316.300.000,00	0,00	
5.1.7.03.83	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Cibelok Kecamatan Taman	289.526.000,00	289.526.000,00	0,00	0,00	
5.1.7.03.84	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Banjardawa Kecamatan Taman	0,00	315.200.000,00	315.200.000,00	0,00	
5.1.7.03.89	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Kaligelang Kecamatan Taman	0,00	295.700.000,00	295.700.000,00	0,00	
5.1.7.03.92	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Kedungbanjar Kecamatan Taman	369.293.000,00	369.293.000,00	0,00	0,00	
5.1.7.03.93	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Wanarajan Utara Kecamatan Taman	185.758.000,00	185.758.000,00	0,00	0,00	
5.1.7.03.95	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Kendalsari Kecamatan Petanukan	342.208.000,00	342.208.000,00	0,00	0,00	
5.1.7.03.96	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Widadaren Kecamatan Petanukan	87.027.000,00	87.027.000,00	0,00	0,00	
5.1.7.03.98	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Petanjungan Kecamatan Petanukan	0,00	323.000.000,00	323.000.000,00	0,00	
5.1.7.03.01	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Iser Kecamatan Petanukan	352.523.000,00	352.523.000,00	0,00	0,00	
5.1.7.03.03	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Pesucen Kecamatan Petanukan	0,00	314.700.000,00	314.700.000,00	0,00	
5.1.7.03.04	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Temuireng Kecamatan Petanukan	0,00	330.300.000,00	330.300.000,00	0,00	
5.1.7.03.08	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Bulu Kecamatan Petanukan	249.135.000,00	249.135.000,00	0,00	0,00	
5.1.7.03.11	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Klareyan Kecamatan Petanukan	309.755.000,00	309.755.000,00	0,00	0,00	
5.1.7.05	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	909.164.000,00	909.164.000,00	0,00	0,00	
5.1.7.05.01	Belanja bantuan keuangan kepada Partai PDIP	246.918.000,00	246.918.000,00	0,00	0,00	
5.1.7.05.02	Belanja bantuan keuangan kepada Partai Golkar	128.853.000,00	128.853.000,00	0,00	0,00	
5.1.7.05.03	Belanja bantuan keuangan kepada Partai PPP	95.742.000,00	95.742.000,00	0,00	0,00	
5.1.7.05.04	Belanja bantuan keuangan kepada Partai PKS	122.193.000,00	122.193.000,00	0,00	0,00	

RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN DOKTER PEMBAKARAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Halaman

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.1.7.05.05	Belanja bantuan keuangan kepada Partai PKS	73.043.000,00	73.043.000,00	0,00	0,00	
5.1.7.05.06	Belanja bantuan keuangan kepada Partai Gerindra	126.694.000,00	126.694.000,00	0,00	0,00	
5.1.7.05.07	Belanja bantuan keuangan kepada Partai Hanura	45.271.000,00	45.271.000,00	0,00	0,00	
5.1.7.05.08	Belanja bantuan keuangan kepada Partai PAN	70.450.000,00	70.450.000,00	0,00	0,00	
5.1.7.06	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dan Desa Adat yang Bersumber dari APBN	146.607.350.000,00	191.002.083.000,00	41.394.733.000,00	27,67	
5.1.7.06.01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dan Desa Adat yang Bersumber dari APBN	146.607.350.000,00	191.002.083.000,00	41.394.733.000,00	27,67	
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	3.000.000.000,00	1.000.000.000,00	50,00	
5.1.8.01	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	3.000.000.000,00	1.000.000.000,00	50,00	
5.1.8.01.01	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	3.000.000.000,00	1.000.000.000,00	50,00	
5.2	BELANJA LANGSUNG	646.879.340.000,00	1.106.572.244.000,00	456.692.904.000,00	70,27	
5.2.1	Belanja Pegawai	96.044.972.000,00	146.698.635.908,00	50.653.663.908,00	52,74	
5.2.1.01	Honorarium PNS	50.973.078.920,00	69.146.396.696,00	18.172.317.776,00	35,65	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.872.815.000,00	22.676.050.000,00	4.803.235.000,00	26,87	
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	728.725.000,00	958.290.000,00	229.565.000,00	31,50	
5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	790.525.000,00	1.138.015.000,00	347.490.000,00	43,96	
5.2.1.01.04	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.01.06	Honorarium Harian PNS	166.900.000,00	206.025.000,00	39.125.000,00	23,44	
5.2.1.01.07	Honorarium pelayanan	31.413.513.920,00	44.166.416.696,00	12.752.902.776,00	40,60	
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	8.938.866.080,00	8.148.668.712,00	(780.197.368,00)	(8,74)	
5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorers/bdsk tetap	5.666.420.000,00	5.971.100.000,00	304.680.000,00	5,38	
5.2.1.02.03	Honorarium harian	115.460.000,00	78.100.000,00	(37.360.000,00)	(32,36)	
5.2.1.02.04	Honorarium Tenaga Teknis/Monitir/ Tukang/Operator/Asisten	22.400.000,00	25.280.000,00	2.880.000,00	12,86	
5.2.1.02.07	Honorarium Pelayanan	3.124.586.080,00	2.074.188.712,00	(1.050.397.368,00)	(33,62)	
5.2.1.03	Uang Lembur	3.143.027.000,00	4.090.441.000,00	947.414.000,00	30,14	
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.931.689.500,00	3.730.929.500,00	799.240.000,00	27,26	
5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	211.337.500,00	359.511.500,00	148.174.000,00	70,11	
5.2.1.18	Belanja Pegawai Dana BOS	0,00	22.737.324.000,00	22.737.324.000,00	0,00	
5.2.1.18.01	Belanja Pegawai Dana BOS	0,00	22.737.324.000,00	22.737.324.000,00	0,00	
5.2.1.19	Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	33.000.000.000,00	42.576.805.500,00	9.576.805.500,00	29,02	
5.2.1.19.01	Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD dr. M Ashari	33.000.000.000,00	42.576.805.500,00	9.576.805.500,00	29,02	

RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIYARAN

Lampiran 1a.1

Halaman

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6		7
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	280.116.795.200,00	508.601.291.378,00	228.484.496.178,00	81,57		
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.129.811.710,00	24.296.487.185,00	11.166.675.475,00	85,05		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	4.984.182.985,00	9.152.720.796,00	4.168.537.811,00	83,64		
5.2.2.01.02	Belanja dokumen/administrasi tender	6.690.000,00	13.690.000,00	7.000.000,00	104,63		
5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar battery kering)	555.974.000,00	1.241.246.000,00	685.272.000,00	123,26		
5.2.2.01.04	Belanja perangko material dan benda pos lainnya	296.049.700,00	411.719.700,00	115.670.000,00	39,07		
5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.238.435.500,00	1.841.155.300,00	602.719.800,00	48,67		
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.735.239.400,00	3.169.482.894,00	434.243.494,00	15,88		
5.2.2.01.07	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	39.430.000,00	40.130.000,00	700.000,00	1,78		
5.2.2.01.08	Belanja pengisian tabung gas	154.558.000,00	232.158.000,00	77.600.000,00	50,21		
5.2.2.01.09	Belanja pengisian tinta	354.532.400,00	478.927.300,00	124.394.900,00	35,09		
5.2.2.01.10	Belanja Memory Stick	76.214.225,00	105.004.425,00	32.790.200,00	43,02		
5.2.2.01.11	Belanja bahan pelumas (operasional Kantor)	5.360.000,00	3.400.000,00	(1.960.000,00)	(36,57)		
5.2.2.01.12	Belanja bahan habis pakai material kesehatan	1.707.013.600,00	3.469.393.297,00	1.762.379.697,00	103,24		
5.2.2.01.13	Belanja bahan habis pakai material laboratorium	714.244.400,00	3.637.212.680,00	2.922.968.280,00	409,24		
5.2.2.01.16	Belanja bahan habis pakai radiologi	18.000.000,00	19.000.000,00	1.000.000,00	5,56		
5.2.2.01.20	Belanja bahan kelengkapan teknis elektronika	2.595.000,00	4.673.500,00	2.078.500,00	80,10		
5.2.2.01.21	Belanja bahan kelengkapan teknis listrik	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00		
5.2.2.01.22	Belanja bahan pengharum ruangan	145.690.000,00	272.527.293,00	126.837.293,00	87,06		
5.2.2.01.23	Belanja bahan pengharum/ parfum kendaraan	21.190.000,00	27.791.000,00	6.601.000,00	31,15		
5.2.2.01.24	Belanja Pakaian/Troop	55.225.000,00	112.550.000,00	57.325.000,00	103,80		
5.2.2.01.25	Belanja peralatan dan kelengkapan keamanan	11.350.000,00	52.080.000,00	40.730.000,00	358,85		
5.2.2.01.26	Belanja Bunga/ Karangan Bunga	1.837.500,00	1.625.000,00	(212.500,00)	(11,56)		
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	18.453.040.700,00	39.022.153.710,00	20.569.113.010,00	111,44		
5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	195.174.000,00	575.950.150,00	380.776.150,00	195,10		
5.2.2.02.02	Belanja bahan/bibit tanaman	1.093.275.000,00	1.480.415.000,00	387.140.000,00	35,41		
5.2.2.02.03	Belanja bibit ternak	75.150.000,00	103.900.000,00	28.750.000,00	38,26		
5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	10.509.539.000,00	25.693.582.138,00	15.184.043.138,00	144,48		
5.2.2.02.05	Belanja bahan kimia	698.470.000,00	991.960.000,00	293.490.000,00	42,02		
5.2.2.02.06	Belanja alat peraga	100.249.000,00	1.119.649.000,00	1.019.400.000,00	1.016,87		
5.2.2.02.07	Belanja bahan praktek dan bahan baku percontohan	1.836.871.200,00	2.323.890.700,00	487.019.500,00	26,51		
5.2.2.02.08	Belanja puguak	285.450.000,00	472.000.000,00	186.550.000,00	65,35		
5.2.2.02.09	Belanja makanan dan minuman ternak	272.120.000,00	507.478.000,00	235.358.000,00	86,49		
5.2.2.02.11	Belanja bahan kostum dan kelengkapan upacara	124.980.000,00	206.534.000,00	81.554.000,00	65,25		
5.2.2.02.12	Belanja bahan pestisida	259.800.000,00	543.085.500,00	283.285.500,00	109,04		
5.2.2.02.13	Belanja tas kegiatan	591.230.000,00	897.995.000,00	306.765.000,00	51,89		
5.2.2.02.14	Belanja bahan logistik rumah tangga	735.370.000,00	1.196.970.000,00	463.600.000,00	63,04		

KEMERANGAN PERUBAHAN APRED BERDASARKAN RINCIAN DIBEKUTAN, BELANJA DAN PEMERIKSAAN

NOHOR URUT	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	5 - 4 - 3	6
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.02.15	Belanja cinderamata	283.780.000,00	434.480.000,00	150.700.000,00	53,10		
5.2.2.02.16	Belanja dekorasi	212.050.000,00	303.600.000,00	91.550.000,00	43,17		
5.2.2.02.17	Belanja dokumentasi	108.907.500,00	127.994.000,00	19.086.500,00	17,53		
5.2.2.02.18	Belanja bahan arsip dokumen	35.490.000,00	35.180.000,00	(310.000,00)	(0,87)		
5.2.2.02.19	Belanja perlengkapan olah raga	21.000.000,00	66.800.000,00	45.800.000,00	218,10		
5.2.2.02.20	Belanja bahan specimen	226.000.000,00	245.500.000,00	19.500.000,00	8,63		
5.2.2.02.21	Belanja bahan inseminasi buatan	69.700.000,00	28.020.000,00	(41.680.000,00)	(59,80)		
5.2.2.02.22	Belanja bahan publikasi	522.985.000,00	1.054.248.000,00	531.263.000,00	101,58		
5.2.2.02.24	Belanja bahan citra satelit/foto udara	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)		
5.2.2.02.24	Belanja bahan dan peralatan pemeliharaan	3.000.000,00	107.270.000,00	104.270.000,00	3.475,67		
5.2.2.02.25	Belanja tempat sampah/ tong sampah	43.500.000,00	138.000.000,00	94.500.000,00	217,24		
5.2.2.02.28	Belanja bahan material service peralatan kantor	150.550.000,00	365.652.222,00	215.102.222,00	143,68		
5.2.2.02.29		56.723.382.600,00	77.235.443.273,00	20.512.060.673,00	36,16		
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	973.300.000,00	1.157.429.500,00	184.129.500,00	18,92		
5.2.2.03.01	Belanja telepon	431.140.000,00	539.815.400,00	108.675.400,00	25,21		
5.2.2.03.02	Belanja listrik	15.864.292.000,00	19.667.070.650,00	3.802.778.650,00	23,97		
5.2.2.03.04	Belanja jasa pengumuman lelang/pemenang lelang	1.000.000,00	40.000.000,00	39.000.000,00	3.900,00		
5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	606.502.000,00	677.047.000,00	70.545.000,00	11,63		
5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	1.695.776.000,00	1.940.853.423,00	245.077.423,00	14,45		
5.2.2.03.07	Belanja paket/pengiriman	694.280.000,00	689.534.000,00	(4.746.000,00)	(0,68)		
5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	126.900.000,00	88.150.000,00	(40.750.000,00)	(31,61)		
5.2.2.03.09	Belanja jasa administrasi pemungutan Pajak Penerangan	23.335.000,00	15.385.000,00	(7.950.000,00)	(34,07)		
5.2.2.03.10	Jalan Umum	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.2.2.03.11	Belanja jasa administrasi pemungutan pajak	316.480.000,00	34.850.000,00	(281.630.000,00)	(88,99)		
5.2.2.03.12	Belanja jasa administrasi kepegawaian	44.900.000,00	157.400.000,00	112.500.000,00	250,56		
5.2.2.03.13	Belanja jasa publikasi	1.781.895.000,00	3.288.100.000,00	1.506.205.000,00	84,53		
5.2.2.03.14	Belanja jasa dokumentasi dan dekorasi	654.720.000,00	806.765.000,00	152.045.000,00	23,22		
5.2.2.03.15	Belanja jasa services peralatan dan perlengkapan kantor	1.027.904.000,00	1.570.431.000,00	542.527.000,00	52,78		
5.2.2.03.16	Belanja jasa atas prestasi	906.810.000,00	1.370.585.000,00	463.775.000,00	51,14		
5.2.2.03.17	Belanja jasa administrasi peserta	6.757.935.100,00	10.963.793.800,00	4.205.858.700,00	62,24		
5.2.2.03.18	Belanja jasa perawatan kesehatan	3.042.255.000,00	4.906.680.000,00	1.864.425.000,00	61,28		
5.2.2.03.19	Belanja jasa analisis di laboratorium	57.547.000,00	190.140.000,00	132.593.000,00	230,41		
5.2.2.03.20	Belanja retribusi kebersihan	11.980.000,00	23.320.000,00	11.340.000,00	94,66		
5.2.2.03.21	Belanja jasa perjalanan	7.000.000,00	12.500.000,00	5.500.000,00	78,57		
5.2.2.03.23	Belanja jasa laundry	57.950.000,00	123.650.000,00	65.700.000,00	113,37		
5.2.2.03.24	Belanja Jasa Perdukungan Operasional Kantor	16.444.046.500,00	21.794.053.500,00	5.350.007.000,00	32,53		
5.2.2.03.25	Belanja jasa kalibrasi alat kesehatan	47.200.000,00	218.200.000,00	171.000.000,00	362,29		
5.2.2.03.26	Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli	5.016.735.000,00	6.722.550.000,00	1.705.815.000,00	34,00		

RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN DRYK PENJABATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Halaman

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.2.03.27	Belanja Jasa Pengadaan Limbah	110.000.000,00	217.640.000,00	107.640.000,00	97,85	
5.2.2.03.28	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat sebagai Jasa Atas Prestasi	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	1.739.190.000,00	1.506.070.000,00	(233.120.000,00)	(13,40)	
5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	1.441.970.000,00	1.214.850.000,00	(227.120.000,00)	(15,75)	
5.2.2.04.02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	297.220.000,00	291.220.000,00	(6.000.000,00)	(2,02)	
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.679.684.150,00	11.439.263.320,00	2.759.579.170,00	31,79	
5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.419.149.000,00	2.224.626.000,00	805.477.000,00	56,76	
5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.269.134.250,00	3.596.065.000,00	1.326.930.750,00	58,48	
5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	4.249.846.900,00	4.818.264.500,00	568.417.600,00	13,38	
5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	22.710.000,00	19.330.000,00	(3.380.000,00)	(14,88)	
5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	716.844.000,00	759.477.820,00	42.633.820,00	5,95	
5.2.2.05.06	Belanja perpanjangan Surat Ijin Mengemudi	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
5.2.2.05.07	Belanja asesoris kendaraan dinas	0,00	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00	
5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	8.432.455.800,00	13.077.825.541,00	4.645.369.741,00	55,09	
5.2.2.06.01	Belanja cetak	6.113.545.500,00	9.909.665.491,00	3.796.119.991,00	62,09	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.318.910.300,00	3.168.160.050,00	849.249.750,00	36,62	
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.574.372.500,00	2.668.959.500,00	1.094.587.000,00	69,53	
5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	866.562.500,00	1.197.764.500,00	329.202.000,00	37,90	
5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	242.075.000,00	749.860.000,00	507.785.000,00	209,76	
5.2.2.07.04	Belanja sewa tempat parkir/uang tambah/hanggar sarana mobilitas	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.07.05	Belanja Sewa Tanah	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	
5.2.2.07.06	Belanja sewa penginapan/ tempat tinggal/ kamar/ hotel	444.235.000,00	719.835.000,00	275.600.000,00	62,04	
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	496.070.000,00	588.425.000,00	92.355.000,00	18,62	
5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	496.070.000,00	587.425.000,00	91.355.000,00	18,42	
5.2.2.08.02	Belanja sewa Sarana Mobilitas Air	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
5.2.2.10	Belanja Sewa Perengkapan Dan Peralatan Kantor	1.585.983.500,00	2.608.009.500,00	1.022.026.000,00	64,44	
5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	362.823.500,00	575.574.500,00	212.751.000,00	58,64	
5.2.2.10.02	Belanja sewa komputer dan printer	14.450.000,00	6.800.000,00	(7.650.000,00)	(52,94)	
5.2.2.10.03	Belanja sewa proyektor	4.850.000,00	25.250.000,00	20.400.000,00	420,62	
5.2.2.10.04	Belanja sewa generator	41.900.000,00	86.000.000,00	44.100.000,00	105,25	
5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda dan perlengkapannya (termasuk tratak, layne)	514.210.000,00	1.052.585.000,00	538.375.000,00	104,70	
5.2.2.10.06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	27.750.000,00	32.950.000,00	5.200.000,00	18,74	
5.2.2.10.08	Belanja sewa sound system	379.200.000,00	540.440.000,00	161.240.000,00	42,52	
5.2.2.10.09	Belanja sewa tanaman hias	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN DETIL PENGURUTAN, BELANJA DAN PERUBAHAN						Halaman

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	BETULAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.2.10.10	Belanja sewa mesin peralatan kerja	80.550.000,00	99.550.000,00	19.000.000,00	23,59	
5.2.2.10.15	Belanja Sewa Alat Rellay	6.300.000,00	9.450.000,00	3.150.000,00	50,00	
5.2.2.10.16	Belanja Sewa Alat Musik dan Perlengkapannya	128.800.000,00	146.400.000,00	17.600.000,00	13,66	
5.2.2.10.17	Belanja Sewa Karpet/ Tikar/ Permadani	4.750.000,00	5.810.000,00	1.060.000,00	22,32	
5.2.2.10.18	Belanja Sewa Kipas Angin Blower	14.400.000,00	21.200.000,00	6.800.000,00	47,22	
5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	15.434.631.240,00	24.187.741.240,00	8.753.110.000,00	56,71	
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	2.777.330.500,00	3.553.395.000,00	776.064.500,00	27,94	
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.281.685.240,00	8.179.182.740,00	3.897.297.500,00	91,02	
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	497.204.000,00	858.651.000,00	361.447.000,00	72,70	
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	7.625.211.500,00	11.298.512.500,00	3.674.301.000,00	48,19	
5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman pasien	253.000.000,00	297.000.000,00	44.000.000,00	17,39	
5.2.2.12	Belanja Pakain Dinas Dan Atributnya	513.875.000,00	659.335.000,00	145.460.000,00	28,31	
5.2.2.12.02	Belanja Pakain Sipil Harian (PSH)	75.000.000,00	73.750.000,00	(1.250.000,00)	(1,67)	
5.2.2.12.03	Belanja Pakain Sipil Lengkap (PSL)	26.000.000,00	28.675.000,00	2.675.000,00	10,29	
5.2.2.12.04	Belanja Pakain Dinas Harian (PDH)	109.550.000,00	273.980.000,00	164.430.000,00	150,10	
5.2.2.12.05	Belanja Pakain Dinas Upacara (PDU)	145.025.000,00	141.025.000,00	(4.000.000,00)	(2,76)	
5.2.2.12.06	Belanja atribut kelengkapan pakaian dinas	30.450.000,00	35.330.000,00	4.880.000,00	16,03	
5.2.2.12.07	Belanja Pakain Sipil Resmi	127.850.000,00	106.575.000,00	(21.275.000,00)	(16,64)	
5.2.2.13	Belanja Pakain Kerja	346.115.000,00	706.835.000,00	361.720.000,00	104,81	
5.2.2.13.01	Belanja pakaian kerja lapangan	332.415.000,00	678.535.000,00	346.120.000,00	104,12	
5.2.2.13.02	Belanja atribut kelengkapan pakaian kerja lapangan	500.000,00	10.500.000,00	10.000.000,00	2.000,00	
5.2.2.13.03	Belanja Pakain dan Atribut Satpam	12.200.000,00	17.800.000,00	5.600.000,00	45,90	
5.2.2.14	Belanja Pakain Khusus Dan Hari-Hari Tertentu	712.100.000,00	1.148.500.000,00	436.400.000,00	61,28	
5.2.2.14.01	Belanja pakaian KORPRI	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.14.02	Belanja pakaian adat daerah	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	179.600.000,00	179.600.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga dan atributnya	379.200.000,00	697.650.000,00	318.450.000,00	83,98	
5.2.2.14.05	Belanja pakaian khusus beserta kelengkapan atributnya	144.300.000,00	187.250.000,00	42.950.000,00	29,76	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	48.436.814.800,00	69.715.631.900,00	21.282.817.100,00	43,94	
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.251.109.300,00	20.472.108.300,00	7.220.999.000,00	54,49	
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	35.185.705.500,00	49.247.523.600,00	14.061.818.100,00	39,96	
5.2.2.16	Belanja Beasiswa Pendidikan	867.050.000,00	789.150.000,00	(77.900.000,00)	(8,98)	
5.2.2.16.02	Belanja beasiswa tugas belajar S1	36.800.000,00	0,00	(36.800.000,00)	(100,00)	
5.2.2.16.03	Belanja beasiswa tugas belajar S2	99.250.000,00	58.150.000,00	(41.100.000,00)	(41,41)	
5.2.2.16.05	Belanja beasiswa	731.000.000,00	731.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis	2.104.391.000,00	3.594.896.240,00	1.490.505.240,00	70,83	

RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIYARAN



Halaman

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.2.17.01	Belanja kursus-kursus singkat / pelatihan	1.293.991.000,00	2.193.921.240,00	899.930.240,00	69,55	
5.2.2.17.02	Belanja sosialisasi	27.275.000,00	55.215.000,00	27.940.000,00	102,44	
5.2.2.17.03	Belanja bimbingan teknis	518.600.000,00	1.005.360.000,00	486.760.000,00	93,86	
5.2.2.17.04	Belanja mengikuti seminar	76.500.000,00	201.900.000,00	125.400.000,00	163,92	
5.2.2.17.05	Belanja mengikuti workshop	188.025.000,00	138.500.000,00	(49.525.000,00)	(26,34)	
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	40.338.825.950,00	70.901.927.072,00	30.563.097.122,00	75,77	
5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.630.390.000,00	2.508.880.398,00	878.490.398,00	53,88	
5.2.2.20.02	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6.185.949.950,00	13.649.263.574,00	7.463.313.624,00	120,65	
5.2.2.20.03	Belanja pemeliharaan jalan, irigasi dan jaringan	32.136.615.000,00	54.147.505.000,00	22.008.890.000,00	68,48	
5.2.2.20.04	Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya	381.175.000,00	593.578.100,00	212.403.100,00	55,72	
5.2.2.20.07	Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya (Barprov/Ingub)	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	5.854.455.000,00	9.828.030.000,00	3.973.575.000,00	67,87	
5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	243.650.000,00	468.600.000,00	224.950.000,00	92,33	
5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	3.075.405.000,00	6.024.810.000,00	2.949.405.000,00	95,90	
5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Penilaian dan Pengawasan	1.057.000.000,00	1.239.690.000,00	182.690.000,00	17,28	
5.2.2.21.04	Belanja jasa konsultansi lainnya	1.478.400.000,00	2.094.930.000,00	616.530.000,00	41,70	
5.2.2.22	Belanja Barang Non Aset Tetap	948.978.750,00	2.687.737.397,00	1.738.758.647,00	183,22	
5.2.2.22.01	Belanja Barang Non Aset Tetap	948.978.750,00	1.628.560.350,00	679.581.600,00	71,61	
5.2.2.22.02	Belanja Pengadaan Peralatan dan Mesin Non Aset Tetap	0,00	31.050.000,00	31.050.000,00	0,00	
5.2.2.22.03	Belanja Pembangunan Gedung dan Bangunan Non Aset Tetap	0,00	18.750.000,00	18.750.000,00	0,00	
5.2.2.22.05	Belanja pengadaan barang serupa aset tetap lainnya non aset tetap	0,00	1.009.377.047,00	1.009.377.047,00	0,00	
5.2.2.23	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	0,00	90.949.296.000,00	90.949.296.000,00	0,00	
5.2.2.23.01	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	0,00	90.949.296.000,00	90.949.296.000,00	0,00	
5.2.2.24	Belanja Hibah Barang dan Jasa kepada pihak ketiga/masyarakat	15.978.813.500,00	18.994.100.000,00	3.015.286.500,00	18,87	
5.2.2.24.01	Belanja hibah barang atau jasa kepada pihak ketiga/masyarakat	15.978.813.500,00	18.994.100.000,00	3.015.286.500,00	18,87	
5.2.2.25	Belanja Bantuan Sosial Barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	3.132.750.000,00	3.240.675.000,00	107.925.000,00	3,45	
5.2.2.25.01	Belanja Bantuan Sosial Barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	3.132.750.000,00	3.240.675.000,00	107.925.000,00	3,45	
5.2.2.26	Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	33.000.000.000,00	36.377.449.500,00	3.377.449.500,00	10,23	
5.2.2.26.01	Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD dr. N Ashari	33.000.000.000,00	36.377.449.500,00	3.377.449.500,00	10,23	

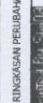
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASAR RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIYARAN

Lampiran 1.1.1.1.1.1.1

Halaman

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.2.28	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Bagi Anggota DPRD	1.450.000.000,00	2.000.000.000,00	550.000.000,00	37,93	
5.2.2.28.01	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Bagi Anggota DPRD	1.450.000.000,00	2.000.000.000,00	550.000.000,00	37,93	
5.2.2.29	Belanja Software	183.000.000,00	373.350.000,00	190.350.000,00	104,02	
5.2.2.29.01	Belanja Software	183.000.000,00	373.350.000,00	190.350.000,00	104,02	
5.2.3	Belanja Modal	273.717.572.800,00	451.273.316.714,00	177.554.743.914,00	64,87	
5.2.3.11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	13.325.000.000,00	12.550.000.000,00	(775.000.000,00)	(5,82)	
5.2.3.11.04	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	13.325.000.000,00	12.550.000.000,00	(775.000.000,00)	(5,82)	
5.2.3.14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	872.470.000,00	872.470.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.14.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Aspal	122.470.000,00	122.470.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.14.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Equipment	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	20.000.000,00	2.465.780.000,00	2.445.780.000,00	12.228,90	
5.2.3.16.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set	20.000.000,00	1.239.380.000,00	1.219.380.000,00	6.096,90	
5.2.3.16.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa	0,00	1.149.550.000,00	1.149.550.000,00	0,00	
5.2.3.16.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit Pemeliharaan Lapangan	0,00	76.850.000,00	76.850.000,00	0,00	
5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Darat Bermotor	5.802.386.000,00	12.826.212.000,00	7.023.826.000,00	121,05	
5.2.3.17.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.680.450.000,00	9.037.907.000,00	5.157.457.000,00	132,91	
5.2.3.17.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang	916.000.000,00	1.143.750.000,00	227.750.000,00	24,66	
5.2.3.17.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	253.900.000,00	750.000.000,00	496.100.000,00	195,39	
5.2.3.17.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	577.686.000,00	1.720.205.000,00	1.142.519.000,00	197,78	
5.2.3.17.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	174.350.000,00	174.350.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Darat Tak Bermotor	56.000.000,00	57.600.000,00	1.600.000,00	2,86	
5.2.3.18.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkut Barang	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	

RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAN



Halaman

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.3.18.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Tak Bermotor Berperupangan	50.000.000,00	51.600.000,00	1.600.000,00	3,20	
5.2.3.20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor	0,00	38.650.000,00	38.650.000,00	0,00	
5.2.3.20.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor Khusus	0,00	38.650.000,00	38.650.000,00	0,00	
5.2.3.23	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	42.350.000,00	72.350.000,00	30.000.000,00	70,64	
5.2.3.23.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Kerja	42.350.000,00	62.350.000,00	20.000.000,00	47,23	
5.2.3.23.09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Tukang Kayu	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
5.2.3.24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Universal	1.500.000,00	194.850.000,00	193.350.000,00	12.890,00	
5.2.3.24.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Universal	0,00	159.300.000,00	159.300.000,00	0,00	
5.2.3.24.08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur/Pembandingan	0,00	13.100.000,00	13.100.000,00	0,00	
5.2.3.24.09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Lainnya	0,00	19.950.000,00	19.950.000,00	0,00	
5.2.3.24.10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Timbangan/Ekora	1.500.000,00	2.500.000,00	1.000.000,00	66,67	
5.2.3.25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	0,00	26.175.000,00	26.175.000,00	0,00	
5.2.3.25.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	0,00	26.175.000,00	26.175.000,00	0,00	
5.2.3.26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpanan	116.005.000,00	140.373.000,00	24.368.000,00	21,01	
5.2.3.26.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman	0,00	31.300.000,00	31.300.000,00	0,00	
5.2.3.26.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan	36.000.000,00	36.000.000,00	(2.000.000,00)	(5,26)	
5.2.3.26.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium	76.005.000,00	73.073.000,00	(4.932.000,00)	(6,32)	
5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	1.355.309.800,00	13.535.581.553,00	12.180.271.753,00	898,71	
5.2.3.27.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Ketik	13.500.000,00	10.500.000,00	(3.000.000,00)	(22,22)	
5.2.3.27.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah	1.000.000,00	70.000.000,00	69.000.000,00	6.900,00	
5.2.3.27.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Reproduksi (Pengganda)	20.000.000,00	88.045.000,00	68.045.000,00	340,23	
5.2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perangkapan Kantor	490.900.000,00	1.362.582.000,00	871.682.000,00	177,57	

RINCIAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN CYSTEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	829.909.800,00	12.004.454.553,00	11.174.544.753,00	1.346,48	
5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	3.397.799.500,00	9.981.976.123,00	6.584.176.623,00	193,78	
5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	2.085.591.500,00	6.808.646.993,00	4.722.655.493,00	226,40	
5.2.3.28.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengukur Waktu	10.250.000,00	11.750.000,00	1.500.000,00	14,63	
5.2.3.28.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	29.150.000,00	83.640.000,00	54.490.000,00	186,93	
5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	702.598.000,00	1.642.088.467,00	939.130.467,00	133,60	
5.2.3.28.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	31.700.000,00	149.249.695,00	117.549.695,00	370,82	
5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	379.850.000,00	1.009.170.968,00	629.320.968,00	165,68	
5.2.3.28.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	157.900.000,00	277.430.000,00	119.530.000,00	75,70	
5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	8.338.722.000,00	8.811.265.233,00	472.543.233,00	5,67	
5.2.3.29.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	216.000.000,00	212.350.000,00	(3.650.000,00)	(1,69)	
5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	2.126.682.000,00	4.841.781.820,00	2.715.099.820,00	127,67	
5.2.3.29.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	0,00	14.100.000,00	14.100.000,00	0,00	
5.2.3.29.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	62.750.000,00	139.837.000,00	77.087.000,00	122,85	
5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	403.000.000,00	1.515.898.213,00	1.112.898.213,00	276,15	
5.2.3.29.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	5.530.250.000,00	2.087.298.200,00	(3.442.991.800,00)	(62,26)	
5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	421.940.000,00	750.490.000,00	328.550.000,00	77,87	
5.2.3.30.01	Kerja Pejabat	74.620.000,00	254.625.000,00	180.005.000,00	241,23	
5.2.3.30.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat	50.200.000,00	77.100.000,00	26.900.000,00	53,59	
5.2.3.30.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	167.830.000,00	176.375.000,00	8.545.000,00	5,09	
5.2.3.30.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	0,00	39.300.000,00	39.300.000,00	0,00	
5.2.3.30.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu di Ruang Rapat	19.531.000,00	30.631.000,00	11.100.000,00	56,83	

RINGKASAN PERUBAHAN AFRD BERDASARKAN RINCIAN OBJEK PENGADAAN, BELANJA DAN PEMBIYAIAN

Halaman

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.3.30.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	109.759.000,00	172.459.000,00	62.700.000,00	57,13	
5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	499.862.500,00	2.562.695.400,00	2.062.832.900,00	412,68	
5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	377.312.500,00	1.281.295.400,00	903.982.900,00	239,58	
5.2.3.31.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	57.550.000,00	1.210.000.000,00	1.152.450.000,00	2.002,52	
5.2.3.31.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Computing	5.000.000,00	9.000.000,00	4.000.000,00	80,00	
5.2.3.31.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemetaan Ukur	60.000.000,00	62.400.000,00	2.400.000,00	4,00	
5.2.3.32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	908.180.000,00	707.030.000,00	(201.150.000,00)	(22,15)	
5.2.3.32.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	90.880.000,00	478.980.000,00	388.100.000,00	427,05	
5.2.3.32.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio HF/FM	803.600.000,00	200.900.000,00	(602.700.000,00)	(75,00)	
5.2.3.32.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio UHF	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
5.2.3.32.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Sosial	13.700.000,00	12.150.000,00	(1.550.000,00)	(11,31)	
5.2.3.33	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar	914.854.500,00	964.500.000,00	49.646.500,00	5,43	
5.2.3.33.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar VHF/FM	0,00	604.700.000,00	604.700.000,00	0,00	
5.2.3.33.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar UHF	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
5.2.3.33.20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Switcher/Menara Antena	914.854.500,00	349.800.000,00	(565.054.500,00)	(61,76)	
5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	4.889.362.000,00	18.270.715.533,00	13.381.353.533,00	273,68	
5.2.3.34.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	3.535.926.000,00	14.581.125.812,00	11.045.199.812,00	313,37	
5.2.3.34.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Gigi	937.773.000,00	1.950.552.622,00	1.012.779.622,00	108,00	
5.2.3.34.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran T.H.T	2.500.000,00	20.523.411,00	18.023.411,00	720,94	
5.2.3.34.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Farmasi	237.813.000,00	1.157.584.949,00	919.771.949,00	386,76	
5.2.3.34.09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	67.900.000,00	257.900.000,00	190.000.000,00	279,82	
5.2.3.34.13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Poliklinik Set	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	

RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELAJA DAN PEMBIYARAN

Lampiran 1.1.1

Halaman

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH PERUBAHAN		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.3.34.14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Pendenta Cacat Tubuh	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
5.2.3.34.20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Gawak Darurat	107.450.000,00	223.028.739,00	115.578.739,00	107,57	
5.2.3.35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	0,00	15.900.000,00	15.900.000,00	0,00	
5.2.3.35.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Olahraga	0,00	15.900.000,00	15.900.000,00	0,00	
5.2.3.36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	529.860.000,00	2.032.484.398,00	1.502.624.398,00	283,59	
5.2.3.36.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kimia Air	187.260.000,00	508.509.398,00	321.649.398,00	171,77	
5.2.3.36.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Mikrobiologi	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
5.2.3.36.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Bahan/Geologi	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.36.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.36.12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Umum	15.000.000,00	322.000.000,00	307.000.000,00	2.046,67	
5.2.3.36.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kimia	168.200.000,00	263.200.000,00	95.000.000,00	56,48	
5.2.3.36.20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Hematologi	0,00	352.100.000,00	352.100.000,00	0,00	
5.2.3.36.22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Makanan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.3.36.23	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Standarisasi, Kalibrasi dan Instrumentasi	0,00	276.875.000,00	276.875.000,00	0,00	
5.2.3.36.54	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Biologi Peralatan	50.900.000,00	50.900.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	132.725.000,00	432.725.000,00	300.000.000,00	226,03	
5.2.3.37.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPA Dasar	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	
5.2.3.37.13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	132.725.000,00	132.725.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.38	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Laboratorium Kimia Nuklir	5.500.000,00	0,00	(5.500.000,00)	(100,00)	
5.2.3.38.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Laboratory Safety Equipment	5.500.000,00	0,00	(5.500.000,00)	(100,00)	
5.2.3.42	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	20.000.000,00	126.750.000,00	106.750.000,00	533,75	

KINGSAAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIYAN

Lampiran 1.1.1.1.1.1.1

Halaman

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.3.42.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Penunjang	20.000.000,00	126.750.000,00	106.750.000,00	533,75	
5.2.3.43	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	
5.2.3.43.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Data Acquisition and Analyzing System	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	
5.2.3.45	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Persenjataan Non Senjata Api	925.000,00	925.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.45.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Permainan	925.000,00	925.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	132.000.000,00	490.850.000,00	358.850.000,00	271,86	
5.2.3.48.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bantu Kemaraan	132.000.000,00	488.850.000,00	356.850.000,00	270,34	
5.2.3.48.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Perlindungan	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	141.783.833.500,00	191.856.694.974,00	50.072.861.474,00	35,32	
5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	32.897.385.000,00	41.819.544.000,00	8.922.159.000,00	27,12	
5.2.3.49.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	400.000.000,00	215.660.000,00	(184.340.000,00)	(46,09)	
5.2.3.49.05	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium	0,00	1.014.498.700,00	1.014.498.700,00	0,00	
5.2.3.49.09	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	215.000.000,00	338.440.000,00	123.440.000,00	57,41	
5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	22.585.508.500,00	48.493.272.274,00	25.907.763.774,00	114,71	
5.2.3.49.11	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	15.000.000.000,00	15.265.370.000,00	265.370.000,00	1,77	
5.2.3.49.12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Peternakan/Koperasi/Pasar	27.150.000.000,00	34.501.945.000,00	7.351.945.000,00	27,08	
5.2.3.49.13	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	6.000.000.000,00	4.732.100.000,00	(1.267.900.000,00)	(21,13)	
5.2.3.49.14	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool	0,00	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	
5.2.3.49.15	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pemotongan Hewan	0,00	117.300.000,00	117.300.000,00	0,00	
5.2.3.49.19	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Perpustakaan	0,00	51.300.000,00	51.300.000,00	0,00	
5.2.3.49.20	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Museum	1.550.000.000,00	1.550.000.000,00	0,00	0,00	

RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN DEKAT PENGAPATAN, BELANJA DAN PEMERIKSAAN

Halaman

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.3.49.21	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar	601.420.000,00	660.820.000,00	59.400.000,00	9,88	
5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	36.384.520.000,00	43.031.445.000,00	7.646.925.000,00	21,61	
5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	9.000.000.000,00	9.163.265.000,00	163.265.000,00	1,81	
5.2.3.50.04	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	3.000.000.000,00	3.241.595.000,00	241.595.000,00	8,05	
5.2.3.50.06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Hotel	6.000.000.000,00	5.921.670.000,00	(78.330.000,00)	(1,31)	
5.2.3.51	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Menara	0,00	856.255.000,00	856.255.000,00	0,00	
5.2.3.51.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Menara Telekomunikasi	0,00	856.255.000,00	856.255.000,00	0,00	
5.2.3.52	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Bersejarah	5.240.693.000,00	5.242.997.000,00	2.304.000,00	0,04	
5.2.3.52.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Peninggalan Sejarah	5.240.693.000,00	5.242.997.000,00	2.304.000,00	0,04	
5.2.3.53	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	250.750.000,00	254.555.000,00	3.805.000,00	1,52	
5.2.3.53.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Pembangunan	250.750.000,00	254.555.000,00	3.805.000,00	1,52	
5.2.3.56	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti	437.516.000,00	6.384.665.000,00	5.947.149.000,00	1.359,30	
5.2.3.56.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu/Tanda Batas	437.516.000,00	6.384.665.000,00	5.947.149.000,00	1.359,30	
5.2.3.57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	347.556.000,00	347.556.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.57.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat	297.556.000,00	297.556.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.57.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	52.040.875.000,00	88.226.555.000,00	36.185.680.000,00	69,53	
5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	52.040.875.000,00	87.796.365.000,00	35.755.490.000,00	68,71	
5.2.3.59.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	0,00	430.190.000,00	430.190.000,00	0,00	
5.2.3.60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	13.000.000.000,00	17.157.622.000,00	4.157.622.000,00	31,98	
5.2.3.60.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota	13.000.000.000,00	17.157.622.000,00	4.157.622.000,00	31,98	

RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIYAIAN

Halaman

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.3.66	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	110.000.000,00	385.413.000,00	275.413.000,00	250,38	
5.2.3.66.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku	0,00	170.363.000,00	170.363.000,00	0,00	
5.2.3.66.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	110.000.000,00	215.050.000,00	105.050.000,00	95,50	
5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.67.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.68	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air	3.064.482.000,00	2.978.410.500,00	(86.071.500,00)	(2,81)	
5.2.3.68.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Tawar	3.064.482.000,00	2.978.410.500,00	(86.071.500,00)	(2,81)	
5.2.3.74	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
5.2.3.74.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
5.2.3.77	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengaman Penangkal Petir	0,00	20.100.000,00	20.100.000,00	0,00	
5.2.3.77.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengaman Penangkal Petir	0,00	20.100.000,00	20.100.000,00	0,00	
5.2.3.78	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum	19.000.000,00	111.647.000,00	92.647.000,00	487,62	
5.2.3.78.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum Jaringan Sambungan Kerumah	19.000.000,00	111.647.000,00	92.647.000,00	487,62	
5.2.3.79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	78.650.000,00	713.650.000,00	635.000.000,00	807,37	
5.2.3.79.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Transmisi	20.000.000,00	95.900.000,00	75.900.000,00	379,50	
5.2.3.79.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi	58.650.000,00	617.750.000,00	559.100.000,00	953,28	
5.2.3.80	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Telepon	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
5.2.3.80.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Telepon Di atas Tanah	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
5.2.3.82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Pengetahuan Umum	823.875.000,00	35.793.447.000,00	34.969.572.000,00	4.244,52	
5.2.3.82.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Pengetahuan Umum	681.000.000,00	35.543.132.000,00	34.862.132.000,00	5.119,26	
5.2.3.82.03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Keagamaan	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	

RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN CYTEK PENGAPATAN, BELANJA DAN PEMERINTAHAN

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.3.82.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Bahasa	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.82.07	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	41.800.000,00	41.800.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.82.08	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Arsitektur, Kesenian, Olah raga	90.150.000,00	197.590.000,00	107.440.000,00	119,18	
5.2.3.82.09	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Geografi, Biografi, Sejarah	4.275.000,00	4.275.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.85	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	53.232.000,00	65.464.000,00	12.232.000,00	22,98	
5.2.3.85.03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Alat Kesenian	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
5.2.3.85.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Alat Olah Raga	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
5.2.3.85.07	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Benda-benda Bersejarah	43.232.000,00	55.464.000,00	12.232.000,00	28,29	
5.2.3.86	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	16.395.000,00	20.759.000,00	4.400.000,00	26,90	
5.2.3.86.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	16.395.000,00	20.759.000,00	4.400.000,00	26,90	
5.2.3.86	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman	5.000.000,00	240.668.000,00	235.668.000,00	4.713,36	
5.2.3.86.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Hias	5.000.000,00	240.668.000,00	235.668.000,00	4.713,36	
5.2.3.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	5.650.000.000,00	3.460.245.000,00	(2.189.755.000,00)	(38,76)	
5.2.3.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	5.650.000.000,00	3.460.245.000,00	(2.189.755.000,00)	(38,76)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(24.572.076.000,00)	(135.841.062.000,00)	(111.268.986.000,00)	452,83	
6	PEMBIAYAAN DAERAH					
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH					
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	58.572.076.000,00	170.841.062.000,00	112.268.986.000,00	191,68	
6.1.1.04	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	54.172.076.000,00	166.441.062.000,00	112.268.986.000,00	207,25	
6.1.1.04.01	Belanja Pegawai Dari Belanja Tidak Langsung	54.172.076.000,00	166.441.062.000,00	112.268.986.000,00	207,25	
6.1.5	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	4.400.000.000,00	4.400.000.000,00	0,00	0,00	

RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN


Halaman

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
6.1.5.01	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	4.400.000.000,00	4.400.000.000,00	0,00	0,00	
6.1.5.01.01	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	4.400.000.000,00	4.400.000.000,00	0,00	0,00	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	34.000.000.000,00	35.000.000.000,00	1.000.000.000,00	2,94	
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	30.000.000.000,00	31.000.000.000,00	1.000.000.000,00	3,33	
6.2.2.02	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	30.000.000.000,00	31.000.000.000,00	1.000.000.000,00	3,33	
6.2.2.02.01	Penyertaan Modal pada BUMD	30.000.000.000,00	31.000.000.000,00	1.000.000.000,00	3,33	
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00	
6.2.4.03	Pemberian Pinjaman Daerah Lainnya	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00	
6.2.4.03.01	Pemberian pinjaman daerah lainnya	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	24.572.075.000,00	135.841.062.000,00	111.268.986.000,00	452,83	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00	

Penalang, 25 September 2017
BUPATI PEMALANG

JUNAEDI

Lampiran 10. Surat Ijin Penelitian



YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI TEGAL
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
 PROGDI : MANAJEMEN, AKUNTANSI, DAN MANAJEMEN PAJAK
 (STATUS TERAKREDITASI)
 Jl. Halmahera Km. 1 Telp. (0283) 355720 Tegal

Nomor : **141/K/E/FEB/UPS/III/2019** Tegal, 25 Maret 2019

Lampiran : -

Perihal : **Permintaan Data**

Kepada : Yth. **Kepala BPKAD Kab. Pemalang**
 Jl. Suro Hadikusumo, No. 01, Kebondalem
 Di – Pemalang

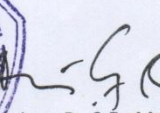

Dengan hormat, salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis mahasiswa diwajibkan mengadakan penelitian sebagai bahan menyusun skripsi.

Berkenaan dengan hal itu, mohon berkenaan Bapak membantu memberi data yang diperlukan dalam penelitian tersebut kepada mahasiswa :

N a m a : **Muranah**
 NPM : **4315500099**
 Program Studi : **Akuntansi**
 Judul Skripsi : **Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah, Rasio Efektivitas Keuangan Daerah, Dan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal Untuk Pelayanan Publik (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang)**

Atas bantuan dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih,

Dekan

Farida Nuryanti Noviany R., S.E., M.M., Akt., CA
 NIPY. 136628111975



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

SURAT REKOMENDASI

NOMOR : 072/ 174 / III / 2019

- I. Dasar : 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
: 10. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor : 070 / 265 / 204 tanggal 20 Februari 2004

- II. Membaca : Surat dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal Nomor : 141/K/E/FEB/UPS/III/2019, tanggal 25 Maret 2019, perihal Permohonan Permintaan Data

Pada prinsipnya kami Tidak Keberatan / Dapat menerima atas pelaksanaan Penelitian / Mencari Data dan Praktik Kerja Lapangan di Kabupaten Pemalang.

- III. Yang dilaksanakan oleh :

33. Nama : **Muranah**
34. Kebangsaan : Indonesia
35. Alamat : RT. 001 / RW. 003 Kel. Sugihwaras Kec. Pemalang
36. Pekerjaan : PNS
37. Penanggung Jawab : **DR. Dien Noviany R, S.E., M.M., Akt., CA**
38. Maksud dan Tujuan : Dalam Rangka Penelitian untuk menyusun Skripsi/ Tugas Akhir dengan judul: Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah, Rasio Efektivitas Keuangan Daerah, dan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah terhadap Belanja Modal untuk Pelayanan Publik (Studi Kasus Pemerintahan Daerah Kab. Pemalang.
39. Lokasi : Di BPKAD Kab. Pemalang.

40. Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melapor kepada Camat / Instansi yang akan dijadikan obyek lokasi untuk mendapat petunjuk seperlunya;
- b. Pelaksanaan Penelitian / mencari data tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kepentingan umum dan stabilitas pemerintahan;
- c. Tidak membahas politik dan atau agama yang dapat menimbulkan terganggunya keamanan dan ketentraman;
- d. Untuk Penelitian yang mendapatkan dukungan dana dari sponsor baik dari dalam negeri maupun luar negeri, agar dijelaskan pada saat mengajukan perijinan;
- e. Surat Rekomendasi dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila tidak mentaati/ mengindahkan peraturan yang berlaku atau obyek lokasi kegiatan menolak untuk menerima.

- IV. Surat Permohonan Pengambilan Sampel / mencari data ini berlaku :
27 Maret 2019 s/d 27 April 2019

- V. Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum

Pemalang, 27 Maret 2019

An. BUPATI PEMALANG
KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN PEMALANG
Kab. Kasri Politik Dalam Negeri

Tembusan

1. Bupati Pemalang
2. Kakan Kesbangpolinmas
Kab Pemalang (Sbg Laporan)

NUR AZIZ MUHAMMIN, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19671014 199001 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**SURAT IJIN PENELITIAN
NOMOR : 072/ 174/ III/ 2019 / BAPPEDA**

- Dasar** : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
2. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 070/265/2004 tanggal 20 Februari 2004 Tentang Persyaratan Ijin Survey/Riset/KKL/PKL di Jawa Tengah.
3. Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kesbangpolinmas Kab. Pemalang Nomor : 072 / 174/ III/2019 tanggal 27 Maret 2019.
- Memperhatikan** : Surat dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal Nomor: 141/K/E/FEB/UPS/III/2019 tanggal 25 Maret 2019 Perihal Permohonan Ijin Penelitian.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang memberikan Ijin Penelitian kepada :

Nama : **MURANAH**
NIM : 4315500099
Program Studi : Akuntansi
Alamat : RT. 001 / RW. 003 Kel. Sugihwaras Kec. Pemalang Kab. Pemalang
Penanggungjawab : **Dr. DIEN NOVIANY R., S.E., M.M., Akt., CA**
Maksud dan Tujuan : Dalam rangka kegiatan penelitian untuk menyusun Skripsi dengan judul : "Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah, Rasio Efektivitas Keuangan Daerah, dan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal untuk Pelayanan Publik (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang)."
Lokasi : di BPKAD Kab. Pemalang
Waktu Pelaksanaan : Tanggal 27 Maret s/d 27 April 2019

Dengan ketentuan :

1. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
2. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
3. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
4. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas;
5. Memberikan laporan hasil penelitian setelah melaksanakan penelitian kepada Bappeda Kabupaten Pemalang.

Demikian untuk menjadikan maklum dan guna seperlunya.

Pemalang, 27 Maret 2019


**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN PEMALANG**
 Sekretaris
SETYO HADISUSILO, S.Sos
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19650522 198603 1 011

Tembusan :

1. Kepala Bappeda Kab. Pemalang;
2. Kepala BPKAD Kab. Pemalang;
3. Kepala Kantor Kesbangpolinmas Kab. Pemalang;
4. Kasubag Umum dan Kepegawaian Bappeda Kab. Pemalang.